Sanggar Inovasi Desa

Laporan Akhir Program

AKADEMI KAMPUNG SIGAP KALIMANTAN TIMUR

Desember 2020 – Juni 2021

SIGAP SEJAHTERA

Konservasi Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

Sanggar Inovasi Desa

KATA PENGANTAR

Hari ini, kita jarang mendengar narasi - narasi megah tentang revolusi industri, *singularity*, ataupun rasio artifisial untuk kemenangan komparatif. Sebab ide tersebut menjadi kurang kontekstual di tengah pandemi dan juga resesi ekonomi yang menyertainya. Sebagai gantinya, narasi – narasi tersebut digantikan oleh narasi yang lebih kontekstual dan heroik seperti gotong royong dan solidaritas kemanusiaan. Gotong royong sebagai latar budaya khas nusantara telah terbukti menjadi benteng tangguh dalam membendung dampak pandemi. Puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi politik adalah musyawarah, dan puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Setidaknya ketiga hal tersebut adalah definisi operasional makna gotong royong. Nilai – nilai organik khas desa tersebut menjadi relevan diterapkan sebagai gagasan laku hidup alternatif *new normal* ala *ndeso.*

Dalam tataran praksis, medium untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan, hingga berhimpun bekerjasama menjadi kebutuhan vital bagi desa – desa agar mampu mendayagunakan kekuatan utamanya (aset dan kewenangan) menuju kemandirian desa. Memampukan desa dalam membangun ekosistem kemandirian juga berarti memobilisasi segala sumber daya yang ada di desa (partisipasi), serta memperkuat sistem pendukung diluar desa untuk menjamin iklim inovasi desa yang positif.

Akademi Kampung Sigap menawarkan medium bagi desa – desa untuk saling terhubung, hingga membuat skenario - skenario diatas menjadi ideal. Serangkaian upaya menyemai energi perubahan dari desa dilakukan melalui proses penggalian kebutuhan, identifikasi isu kunci perubahan, hingga *prototyping* tema perubahan dengan pola replikasi praktik – praktik baik yang sudah dilakukan desa lain tanpa meninggalkan corak asalnya. Tata kelola Pemerintahan Desa dan tata kelola BUM Desa disasar sebagai *prime mover* mewujudkan perbaikan sistemik mulai dari penguatan kapasitas, ruang pembangunan yang inklusif, hingga ketersediaan sistem penjamin proses perubahan. Disinilah peran strategis Akademi Kampung Sigap, menstimulasi ruang partisipasi di satu sisi, serta memperkuat kualitas partisipasi di sisi lain.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau, dan para Pejuang Sigap Sejahtera se-Kabupaten Berau atas ikhtiar bersama membangun kedaulatan kampung – kampung di Berau. Tak lupa, apresiasi setinggi – tingginya kami sematkan kepada 22 kampung yang tergabung dalam program Akademi Kampung Sigap, yang telah membersamai proses menemu kenali kekuatan, membangun imajinasi kampung masa depan, mendefinisikan arah strategis perubahan, hingga mentransformasi perubahan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam capaian – capaian selama proses implementasi 6 bulan ini. Dalam koridor program, perbaikan terus menerus dilakukan melalui proses evaluasi internal rutin dan penerimaan input - input dari berbagai pihak. Akhirnya, narasi yang kami sajikan dalam laporan ini harapannya dapat memperkuat barisan ekosistem inovasi kemandirian desa sekaligus mendekatkan mimpi desa mandiri yang berdaulat. *Merdesa. Merdeka dari Desa !!*

Yogyakarta, 15 Juni 2021
Program Manager – Akademi Kampung Sigap

Aditya Mahendra Putra

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

1. 1 ..... PROLOG 1

1.1 Arah Strategis Perubahan 1

1.1.1 Membangun Kapasitas Desa dalam Mencapai Kemandiriannya 1

1.1.2 Program Sigap Sejahtera 2

1.2 Akademi Kampung Sigap 5

1.2.1 Akademi Kampung Sigap : Sebuah Pilihan Tepat 7

1.2.2 Tujuan 8

1.2.3 Waktu dan Kegiatan 9

2. 2 ..... *LAUNCHING PROGRAM* : Peresmian Oleh 2 Menteri Sekaligus 10

2.1 *Keynote Speech 1 :* Menteri Desa PDTT 11

2.2 *Keynote Speech 2* : Menteri PPN/ Kepala Bappenas 12

2.3 *Keynote Speech 3 :* Gubernur Kalimantan Timur 13

2.4 *Keynote Speech 4* : Kepala DPMD Kalimantan Timur 14

2.5 *Keynote Speech 5* : Direktur Eksekutif YKAN 15

2.6 *Keynote Speech 6* : Ketua YSID 16

3. 3 ..... *PRELIMINARY ASSESSMENT* – Pemahaman Kebutuhan untuk Intervensi yang Kontekstual 17

3.1 Gambaran Umum 17

3.2 Ruang Lingkup dan Tujuan 18

3.3 Pendekatan dan Metode Analisis 18

3.4 Indikator Pengukuran 19

3.4.1 Tata Kelola Pemerintah Kampung 19

3.4.2 Tata Kelola BUMK 19

3.5 Pelaksanaan 20

3.6 Hasil Assessment (Deskripsi Umum) 21

3.6.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung 21

3.6.2 Tata Kelola BUMK 22

3.7 Temuan Kunci 23

3.7.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung 23

3.7.2 Tata Kelola BUMK 23

3.8 Rekomendasi Atas Hasil *Assessment* 24
3.8.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung 24
3.8.2 Tata Kelola BUMK 24
4. 4 ..... PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN ONLINE : Bersiasat di Tengah Pandemi 25
4.1 Gambaran Umum 25
4.2 Proses Pelatihan dan Pendampingan Online 26
4.2.1 Skenario 26
4.2.2 Materi Pelatihan 26
4.2.3 Mentor Utama dan *Dedicated Mentor* 27
4.3 Pelaksanaan 28
4.3.1 Jadwal 28
4.3.2 Durasi Waktu Pelaksanaan 28
4.4 Peserta 29
4.4.1 Sasaran Peserta 29
4.4.2 Atensi/ Kehadiran Peserta 30
4.4.3 Jumlah Peserta Menyelesaikan Penugasan 31
4.5 Kesimpulan dan Rekomendasi 32
4.5.1 Kesimpulan 32
4.5.2 Rekomendasi 33
5. 5 ..... EVALUASI DAN KONSULTASI TATAP MUKA : Menyambangi 21 Kepala Kampung & 1 Kepala Daerah 34
5.1 Gambaran Umum 34
5.2 Konsultasi Tatap Muka 36
5.2.1 Jadwal 36
5.2.2 Catatan Proses 36
5.3 Cerita *Roadshow* 21 Kampung 38
5.3.1 Tepian Buah 39
5.3.2 Harapan Jaya 40
5.3.3 Melati Jaya 41
5.3.4 Labanan Makmur 42
5.3.5 Labanan Makarti 44
5.3.6 Muara Lesan 45
5.3.7 Merabu 47
5.3.8 Teluk Semanting 48
5.3.9 Teluk Sumbang 49

5.3.10 Biduk - Biduk 52
5.3.11 Tembudan 54
5.3.12 Campur Sari 56
5.3.13 Talisayan 59
5.3.14 Biatan Bappinang 61
5.3.15 Biatan Lempake 62
5.3.16 Pilanjau 65
5.3.17 Semurut 67
5.3.18 Tanjung Batu 69
5.3.19 Teluk Harapan 70
5.3.20 Maluang 72
5.3.21 Sungai Payang 74
5.4 Paparan Akhir Program & Rencana Tindak Lanjut 76
5.4.1 Paparan Program Terhadap Stakeholder Tingkat Kabupaten 76
5.4.2 Paparan Program Terhadap Stakeholder Tingkat Kampung 78
6. 6 REKOMENDASI STRATEGIS PEMAJUAN EKOSISTEM INOVASI KEMANDIRIAN KAMPUNG DI BERAU 80
6.1 Posisi Program Saat Ini 80
6.2 Temuan Kunci 81
6.3 Peluang dan Tantangan 83
6.3.1 Peluang - Sumber Daya Kunci 83
6.3.2 Tantangan 83
6.4 Strategi Keberlanjutan : Rekomendasi Penguatan Ekosistem Inovasi Kemandirian Kampung 84
6.4.1 Perbaikan Infrastruktur Politik 84
6.4.2 Perbaikan Infrastruktur Ekonomi 84
6.4.3 Perbaikan Infrastruktur Sosial 84
6.4.4 Perbaikan Infrastruktur Teknologi 84
7. 7 ..... EPILOG 85
7.1 Ucapan Terima Kasih 85
7.2 Kata Kita 86
7.3 Tim Implementasi Program Akademi Kampung Sigap 89
7.4 Kolase 90

1 PROLOG

1.1 ARAH STRATEGIS PERUBAHAN

Tren pembangunan perlahan mulai bergeser, dari yang sebelumnya kotasentris, kini percepatan pembangunan dengan memperkuat daerah – daerah pinggiran (desa) menjadi perspektif utama dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Desa yang menempatkan desa sebagai subyek utama pembangunan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa didorong sebagai aktor utama pembangunan itu sendiri, serta dituntut menjadi entitas yang mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa.

Dengan dua asas utama "rekognisi" dan "subsidiaritas" UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan asas "desentralisasi" dan "residualitas". Dengan mendasarkan pada asas desentralisasi dan residualitas, desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/ kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/ kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa pendaya gunaan anggaran.

Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pertanyaannya, kenapa dengan situasi ini, ada desa yang cepat mandiri dan ada desa yang lamban?

Meskipun jumlahnya sangat kecil, ternyata masih banyak desa/ kampung dengan prestasi luar biasa yang yang dapat diambil pengalaman serta pelajarannya untuk direplikasi di Kabupaten Berau. Selain itu, juga ditemukan bumdes/ bumkam dengan prestasi mengagumkan, bagaimana mereka bukan hanya memiliki profit besar, namun juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

1.1.1 Membangun Kapasitas Desa dalam Mencapai Kemandiriannya

Sanggar Inovasi Desa, yang dibentuk Pemerintah Desa Panggungharjo dan beberapa tokoh pemerhati desa hadir sebagai wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa melalui pendokumentasian pengalaman hingga desain *knowledge management* sektor desa, yang memungkinkan desa – desa saling belajar, bertukar pengalaman, dan bekerja sama.

Serangkaian proses telah dilakukan, mulai dari dokumentasi perjalanan panjang Desa Panggungharjo dalam mencapai kemandiriannya, yang kemudian spektrumnya diperluas melalui interaksi – interaksi antar desa, hingga rumusan arah tatanan Indonesia baru dari desa sebagai buah gagasan Kongres Kebudayaan Desa. Kesimpulan yang didapat dari serangkaian proses yang dilakukan adalah formulasi ekosistem inovasi kemadirian desa dapat dicapai melalui "Tiga Pilar Kemadirian Desa", yakni kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, serta kedaulatan data.

Kerangka politik yang bersih penting untuk menjamin proses birokrasi yang sehat. Ekonomi yang berdaulat menjadikan desa sebagai arena demokrasi ekonomi. Daulat atas data memungkinkan desa merumuskan arah strategis pembangunan desa, atau dengan kata lain menyelenggarakan demokrasi berbasis data (datakrasi). Ketiga pilar ini akan menyokong isu – isu strategis pembangunan desa.

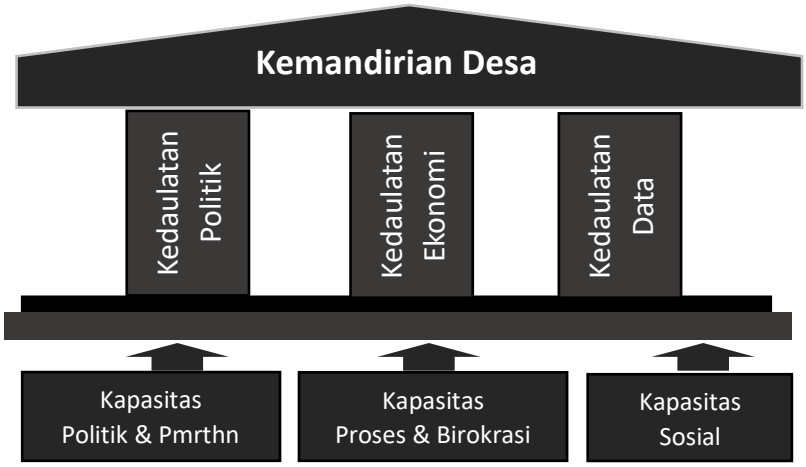

Gambar 1 Peta Kemandirian Desa

Sebagai pondasi ketiga pilar tersebut, diperlukan "kapasitas". Inilah yang akan menjadi bagian integral desa dalam mendaya gunakan segala aset dan kewenangannya. Kapasitas dalam hal ini merujuk pada:

1) Kapasitas Politik dan Kepemimpinan, yakni kapasitas yang dimiliki kepala desa
2) Kapasitas Proses dan Birokrasi, yakni kapasitas yang dimiliki aparatur pemerintah desa, dan
3) Kapasitas Sosial, yakni kapasitas yang dimiliki masyarakat desa

1.1.2 Program Sigap Sejahtera

Sejak tahun 2010, *The Nature Conservancy* (TNC), sekarang Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengembangkan model pendekatan sosial yang sederhana dan inovatif yang disebut SIGAP REDD+ atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan, yang disingkat dengan SIGAP dan dalam pendekatan tersebut, tahapan dan proses yang dikembangkan bertumpu pada aksi kolektif warga untuk menemukan kekuatan, impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, menguatkan eksistensi diri sebagai komunitas atau warga kampung. Pendekatan tersebut merupakan salah satu model yang akan diperkenalkan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat kampung, termasuk kepada para *stakeholder* yang bekerja bersama masyarakat di Kalimantan Timur lainnya.

Dalam pendekatan SIGAP, proses pendokumentasi kegiatan dilakukan dengan baik dan metode pendekatan tersebut terdiri dari tujuh tahapan yang didalamnya juga termasuk *Appreciative Inquiry*, mulai dalam proses pelibatan masyarakat hingga pelaksanaan dan pemantauan program. Tujuh tahapan tersebut adalah:

1	*Disclosure*	Mendekatkan diri, hati dan pikiran bersama masyarakat	Inspirasi
2	*Define*	Dialog tema perubahan /membangun percakapan tematik	
3	*Discover*	Dapatkan kekuatan untuk menemukenali dan memetakan kekuatan (potensi) dan asset yang dimiliki masyarakat	
4	*Dream*	Deklarasikan impian bersama	Impian
5	*Design*	Detailkan rencana perubahan	
6	*Delivery*	Daya upayakan keberhasilan	Inovasi
7	*Drive*	Dengungkan keberhasilan	

Table 1 Pendekatan Sigap - 7D

Berawal dari penerapan pada dua kampung model, pendekatan SIGAP terus diperluas dan sejak tahun 2018, bersama para pihak, Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), UGM, Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal menginisasi program Sigap Sejahtera, salah satunya adalah menyiapkan dan menyebarkan para pendamping lapangan di seluruh kampung di Kabupaten Berau, melalui program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS), dimana mereka diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang handal serta memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi untuk mendukung kemajuan kampung dimana mereka ditempatkan dengan tiga bidang utama dalam penerapan SIGAP, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Pemanfaatan Sumberdaya Alam melalui pengembangan Perhutanan Sosial dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi melalui Badan Usaha milik Kampung (BUMK).

Keberpihakan pemerintah pada masyarakat perdesaan atau semangat membangun Indonesia dari pinggiran, ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bukti atas respon positif tersebut adalah dikembangkannya 99 Kampung Sigap dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau sejak tahun 2018 dan mulai bertugas pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan pada tahun 2020 dan akan berakhir pada periode Desember 2020.

Keberadaan para Pejuang SIGAP selama tahun 2019 dan 2020 telah menunjukan perkembangan yang postif di tingkat kampung, antara lain:

1	Tata Kelola Pemerintahan Kampung	a. Kenaikan IDM (8 kampung Mandiri, 31 kampung Maju, 60 kampung Berkembang dan 1 kampung Tertinggal; b. Sebanyak 50 kampung telah memiliki peta 3 dimensi dan peta tataguna lahan/rencana tata ruang kampung; c. 97 kampung telah memiliki website kampung dengan dengan 27 kampung yang aktif;
2	Pemanfaatan SDA melalui Program Perhutanan Sosial	a. Sebanyak 8 kampung telah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa dari KemenLHK dengan total luasan mencapai 68.000 hektar; b. Sebanyak 1 KTH mendapatkan ijin kemitraan kehutanan dan 5 KTH lainnya sedang menunggu persetujuan; c. Sebanyak 1 koperasi mendapatkan ijin HTR;
3	Kelembagaan Ekonomi melalui BUMK	a. Sebanyak 93 kampung telah membentuk BUMK dengan 69 BUMK aktif, 21 BUMKAM belum aktif dan 9 kampung belum membentuk BUMK; b. Teridentifikasi 51 jenis kerajinan tangan, 53 kampung mengembangkan pertanian/perkebunan, 120 jenis makanan olahan, 12 jenis jamu tradisional, 11 lokasi wisata yang dikembangkan;

Table 2 Capaian Program Sigap Sejahtera 2018 - 2020

Selain dukungan pada program PSS, Pemerintah Kabupaten Berau melalui DPMK Berau selaku instansi teknis telah mendorong berbagai kegiatan dalam mendukung peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Kampung maupun upaya-upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat kampung melalui pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan hal tersebut selaras dengan kebijakan di tingkat Kabupaten Berau melalui dukungan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

Sementara itu, pada tahun 2017 dan 2018, YKAN bekerjasama dengan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur mendorong pengembangan sebuah ekosistem untuk saling belajar antar desa kepada 150 kampung di Kalimantan Timur yang meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan diharapkan akan terus berlanjut dalam mendorong aksi bersama untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan dalam mencapai kemandirian kampung.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tetap berkomitmen dan konsisten melaksanakan kegiatan permberdayaan masyarakat dengan pendekatan SIGAP yang

bertumpu pada kekuatan masyarakat atau *Strength-Based Approach*, sehingga pada tahun 2020/2021 telah direncanakan untuk melanjutkan program tersebut dengan jangakauan yang diperluas dari tingkat Kabupaten Berau menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Penajaman strategi dalam rangka meningkatkan kapasitas kepada baik terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Kampung maupun Tata Kelola BUMK dan pada tahun 2020/2021 dilakukan dengan mengembangkan kelas khusus melalui program **"Akademi Kampung"** melalui pendekatan SIGAP serta mengelaborasikan dengan platform pembelajaran CoEV dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kampung yang ada di berbagai kabupaten di Kalimantan Timur.

Untuk menindak lanjuti komitmen berbagai pihak dalam membentuk ekosistem kemandrian kampung, maka akan dilakukan seremonial *Launching CoE* sekaligus pembukaan Kelas Akademi Kampung sebagai titik awal implementasi model **Pusat Keunggulan Inovasi Desa** di Kalimantan Timur.

Dalam merealiasasikan rencana tersebut, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerjasama dengan Yayasan Sanggar Inovasi (YSID) dari Desa Panggungharjo yang merupakan salah satu desa terbaik dan menjadi salah satu desa percontohan di Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan menuju kemandirian kampung/desa.

Desa Panggungharjo merupakan satu dari dua desa di Indonesia yang dinobatkan oleh Kementrian Desa PDTT, BAPPENAS, dan *United Nation for South-South Cooperation* (UNOSSC) sebagai *Center of Excellence Village* (CoEV) atau pusat keunggulan inovasi desa baik - yang inovatif dan kreatif dalam membangun desanya melalui pilar politik dan pemerintahan, pilar perekonomian desa, serta pilar pengelolaan sistem informasi dan data desa.

Kerjasama tersebut dimasa depan diharapkan akan melahirkan banyak kampung yang dapat menjadi contoh/model yang menjadi pusat pembelajaran *Center of Excellence* di Kalimantan Timur pada umumnya, dan Kabupaten Berau khususnya.

1.2 AKADEMI KAMPUNG SIGAP

Seperangkat kewenangan telah membuka kesempatan yang sama bagi desa untuk mencapai kemandiriannya. Pemberian kewenangan tersebut juga dibarengi dengan mandat anggaran sebagai stimulan pembangunan desa. Sinergitas arah strategis pembangunan nasional – daerah – desa perlu diorkestrasi sedemikian rupa untuk menghasilkan dampak yang luas bagi masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, dengan kesempatan sama, mengapa ada desa yang melesat maju, dan ada desa yang masih jalan ditempat? Pelajaran yang dapat dipotret adalah kemampuan desa dalam pendayagunaan aset dan kewenangan menjadi kunci bagi desa untuk melesat. Desa - desa yang maju telah memunculkan berbagai inovasi di berbagai sektor. Serangkaian proses replikasi maupun adaptasi model inovasi perlu dilakukan akan mempercepat tumbuh kembang desa.

Sanggar Inovasi Desa, yang dibentuk Pemerintah Desa Panggungharjo dan beberapa tokoh pemerhati desa hadir sebagai wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa melalui pendokumentasian pengalaman hingga desain *knowledge management* sektor desa, yang memungkinkan desa – desa saling belajar, bertukar pengalaman, dan bekerja sama.

Teori perubahan yang diusulkan dalam program ini mengacu pada pengalaman berbagai aktor, termasuk didalamnya *stakeholder* di desa, serta organisasi-organisasi yang memiliki pengalaman panjang dalam mewujudkan kemandirian desa. Program ini mendorong terbentuknya *"sister village"* Desa Panggungharjo, yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang kuat dalam hal membangun kemandirian desa.

Membangun perubahan juga berarti membangun pemahaman yang sama tentang urgensi dilakukannya perubahan itu sendiri. Pada sisi lain, membangun sinergitas peran antar pihak untuk mewujudkan ekosistem inovasi kemandirian desa juga menjadi kunci. Peta jalan perubahan tersebut coba kami tuangkan dalam *roadmap* program Akademi Kampung Sigap, seperti tergambar dalam ilustrasi berikut.

Gambar 2 Roadmap Program Akademi Kampung Sigap

Penguatan kapasitas bagi pemerintah kampung dan pengelola BUMK merupakan proses yang *inheren* dalam setiap tahapan program. Model pembelajaran yang digunakan guna penguatan kapasitas dalam keseluruhan tahapan program ini merupakan pengalaman yang sudah dilakukan oleh desa lain. Metode belajar antar desa *(peer to peer)* merupakan langkah strategis untuk menjamin proses yang adaptif dan replikatif.

Pengalaman otentik inilah yang ingin di *share*, ditularkan, pada desa-desa sasaran program. Artinya, pelatihan dan pendampingan tidak didasarkan pada pengetahuan yang berasal dari "Menara Gading" yang berjarak dengan realitas pengalaman kehidupan sehari-hari di desa.

Kami juga mengasumsikan bahwa pendektan holistik memiliki *impact* yang lebih besar: program terkoodinasi atas multi level, multi sektoral memberi dampak yang lebih besar. Prinsip holistik dan transdisipliner penting untuk membuka proses belajar atau proses kerja yang melibatkan berbagai disiplin ilmu didalam memformulasikan dan mewujudkan capaian-capian, produk dan tatanan yang mampu menjadi ruang belajar dan berujung pada transformasi pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat desa.

Gambar 3 Pendekatan Program

Penguatan ekosistem kemandirian desa mewujud pada setiap level, mulai dari pemerintah supra desa, kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, hingga warga desa. Hal ini dipahami sebagai sebuah ekosistem model. Intervensi hanya pada satu level ekosistem model atau hanya menggunakan satu intervensi mungkin akan cukup berhasil, tetapi tidak cukup berdampak. Perencanaan yang partisipatif adalah contohnya. Kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang rendah atau bahkan tidak berkualitas maka tidak akan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Pendekatan satu sektor hanya akan berdampak kecil. Pendekatan yang terintegrasi pada multi sektoral menggunakan metode yang variatif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik khususnya dalam penguatan kapasitas politik dan pemerintahan, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas sosial, dan kemampuan berjejaring dan mengadvokasi diri. Artinya, jika kapasitas politik dan pemerintahan kepala desa baik, jika tidak didukung oleh kapasitas proses dan birokrasi pada aparatur pemerintahan desa yang baik, tidak akan cukup menjadi pengungkit perubahan tata kelola pemerintahan desa.

1.2.1 Akademi Kampung Sigap : Sebuah Pilihan Tepat

Pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Namun, kewenangan-kewenangan itu kini diuji oleh Pandemi. Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neo-liberalisme luluh lantah oleh virus yang tak kasat mata. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan gagal membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia, terbukti dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apapun dalam kondisi semacam ini.

Gambar 4 Akademi Kampung Sigap - Sebuah Pilihan yang Tepat

Covid-19 juga menyadarkan kita bahwa puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi politik adalah musyawarah, dan puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Ketiga hal tersebut merupakan definisi operasional dari nilai khas nusantara, yakni gotong royong. Dengan demikian konsepsi kolaborasi – *economic of sharing* –solidaritas menjadi *value* yang terus menguat dalam menghadapi gempuran pandemi.

Mengacu pada dinamika pembangunan desa dalam konteks nasional, lahirnya UU Desa, hingga lahirnya PP.11/2021 tentang BUMDes. Inisiasi Akademi Kampung Sigap juga merupakan langkah strategis untuk melakukan transformasi BUMK sebagai upaya mewujudkan demokratisasi ekonomi di kampung. Dengan diakuinya BUMK sebagai badan hukum, maka penting bagi setiap kampung melakukan penyesuaian Perkam tentang BUMK, hingga AD-ART BUMK. Idealnya peraturan daerah yang mengatur tentang BUMK juga harus menyesuaikan, agar kebijakan – kebijakan yang dihasilkan bersifat simulatif terhadap apa yang terjadi di lapangan serta kontekstual terhadap regulasi yang ada.

Pun arah strategis pembangunan Berau, sebagaimana tergambarkan dalam visi Bupati saat ini, Program Sigap Sejahteraa merupakan salah satu program prioritas yang didorong sebagai langkah kongkrit menjamin kedaulatan desa yang mencakup 3 bidang utama pembangunan, yakni: 1.) tata kelola pemerintahan kampung, 2.) perekonomian kampung, dan 3.) perhutanan sosial.

Dengan demikian, pilihan menjadikan program Akademi Kampung Sigap sebagai upaya revitalisasi peran pemerintah kampung yang dikerangkai dalam agenda reformasi birokrasi kampung serta revitalisasi BUMK sebagai penggerak utama perekonomian di kampung merupakan pilihan tepat dalam upaya mewujudkan kemandirian kampung.

1.2.2 Tujuan

Tujuan akhir yang ingin disasar dalam program ini adalah munculnya desa – desa sebagai **Laboratorium Inovasi Kampung** di Berau, yang merupakan *sister village,* yang lahir melalui proses adaptasi model/ replikasi pengalaman – pengalaman desa Panggungharjo. Sehingga kedepannya dimungkinkan proses saling belajar antar desa dalam satu wilayah terjadi.

Dalam setiap tahapan prosesnya, kegiatan pelatihan dan pendampingan penguatan kapasitas bagi pemerintahan kampung dan pengelola BUMK senantiasa dilakukan, yang bertujuan untuk:

1.2.2.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung

a. Penguatan kapasitas politik dan pemerintahan kampung yang meliputi penguatan kapasitas politik dan kepemimpinan serta penguatan kapasitas proses dan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab;
b. Penguatan kapasitas sosial dengan membangun partisipasi yaitu dengan menciptakan ruang ruang partisipasi dan mendorong proses pelembagaan partisipasi;
c. Penguatan interkonektivitas peran pemerintah pusat – pemerintah daerah – pemerintah kampung dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan kampung.

1.2.2.2 Tata Kelola BUMK

a. Memetakan kondisi BUMK saat ini yang meliputi aspek kelembagaan, aspek proses bisnis internal serta aspek perkembangan usaha sebagai langkah awal untuk merancang strategi pendampingan yang tepat;
b. Membangun mindset kewirausahaan sosial sebagai modal utama menjalankan BUMK;
c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengelola BUMK yang memenuhi prinsip prinsip kewirausahaan sosial yang berkelanjutan;
d. Meningkatkan akses/konektivitas untuk saling belajar, meningkatkan skala usaha dan perluasan kerjasama.

1.2.3 Waktu dan Kegiatan

Pada fase 1 Program Akademi Kampung Sigap yang berlangsung Desember 2020 – Juni 2021 ini, kami melakukan kegiatan – kegiatan seperti yang tergambar pada ilustrasi berikut:

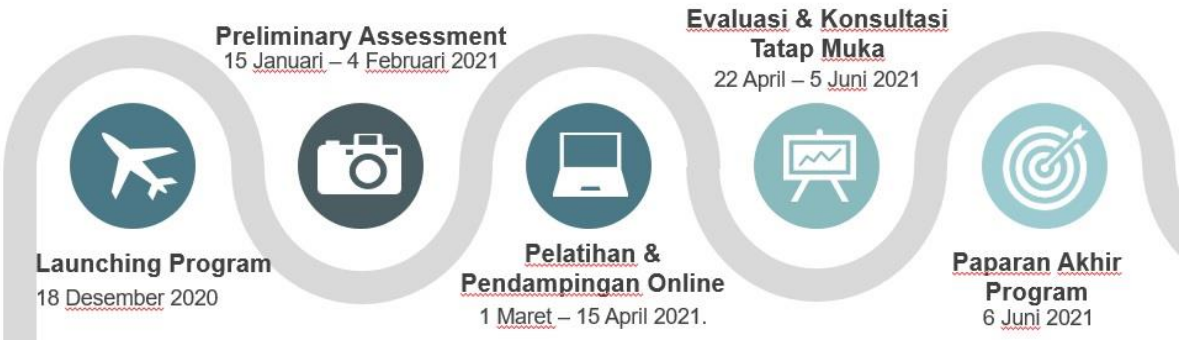

Gambar 5 Tahapan Program – Fase 1 Akademi Kampung Sigap

Pada ranah implementasi, program dirancang dengan tidak hanya mempertimbangkan keluaran saja (*output based*), melainkan juga mengutamakan proses (*process based*). Hal ini karena penguatan jaringan ke bawah *(top down)*, atas *(bottom up),* dan tengah *(middle out)* menjadi bagian proses *engagement* dan *transfer of knowledge*.

a. Top Down

Kultur perencanaan pembangunan desa saat ini tidak dapat dilepaskan dari program pemerintah diatasnya. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya kapasitas advokasi pemerintah desa dalam mengelola aset dan kewenangannya.

Pada tahap awal, model dukungan berupa mandatori program dari pemerintah supra desa akan sangat efektif mendorong arah pembangunan desa. Dengan demikian, kami akan melakukan *engagement* pemerintah kabupaten pada awal program. Pada tahap selanjutnya, model dukungan ekosistem sangat diperlukan. Seluruh *stakeholder* yang terlibat perlu satu suara guna mencapai tujuan akhir program.

b. Bottom Up

Untuk memastikan dukungan dan kepercayaan setiap pihak yang terlibat dalam mewujudkan perubahan yang diusulkan, penting untuk mengkomunikasikan cara solusi dibuat. Jika arah perubahan hanya didominasi oleh sebagian pihak, kemungkinan besar akan terjadi penolakan. Namun, jika dipahami bahwa semua peserta telah berkonsultasi, penerimaan tampaknya lebih menjanjikan.

c. Middle Out

Harus ada upaya untuk menemukan dan mengkomunikasikan manfaat khusus atas program yang dijalankan. Penerima manfaat program membutuhkan moderasi atas kepentingan pribadi dalam keberhasilan program. Metode ini sangat penting sebagai perspektif dalam proses transfer pengetahuan.

Dalam setiap tahapan aktivitas program, melekat aktivitas – aktivitas didalamnya. Catatan proses setiap aktivitas program akan diulas pada bagian - bagian selanjutnya.

2 *LAUNCHING PROGRAM* : PERESMIAN OLEH 2 MENTERI SEKALIGUS

Kegiatan *Launching* Akademi Kampung SIGAP serta Pusat Keunggulan Inovasi Desa dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Yayasan Konservasi Alam Nusantara pada 18 Desember 2018. Kegiatan ini sekaligus sebagai penanda dukungan lintas pihak, baik di level nasional, daerah, hingga organisasi yang memiliki komitmen dalam upaya membangun kemandirian desa di Kalimantan Timur.

Gambar 6 Poster Launching Akademi kampung Sigap & Pusat Keunggulan Inovasi Desa - Kaltim

Kegiatan daring ini dihadiri bukan hanya *stakeholder* di Kalimantan Timur, namun juga menarik perhatian masyarakat diluar Kalimantan Timur, hal ini terlihat dari interaksi *live chat* yang menunjukkan tingginya atensi para pemerhati desa diluar Kalimantan Timur pada saat acara berlangsung. Per 14 Juni 2021, siaran ini telah ditonton sebanyak 947 kali melalui kanal *youtube* Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

2.1 *KEYNOTE SPEECH 1 :* MENTERI DESA PDTT

Rangkaian acara diawali dengan paparan Menteri Desa PDTT, A Halim Iskandar, yang secara umum mengulas tentang asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU.6/2014 yang dimaksudkan untuk memberikan keluasan bagi desa dalam mewujudukan kemandiriannya. Desa diharapkan mampu mengelola masalah sendiri, merumuskan solusi - solusi berbasis masyarakat, mengidentifikasi potensi untuk meraih prestasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan di desa baik dalam aspek kewargaan mapun aspek kewilayahan.

Desa adalah ruang teritori terkecil di Indonesia yang punya kompleksitas persoalan sosial - ekonomi. Desa merupakan basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan, karenanya bila segenap permasalahan sosial-ekonomi di desa teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembagunan di negeri ini dapat kita lewati, untuk itulah berbagai ikhtiar penyempurnaan dalam kerangka impelementasi UU Desa terus dilakukan oleh Pemerintah. Pembangunan desa harus dirajut dari masalah warga berdasarkan pada potensi dan mengimani persoalan desa, serta selalu mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian sistem sosial - budaya dan lingkungan desa.

Gambar 7 Menteri Desa PDTT, Dr (Hc) Abdul Halim Iskandar memberikan sambutan dalam peluncuran Akademi Kampung Sigap dan Pusat Keunggulan Inovasi Desa

Pemerintah mendorong pembangunan desa lebih fokus pada masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat desa dengan mengarus utamakan 18 SDGs Desa. SDGs Desa menyederhanakan desa dalam mengumpulkan data, kemudian menggunakan hasilnya untuk memahami profil desa, serta memanfaatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, memilih prioritas kegiatan, dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan membangun desa. Pekerjaan besar ini tentu tidak mudah diselesaikan sendiri, perlu kolaborasi menyelesaikan permasalahan di desa.

Selain itu, *gus menteri* juga memberikan pesan, khususnya kepada kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan pihak – pihak lain terkait isu pembangunan desa untuk tidak berhenti belajar, belajar dari keberhasilan pembangunan di desa lain, untuk kemudian direplikasi, diadaptasi, atau dimodifikasi di desanya masing-masing.

2.2 *KEYNOTE SPEECH 2* : MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS

Paparan dari Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sekaligus memperjelas peran kuat desa dalam pembangunan nasional. Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Pengetahuan lama tentang desa yang kita pahami hanya pembangunan sektor pertanian, saat ini tidaklah demikian, desa telah menjadi wilayah vital menopang kedaulatan negara melalui produk sektor pertanian dan kedaulatan pangan.

Konsep pembangunan desa terus berevolusi dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Ide kemandirian menjadi pondasi dalam pembangunan desa. Salah satu tema pembangunan desa dalam RPJMN 2020-2024 adalah desa digital. Tema ini adalah respon atas perkembangan teknologi digital, bentuk konkrit dalam transformasi desa digital terwujud dalam program penguatan dan pembangunan pemerintah desa.

Gambar 8 Menteri PPN/ Kepala Bappenas menjelaskan peran penting desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 bersepakat pembangunan kewilayahan diletakkan dalam dua koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor pertumbuhan menekankan pada pertumbuhan pusat-pusat dengan basis wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sementara koridor pemerataan mendorong pengembangan wilayah sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar layanan sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.

Desa adalah satuan geografis tidak hanya berperan sebagai ruang hidup bermukim, melainkan juga sebagai ruang produksi yang terus mengalir ke wilayah lain, dengan terus memanfaatkan teknologi digital, interaksi ekonomi desa dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh, bahkan melampaui batas - batas negara. Dengan kata lain desa bukan lagi unit administrasi terkecil yang lokasinya terpencil, namun desa telah menjadi bagian dari nilai tambah rantai dan sistem produksi lintas wilayah.

Pusat Keunggulan Inovasi Desa ini merupakan recana strategis yang patut dicontoh, bahkan direplikasi karena memfasilitasi interaksi antar desa. Interakasi akan menstimulus berbagai pengetahuan yang berujung pada lahirnya inovasi pembangunan desa. Inovasi adalah salah satu sumber pertumbuhan yang memastikan pembaharuan terus berjalan, inovasi yang dilakukan olhe pelaku pembangunan akan memfasilitasi proses transformasi ekonomi pedesaan dalam waktu jangka panjang.

2.3 *KEYNOTE SPEECH 3 :* GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menyampaikan apresiasi adanya Akademi Kampung Sigap. Menurutnya Program ini penting dan strategis untuk mengoptimalkan pelibatan *champions* lokal, regional, dan global untuk bertukar pengalaman, pembelajaran dan praktik baik pembangunan antar desa. Pemerintah Povinsi Kalimantan Timur sangat mendukung berbagai upaya dan inisiatif untuk mendorong pusat keunggulan inovasi desa dan akademi Kampung SIGAP.

Gambar 9 Gubernur Kalimantan Timur menyambut positif inisiasi Akademi Kampung Sigap dan Pusat Keunggulan Inovasi Desa

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sebaran 841 desa terus berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan desa sebagai bagian visi dan misi Kalimantan Timur yang berdaulat. Model kolaborasi antar pihak yang diinisiasi dalam program Akademi Kampung Sigap perlu dicontoh untuk mewujudkan pecepatan pembangunan desa di Kalimantan Timur.

Gubernur juga menyoroti capaian Program SIGAP Sejahtera yang dilaksanakan di Kabupaten Berau telah mulai menunjukan hasil yang positif yang berdampak pada peningkatan IDM di Kalimantan Timur. Harapan besar agar Program Akademi Kampung SIGAP dapat mendorong lahirnya model desa yang unggul dan inovatif dalam melaksanakan pembangunan desa termasuk pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

Akademi Kampung Sigap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dengan hadirnya berbagai pihak yang berkolaborasi untuk membantu pembangunan perencanaan desa melalui Akademi Kampung SIGAP diharapkan dapat memberikan perspektif baru sehingga pembangunan yang ada di Kalimantan Timur bisa secara merata sejahtera.

Dingin – dingin maunya gerak jalan,
Asyik menunggang kuda diatas pelana,
Ingin rasanya bertemu ibu bapak sekalian,
Tapi apalah daya, masih pandemi corona.

2.4 *KEYNOTE SPEECH 4* : KEPALA DPMD KALIMANTAN TIMUR

Paparan selanjutnya disampaikan oleh M. Syirajudin selaku Kepala DPMK Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa lahirnya UU Desa No 6/2014 menandai terbukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa lebih maju adalah upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju, mandiri, dan sejahtera.

Gambar 10 Kepala DPMD Kaltim menyambut baik kolaborasi lintas pihak dalam Akademi Kampung Sigap

Untuk mencapai harapan - harapan tersebut, sejak tahun 2014 dilaksanakan program P3MD melalui dana desa. Saat ini Kalimantan Timur didukung oleh 389 tenaga pendamping profesional untuk mendampingi 841 desa di 81 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten. Sejak 2015 – 2020, Kalimantan Timur mendapat kucuran dana desa 3,98 Trilyun dengan menghasilkan output yang bermanfaat, antara lain seperti tergambar dalam ilustrasi berikut.

Gambar 11 Output Dana Desa di Kalimantan Timur

Dampak pelaksanaan P3MD hingga tahun 2020 adalah; 51 desa berstatus IDM mandiri, 200 desa berstatus maju, 456 desa berkembang, 128 desa tertinggal, dan hanya 4 desa yang sangat tertinggal. Mimpi kami dalam lima tahun kedepan; 1.) tidak ada desa tertinggal atau sangat tertinggal, 2.) tingkat pengangguran di pedesaan 5%, 3.) angka kemiskinan di desa 5%, dan 4.) sarana prasarana sosial dasar tersedia di 841 desa.

2.5 *KEYNOTE SPEECH 5* : DIREKTUR EKSEKUTIF YKAN

Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Herlina Hartanto menuturkan bahwa YKAN adalah orgnasisasi nirlaba dengan misi melindungi daratan dan perairan yang menjadi penyangga kehidupan. YKAN melaksanakan program pemberdayaan bagi kampung, dengan alasan;

1. Masih banyaknya desa yang terletak di hutan dam didalam hutan dengan jumlah kurang lebih 2006 desa, dan kurang lebih ada 9 juta rumah tangga yang hidupnya tergantung dengan hutan dan kegiatannya mepengaruhi kondisi hutan.
2. UU Desa 6/2014 memberikan kewenangan yang besar bagi desa, sehingga diharapkan desa mampu terlibat dalam pengelolaan SDA hutan.
3. Kebijakan dan program KLHK yaitu program perhutanan nasional juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dan pengelolaan hutan agar bisa sejahtera dan hutannya lestari. Program ini dapat disinergikan dengan program pembangunan desa.

SIGAP memandang masyarakat sebagai solusi dan percaya pada masyarakat desa dapat mengerakan potensi atau kekuatan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan sekaligus menjaga SDA di sekelilingnya. SIGAP menyasar 3 tujuan yaitu;

1. Perlindungan SDA dan hutan oleh masyarakat, melalui perhutanan sosial
2. Penguatan tata kelola pemerintah kampung
3. Peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan usaha-usaha yang ramah lingkungan yang dapat dikoordinir oleh BUMK
4. Dalam mendukung pelaksanaan program SIGAP, juga telah dikembangkan aplikasi sebagai saluran bertukar cerita dan inspurasi

Gambar 12 Direktur Eksekutif YKAN memberikan gambaran tentang Program Sigap Sejahtera

SIGAP sejahtera sebagai wadah bertukar inspirasi dan cerita yang membanggakan diantara warga desa. Program SIGAP sejahtera dilaksanakan dengan konsorsium yang terdiri dari Pemkab Berau, YKAN, UGM, PT Berau Coal. 2 tahun program dilaksanakan mendapat hasil sebagai berikut:

1. 38% Kampung masuk kategori maju dan mandiri
2. 50 Kampung memiliki peta 3D dan peta tata guna lahan
3. 90 Kampung memiliki webiste kampung dan badan usaha
4. 8 Kampung mendapatkan izin pengelolaan hutan desa sebesar 86.000 H
5. 1 kelompok tani hutan mendapatkan ijin kemitraan, dan
6. 1 koperasi izin hutan tanaman rakyat

2.6 *KEYNOTE SPEECH 6* : KETUA YSID

Peluncuran Akademi Kampung SIGAP ditutup dengan paparan Ryan Sugiarto selaku Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID). Ryan menuturkan bahwa program ini diharapkan menjadi ruang jejaring pengetahuan untuk bagi desa - desa dalam upaya membangun kemandirian desa. Upaya ini dinilai selaras dengan tindak lanjut pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (KKD).

Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa sebagai buah gagasan KKD telah dideklarasikan oleh Menko PMK, Muhajir Efendi. Setidaknya terdapat 3 pilar untuk mewujudkan kemandirian desa, yaitu; 1) Pilar Kedaulatan Politik dan Pemerintahan, 2) Pilar Kedaulatan Perekonomian Desa, 3) Pilar Kedaulatan Data Desa.

Gambar 13 Ketua YSID menjelaskan model kolaborasi antar desa

Dengan kokohnya ketiga pilar ini, desa akan menemukan ruangnya lebih fleksibel dan komplit untuk membangun kemandiriannya dan membangun kesejahteraan warga. Program ini diharapkan menjadi wadah yang berguna bagi kita semua, memberi ruang bagi untuk secara bersama-sama belajar, berkolaborasi ide, menuangkan gagasan, serta menularkan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di masing - masing desa, sehingga tercipta ekosistem kolaborasi antar desa yang berkelanjutan.

Pengelolaan pengetahuan ini menjadi landasan penyelenggaran Kongres Kebudayan Desa, bahwa setiap desa mampu merumuskan pengelolaan pengetahuannya sendiri, yang kemudian dijadikan pengetahuan bersama dan dijejaringkan dengan desa – desa lainnya.

3 *PRELIMINARY ASSESSMENT* – PEMAHAMAN KEBUTUHAN UNTUK INTERVENSI YANG KONTEKSTUAL

3.1 GAMBARAN UMUM

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan di desa - daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Sehingga, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk ditelaah dan dipahami bersama terkait sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Berau adalah **kurangnya optimalisasi pengelolaan potensi lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dijabarkan lebih rinci ke permasalahan pokok sebagai berikut. *Pertama*, rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan daerah; *kedua*, degradasi lingkungan hidup; *ketiga*, transformasi sektor ekonomi berjalan lambat; *keempat*, perlambatan ekonomi hingga mencapai titik negatif; *kelima*, rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia; serta *keenam*, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

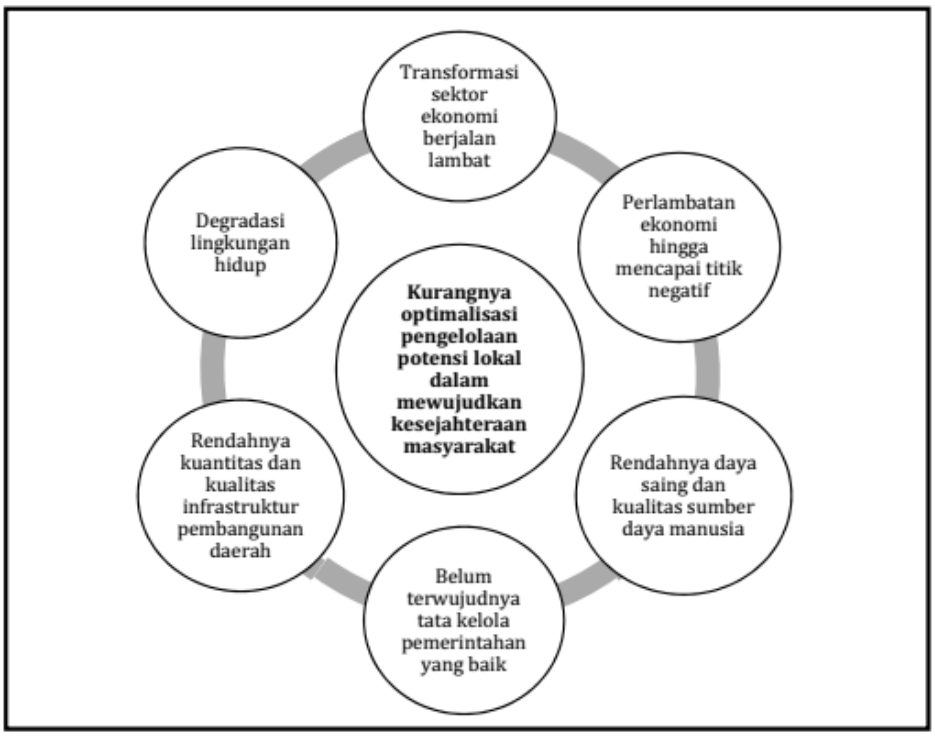

Gambar 14 Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Berau

3.2 Ruang Lingkup dan Tujuan

Assesment dilakukan untuk membangun perspektif bagi konsultan agar lebih terang memahami 22 desa sasaran program Akademi Kampung Sigap. Kegiatan ini difokuskan pada 2 lingkup besar, yaitu tata kelola Pemerintahan Kampung, dan tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang segala aspek kelokalan kampung yang membawa keragaman inovasi dan tahapan dalam tata kelola pemerintahan maupun BUMK. Atas dasar hal tersebut, diperlukan standarisasi pola pendampingan yang aplikatif, sistematis dan berkelanjutan.

3.3 Pendekatan dan Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan adalah *gap analysis*, yaitu pendekatan untuk menganalisa kesenjangan yang ada saat ini dengan target yang ditetapkan berdasarkan indikator kunci dalam aspek kelembagaan dan proses internal, untuk menentukan strategi pendampingan, sehingga model pelatihan dan pendampingan yang dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan dimensi permasalahan yang dihadapi setiap desa/kampung dan BUMK/Kam.

Dengan lain kata analisa gap adalah studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Analisa gap mengidentifikasikan gap (kesenjangan) antara bagaimana operasional yang diperlukan untuk mencapai hal yang dinginkan tetapi belum atau tidak bisa penuhi. Dengan sendirinya alternatif - alternatif akan dikembangkan pada saat gap fungsi ditemukan. Gap diubah sesuai dengan proses, laporan yang diinginkan atau penyesuaian perangkat yang digunakan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam *assessment* ini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Kuantitatif. Analisis Deskriptif, yakni menganalisis terhadap jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden dengan cara penguraian tanpa menggunakan rumus/alat. Analisis Kuantitatif, yakni dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus menurut Fandi Tjiptono (2007;100): Kualitas Pelayanan = Kinerja – Harapan Jika nilai hasil positif (+) maka kualitas pelayanan dalam kriteria baik. Jika nilai hasil negatif (-) dikatakan kualitas pelayanan dalam kriteria buruk.

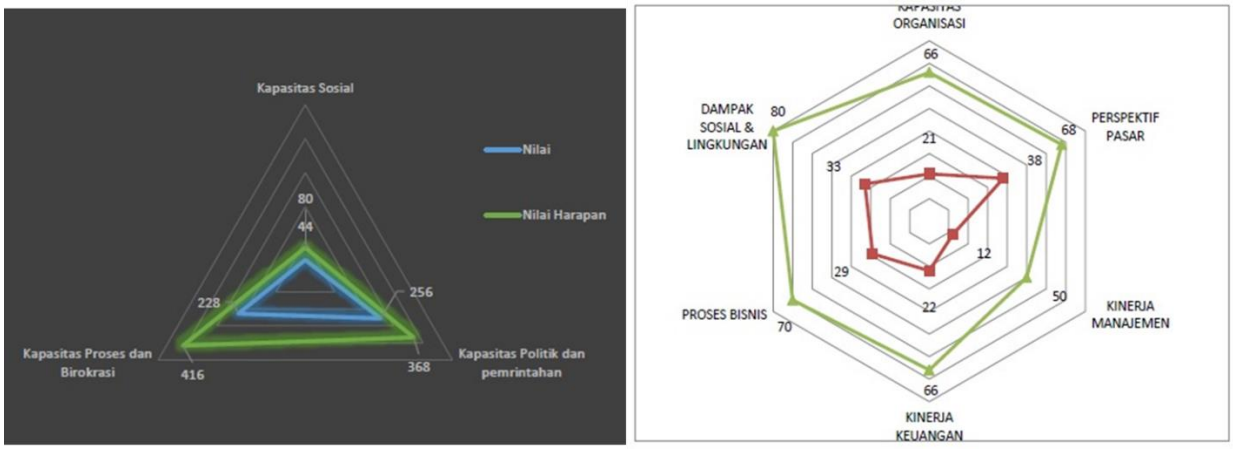

Gambar 15 Contoh Hasil Pengukuran Pemkam & BUMK

3.4 INDIKATOR PENGUKURAN

3.4.1 Tata Kelola Pemerintah Kampung

A. **Kapasitas Sosial**	B. **Kapasitas Proses dan Birokrasi**	C. **Kapasitas Politik dan Kepemimpinan**
A.1. Modal Sosial A.2. Kepercayaan Publik A.3. Partisipasi	B.1. Pola Relasi Pemerintah – Warga B.2. Tata Kelembagaan Kampung B.3. Kultur Birokrasi B.4. Transparansi B.5. Penganggaran B.6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban B.7. Layanan Masyarakat B.8. Sistem Informasi	C.1. Kapasitas Regulasi C.2. Kapasitas Ekstraktif C.3. Kapasitas Distributif C.4. Kapasitas Responsif C.5. Kapasitas Jaringan

Table 3 Indikator Pengukuran Assessment Tata Kelola Pemerintah Kampung

3.4.2 Tata Kelola BUMK

A. **Kapasitas Organisasi**	B. **Perspektif Pasar**	C. **Kinerja Manajemen**
A.1. Legalitas A.2. Ketentuan Dasar Operasional A.3. Perencanaan Organisasi A.4. Struktur Organisasi A.5. Ketentuan Operasional A.6. Pemilihan Jenis Usaha	B.1. Segmentasi Pasar B.2. Strategi Pemasaran B.3. Jaringan Pasar B.4. Strategi Harga B.5. Keunggulan Kompetitif	C.1. Sistem Rekruitmen C.2. Sistem Remunerasi C.3. Komunikasi C.4. Sistem Pengarsipan C.5. Evaluasi Kinerja C.6. Pengorganisasian Pekerjaan
D. **Kinerja Keuangan**	E. **Proses Bisnis**	**F. Dampak Sosial & Lingkungan**
D.1. Omzet D.2. Aspek Pemodalan D.3. Mekanisme Penganggaran D.4. Kontrol Keuangan D.5. Manajemen Keuangan D.6. Pencatatan Keuangan D.7. Pelaporan	E.1. Perencanaan Bisnis E.2. Aset & Infrastruktur E.3. Teknologi & Digitalisasi E.4. Produksi E.5. Kerjasama Sektoral	F.1. Kontribusi Pembangunan Kampung F.2. Pendapatan Rumah Tangga F.3. Mengatasi Masalah F.4. Ketahanan Sosial F.5. Merawat Ekosistem untuk Keberlanjutan Usaha

Table 4 Indikator Pengukuran Assessment Tata Kelola BUMK

3.5 PELAKSANAAN

Seluruh pelaksanaan assessment menggunakan metode FGD melalui online (aplikasi zoom dan Whatsapp). Pelaksanaan *assessment* dilakukan selama 12 hari, yang dimulai dalam rantang 15 - 24 Januari 2021, dilanjutkan pada 3 - 4 Februari 2021 melalui apliksi Zoom, ada satu desa karena terkendala sinyal akhirnya diwawancara menggunakan Panggilan WhatApps. Dalam satu hari pelaksanaan dilakukan *assessment* sebanyak dua desa dan dua BUMK, yang terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama dari jam 10.00 s.d. 13.00 WITA, dan sesi kedua dari jam 14.00 s.d 17 WITA.

No.	Tanggal	Waktu	Room 1	Room 2
1	15 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Sungai Payang	BUMK Sungai Payang
2	15 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Karangan Ilir	BUMK Karangan Ilir
3	16 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Labanan Makmur	BUMK Labanan Makmur
4	16 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Melati Jaya	BUMK Melati Jaya
5	17 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Tanjung Batu	BUMK Tanjung Batu
6	18 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Teluk Harapan	BUMK Teluk Harapan
7	18 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Teluk Semanting	BUMK Teluk Semanting
8	19 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Biantan Lempake	BUMK Biantan Lempake
9	19 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Biantan Bapinang	BUMK Biantan Bapinang
10	20 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Tembudan	BUMK Tembudan
11	20 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Talisayan	BUMK Talisayan
12	21 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Labanan Makarti	BUMK Labanan Makarti
13	21 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Pilanjau	BUMK Pilanjau
14	22 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Campur Sari	BUMK Campur Sari
15	22 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Semurut	BUMK Semurut
16	23 Jan 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Merabu	BUMK Merabu
17	23 Jan 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Muara Lesan	BUMK Tepian Buah
	24 Jan 2021	*Konsinering Temuan Assessment*		
18	3 Feb 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Biduk – Biduk	BUMK Biduk – Biduk
19	4 Feb 2021	10.00 – 13.00 WITA	Pemkam Harapan Jaya	BUMK Harapan Jaya
20	4 Feb 2021	14.00 – 17.00 WITA	Pemkam Maluang	BUMK Maluang

Table 5 Jadwal Pelaksanaan Preliminary Assessment

Selama 12 hari pelaksanaan, terdapat ada 20 kampung dan 20 BUMK yang di wawancara, yang melibatkan sebanyak 100 peserta yang terdiri dari 50 dari pemerintah kampung, dan 56 dari BUMK. *Assessor* yang terlibat sebanyak 2 orang yang masing-masing dibantu oleh 1 asisten yang juga turut memberikan penilaian, dan 1 *host* untuk seluruh pelaksanaan selama total 12 hari.

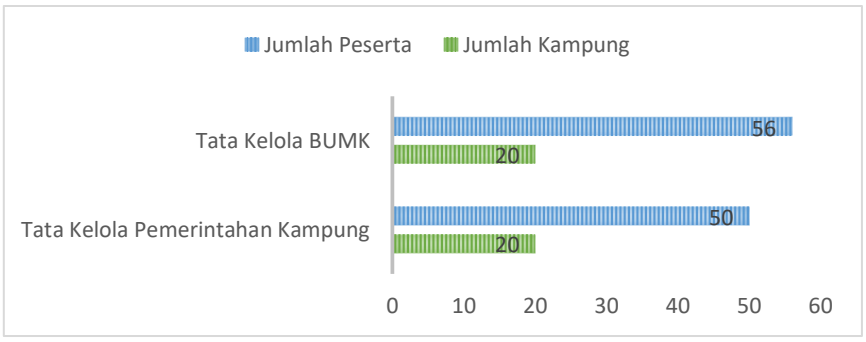

Gambar 16 Cakupan Responden Assessment

3.6 HASIL ASSESSMENT (DESKRIPSI UMUM)

3.6.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Dari hasil *assessment* didapat gambaran menarik tentang posisi 20 kampung yang berhasil dihubungi terkait tiga kapasitas dasar dalam tata pemerintahan kampung. Tiga kapasitas dasar tersebut adalah kapasitas sosial, kapasitas politik dan kepemimpinan, dan kapasitas proses dan birokrasi. Hasil assesment selama 10 hari menunjukkan posisi pemerintahan kampung dalam 4 kuadran: kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Berikut adalah ringkasan posisi masing-masing kampung.

No.	Nama Kampung	Kapasitas Sosial	Kapasitas Politik & Kepemimpinan	Kapasitas Proses & Birokrasi	Total Perolehan	Kategori
1	Kampung Labanan Makmur	57	284	328	669	BAIK
2	Kampung Sungai Payang (Kukar)	50	240	284	574	BAIK
3	Kampung Labanan Makarti	44	262	236	542	BAIK
4	Kampung Merabu	52	248	236	536	BAIK
5	kampung Harapan Jaya	44	256	228	528	BAIK
6	Kampung Campursari	47	220	248	515	BAIK
7	Kampung Pilanjau	48	224	236	508	BAIK
8	Kampung Tanjung Batu	52	196	244	492	BAIK
9	Kampung Tembudan	48	220	210	478	CUKUP
10	Kampung Talisayan	50	192	234	476	CUKUP
11	Kampung Biduk-Biduk	36	202	234	472	CUKUP
12	Kampung Karang Ilir (Kutim)	42	196	222	460	CUKUP
13	Kampung Teluk Semanting	49	204	198	451	CUKUP
14	Kampung Biatan Bapinang	47	202	202	451	CUKUP
15	Kampung Biatan Lempake	48	200	196	444	CUKUP
16	Kampung Teluk Harapan	51	188	178	417	CUKUP
17	Kampung Semurut	64	174	174	412	CUKUP
18	Kampung Maluang	48	182	176	406	CUKUP
19	Kampung Muara Lesan	42	188	164	394	CUKUP
20	Kampung Melati Jaya	30	146	146	322	CUKUP

Table 6 Hasil Assessment Tata Kelola Pemerintahan Kampung

Dilihat dari sisi kapasitas sosial, sebagian besar kampung belum mampu mengembangkan kapasitas sosial yang dimiliki kampung, baik berupa terkait jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keragaman etnis, maupun potensi-potensi sumber daya manusianya. Hanya beberapa kampung yang mampu memanfaatkan kapasitas sosial menjadi penggerak potensi pembangunan kampung. Diantara yang sedikit ini adalah Kampung Labanan Makmur, Kampung Sungai Payang, dan Kampung Merabu.

Dilihat dari aspek kapasitas politik dan kepemimpinan, sebagian besar, kapasitas regulasi yang dimiliki oleh pemerintah desa dan/atau kepala kampung belum muncul inisiatif-inisiatif peraturan kampung untuk mengelola kampung sesuai dengan kondisi, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Sebagian besar peraturan kampung, masih terpaku pada panduan yang dikeluarkan oleh supradesa, untuk mengatur kampungnya masing-masing. Artinya kapasitas regulatif dari pemimpin kampung masih tergolong kurang.

Dilihat dari aspek proses dan birokrasi, hampir seluruh kampung yang di *assessment* belum menunjukkan inovasi pemerintahan kampung. Ketaatan pada prosedur baku masih dominan, yang memungkinkan belum munculnya inovasi pelayanan publik dan tata pemerintahan.

3.6.2 Tata Kelola BUMK

Hasil *assessment* terhadap BUMK menunjukkan temuan yang menarik. Karena BUMK merupakan sebuah entitas usaha, yang daur hidupnya mirip bisnis pada umumnya, 20 BUMK yang berhasil dihubungi kemudian diklasterisasi dalam 3 kategori, yakni : 1.) tahap rintisan menuju tumbuh, 2.) tahap tumbuh menuju berkembang, dan 3.) tahap berkembang menuju maju. Hasil *assessment* terhadap BUMK dapat disimak pada tabel berikut.

No	Nama BUMK	Kampung	Hasil Perolehan	Klasifikasi
1	BUMK Payang Sejahtera	Sungai Payang	304	Berkembang – Maju
2	BUMK Biduk Mandiri	Biduk – Biduk	267	Berkembang – Maju
3	BUMK Bagisunan	Tanjung Batu	261	Tumbuh – Berkembang
4	BUMK Lebok Asik	Merabu	245	Tumbuh – Berkembang
5	BUMK DKI Manis	Karangan Ilir	244	Tumbuh – Berkembang
6	BUMK Surya Jaya Abadi	Labanan Makarti	232	Tumbuh – Berkembang
7	BUMK Rindang Jaya	Tembudan	232	Tumbuh – Berkembang
8	BUMK Makmur Sejahtera	Labanan Makmur	184	Tumbuh – Berkembang
9	BUMK Berkah Padai	Pilanjau	164	Tumbuh – Berkembang
10	BUMK Mandiri Talisayan	Talisayan	160	Tumbuh – Berkembang
11	BUMK Batiwakkal	Maluang	159	Tumbuh – Berkembang
12	BUMK Jaya Lestari	Harapan Jaya	155	Tumbuh – Berkembang
13	BUMK Semurut Berkarya	Semurut	131	Rintisan - Tumbuh
14	BUMK Mandiri Jaya Abadi	Campur Sari	130	Rintisan – Tumbuh
15	BUMK Rumpun Jaya Mandiri	Melati Jaya	127	Rintisan – Tumbuh
16	BUMK Lumba – Lumba	Teluk Harapan	126	Rintisan – Tumbuh
17	BUMK Tiga Tawai	Tepiah Buah	124	Rintisan – Tumbuh
18	BUMK Mangrove	Teluk Semanting	96	Rintisan – Tumbuh
19	BUMK Lempake Mandiri	Biantan Lemapke	73	Rintisan – Tumbuh
20	BUMK Bapinang Sejahtera	Biantan Bapinang	56	Rintisan - Tumbuh

Table 7 Hasil Assessment Tata Kelola BUMK

Secara umum, kapasitas pengelolaan BUMK masih mengalami problem mendasar, yakni kapasitas manajerial. Besarnya potensi dan peluang yang dimiliki belum serta merta memberikan dampak yang luas bagi masyarakat serta sumbangsih signifikan terhadap pendapatan asli kampung. *Mindset enterpreneuship* dan literasi finansial yang masih rendah menjadi tantangan utama mengapa tata kelola BUMK belum berjalan optimal.

3.7 TEMUAN KUNCI

3.7.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung

a. Hampir semua kampung memiliki PAK dibawah 100 juta. Belum terlihat upaya komprehensif untuk meningkatkan PAK melalui pemanfaatan potensi dan peluang di desa.

b. Sebagian besar kampung belum mampu mengembangkan kapasitas sosial yang dimiliki. Baru 3 kampung yang mampu mengkonversi kapasitas sosial menjadi modal sosial.

c. Dilihat dari aspek kapasitas politik dan kepemimpinan, hampir 90% regulasi (Perkam – Perkakam) yang diterbitkan belum muncul dari inisiatif kampung sendiri. Regulasi yang ada umumnya merupakan mandat ataupun turunan dari regulasi teknis supra desa. Kampung belum memiliki kapasitas ekstraktif untuk mengkonversi peluang guna menopang kemandirian kampung.

d. Dilihat dari aspek proses dan birokrasi, hampir seluruh kampung belum menunjukkan inovasi tata pemerintahan kampung. "Ketaatan" pada prosedur baku masih dominan, yang memungkinkan belum munculnya inovasi pelayanan atas barang dan jasa publik.

e. Hampir seluruh kampung belum menerapkan sistem informasi desa terpadu berbasis digital yang dimanfaatkan secara utuh dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk untuk kebutuhan informasi, transparansi, dan akuntabilitas masyarakatnya. Informasi masih konvensional dengan papan dan baliho.

3.7.2 Tata Kelola BUMK

a. Dasar penentuan unit usaha yang dijalankan BUMK terdiri dari 2 sudut perspektif. Pertama mengacu pada potensi yang dimiliki kampung, yang kedua menitik beratkan pada kebutuhan/ peluang pasar yang ada. BUMK yang menterjemahkan usahanya berbasis peluang pasar cenderung memiliki prospek usaha lebih mapan, namun sangat rentan terhadap perubahan.

b. Proses bisnis yang ada saat ini cenderung statis, BUMK belum mampu beradaptasi dengan keadaan pandemi. BUMK belum memiliki strategi pengembangan bisnis (intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi), baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Sebagian besar pengelola BUMK belum memiliki kapasitas perencanaan bisnis memadai, yang terkoneksi antar visi jangka panjang, menengah, hingga rencana kerja eksplisit tahunan.

d. Rata – rata BUMK memiliki kapasitas pengelolaan manajemen yang masih sangat kurang. Struktur insentif yang rendah ditengarai menjadi akar masalah. Pekerjaan sebagai pengelola BUMK umumnya merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini menyebabkan banyak hal strategis terlewat. *Turnover* cukup tinggi, sedangkan *handover* pekerjaan belum berjalan lancar.

e. Sebagian BUMK belum mampu menjadi penopang perekonomian kampung, baik bagi yang bekerja langsung atau terlibat dalam rantai ekonomi BUMK. Sedikit BUMK sudah memberikan *multiplier effect* cukup besar bagi ekosistem perekonomian masyarakat, diantaranya Sungai Payang, Karangan Ilir, Merabu, Talisayan, Tembudan, Tanjung Batu dan Biduk - Biduk.

f. Sumbangsih terhadap PAK masih sangat rendah, mayoritas masih dibawah 3% dari total PAK. Bahkan di kampung Teluk Harapan, Teluk Semanting, Biantan Bapinang, Semurut , BUMK sama sekali belum mampu memberikan sumabangsih PAK, hal ini dikarenakan skala usaha yang masih sangat kecil, serta kemampuan konversi peluang/ potensi menjadi profit yang masih rendah.

g. *Assessor* belum menemukan adanya kerjasama antar desa dalam rangka penguatan ekonomi kawasan. Ini penting untuk meningkatkan skala produksi dan memperkuat akses pasar.

3.8 REKOMENDASI ATAS HASIL *ASSESSMENT*

3.8.1 Tata Kelola Pemerintahan Kampung

a. Perlunya penguatan kapasitas sosial dan politik kepemimpinan desa untuk penguatan tata kelola hidup dan penghidupan masyarakat desa. Untuk mewujudkan itu, kepemimpinan politik desa perlu membagi kewenangan-kewenangan birokrasi pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa disertai dengan penganggarannya sebagai ruang partisipasi warga, sekaligus sebagai *'talent pool'* kepemimpinan desa

b. Perlunya memperkuat reformasi birokrasi pemerintah desa yang tidak hanya melayani kepentingan dirinya sendiri dengan segenap instrumentasi administratif-teknokratis-birokratis yang teramat panjang di level supradesa (kabupaten, provinsi, pemerintah pusat). Harus berbeda dengan birokrasi di level supra desa tersebut, birokrasi pemerintah desa mesti mengedepankan pelayanan barang dan jasa warga desa.

c. Perpaduan dan sinergisitas antara penguatan kapasitas kepemimpinan politik desa dan penguatan reformasi birokrasi pemerintah desa di atas adalah prasyarat bagi lahirnya biokrasi pemerintah desa yang melayani secara jujur, terbuka, dan memiliki integritas dimata publik. Berbagai prasyarat itu merupakan proses pendidikan publik holistik untuk membentuk kultur masyarakat anti korupsi.

d. Perlunya melakukan pemetaan ulang terhadap sumber-sumber daya *(resources mapping)* sekaligus terhadap kerawanan-kerawanan dengan selalu mempertimbangkan dan merelasikan kesalingterkaitan antara aspek-aspek pembangunan (ekonomi), demokrasi (politik), dan stabilitas masing-masing desa.

e. Datakrasi bisa menjadi alat ampuh diterapkan di desa untuk meminimalisir terjadinya perilaku koruptif, serta sebagai pedoman arah strategis kebijakan pembangunan.

3.8.2 Tata Kelola BUMK

a. Perlunya penyesuaian tata kelembagaan lokal ekonomi (BUMK) yang mampu memfasilitasi dan merealisasikan spirit dan gagasan ideal tentang ekonomi berkeadilan. BUMK harus dimaknai sebagai instrumen yang meredistribusikan manfaat bagi 'hajat hidup orang banyak' dan menunjang posisi tawar dalam rantai pasok sekurang - kurangnya di level desa

b. Penguatan peran lintas sektoral. Inisiasi Akademi Kampung Sigap sebagai salah satu model pusat keunggulan inovasi desa telah tersampaikan ke berbagai pihak. Penguatan lintas sektor guna mendukung ekosistem kemandirian kampung ini akan difokuskan pada penguatan peran stakeholder di level provinsi, kabupaten hingga kampung. Formulasi skema – skema strategis juga perlu dilakukan untuk memperkuat kolaborasi, termasuk didalamnya kemungkinan mengelaborasi Akademi Kampung Sigap ke dalam Program Sigap Sejahtera.

c. Perlunya kerjasama ekonomi antar desa dalam sebuah kelembagaan Bumdes Bersama tingkat kabupaten untuk meningkatkan kapasitas produksi, akses jejaring, dan prospektus pasar.

d. Perlu penguatan terhadap analisa kelayakan usaha yang dijalankan BUMK. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang bagaimana prospektus sebuah ide bisnis ditakar. Adanya analisa kelayakan usaha juga dapat dimaknai sebagai "kontrak kinerja" antara pemerintah kampung dan pengelola BUMK.

4 PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN ONLINE : BERSIASAT DI TENGAH PANDEMI

4.1 GAMBARAN UMUM

Pelatihan dan pendampingan Akademi Kampung Sigap ini adalah tindak lanjut dari kegiatan *assessment* yang dilaksanakan pada 15-24 Januari dan 3-4 Februari 2021. Dalam hal ini pelatihan dan pendampingan menyasar 22 kampung terpilih guna untuk membekali transformasi pembangunan kampung dari berbagai aspek, dengan sasarannya adalah tata kelola Pemerintahan Kampung (Pemkam) dan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Secara umum model pelatihan online berjalan baik meski mendapatkan beberapa tantangan. Pada awal pelatihan dan pendampingan, banyak peserta yang terlibat. Namun seperti proses pelatihan pada umumnya, terdapat seleksi alam terkait atensi kelompok sasaran program. Ada yang terlibat secara kontinu, ada yang motivasinya menurun ditengah jalan, ataupun ada pemerintah kampung/ pengelola BUMK yang tidak terlibat sama sekali. Ada beberapa hal yang mendasari hal ini terjadi;

Pertama, keikutsertaan peserta didalam pelatihan online amat bergantung pada kapasitas pemimpin baik Pemkam maupun BUMKam. Pelatihan online yang dimaksudkan untuk meningkatkan berbagai kapasitas yang dimiliki Pemkam dan BUMKam direspon baik oleh kampung yang memiliki *willingness*/ kemauan yang kuat untuk berkembang dengan terlibat aktif dalam proses pelatihan. Hal ini dida sari pada kemauan untuk mau belajar dan menambah skill baru untuk menambah kapasitas baik bagi Pemkam maupun Bumkan. Bagi kampung yang ikut setengah-setengah, ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut terjadi, adanya beban kerja yang sudah cukup menumpuk maupun kesibukan lain diluar urusan pemerintahan/ pengelolaan BUMK membuat beberapa aparutur kampung maupun BUMK tidak telibat didalam pelatihan online

Kedua, jaringan internet dan ketersediaan listrik menjadi salah satu persoalan mendasar. Hal ini dikarenakan banyak desa yang masih dalam keterbatasan infrastruktur penunjang, sehingga dalam pelaksanaanya seringkali peserta harus keluar/ masuk zoom atau bahkan izin berpamitan karena sinyal yang buruk.

Ketiga, yang menarik kampung yang justru antusias dan berinisiatif tinggi dalam mengerjakan penugasan adalah 2 kampung yang berada diluar Berau, yakni Sungai Payang di Kutai Kartanegara dan Karangan Ilir di Kutai Timur. Sementara yang mayoritas peserta Berau justru terlihat tidak terlalu antusias dengan minimnya kehadiran dan kemauan untuk mengerjakan penugasan. Meskipun jumlahnya kecil, namun masih ada ada pula kampung di Kabupaten Berau yang terlibat aktif, mereka biasanya yang memiliki relasi program yang relatif erat dengan YKAN maupun pejuang SIGAP. Disisi lain, kapasitas pejuang Sigap yang mampu memobilisasi keikutsertaan, dan penyampaian pentingnya pelatihan juga sangat berpengaruh dalam proses ini. Mereka mampu membangun kepercayaan kepada pemerintah kampung maupun BUMKam untuk ikut aktif dalam proses pelatihan ini.

Keempat, berdasarkan dari 8 minggu pelatihan yang dilakukan pada hari senin dan kamis, terdapat beberapa desa yang aktif didalam proses pelatihan. Terdapat empat Pemkam yang terlibat aktif didalam proses pelatihan online yakni Kampung Melati Jaya (6 kali), Merabu (5 kali), Karangan Ilir (5 kali) dan Sungai Payang (5 kali). Sedangkan peserta pelatihan BUMK yang terlibat aktif adalah Tanjung Batu (7 kali), Melati Jaya (5 kali), Karangan Ilir (5 kali) dan Labanan Makarti (5 kali).

4.2 Proses Pelatihan dan Pendampingan Online

4.2.1 Skenario

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Akademi Kampung Sigap mencakup ruang lingkup tata kelola pemerintahan kampung dan tata kelola BUMKam. Dalam pelaksanaannya, mentor utama (sekaligus berperan sebagai fasilitator) dan Co-Fasilitator berperan sebagai *intermediary actor* dalam teknis pelatihan dan pendampingan.

Pelatihan dan pendampingan ini merupakan model inisiasi yang dilakukan oleh YSID. Meski terkesan t mudah, akan tetapi nyatanya memerlukan *effort* yang lebih besar ketimbang model pelatihan *offline*. Dikarenakan berbagai kendala teknis yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelatihan dan pendampingan di satu sisi. Di sisi lain, *transfer of knowledge* secara daring ini merupakan hal baru bagi peserta penerima manfaat. Namun secara perlahan mentor utama dan co-fasilitator sesederhana mungkin memberikan penjelasan dan pemahaman disertai dengan contoh kongkrit pengalaman yang sudah dilakukan berbagai desa di Indonesia, terutama dari praktik baik dari Desa Panggungharjo.

Teknis pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini menggunakan dua alat, yakni; secara langsung dengan menggunakan platform video *virtual conference* zoom, serta menggunakan ruang dialektis pasca pelaksanaan *zoom* dengan memanfaatkan aplikasi *WAG* (*Whatsapp Group*), tidak bisa dipungkiri prosesi *transfer of knowledge* secara virtual ini tidak semua peserta langsung memahaminya, oleh karenanya peranan intervensi lanjutan melalui *WAG* sangatlah signifikan dalam rangka pendalaman atas berbagai problem yang dihadapi masing-masing kampung.

4.2.2 Materi Pelatihan

Dalam rangka penguatan ekosistem kemandirian kampung di Kalimantan Timur. Sanggar Inovasi Desa dengan basis manajemen pengetahuan praktik Panggungharjo mencoba menyesuaikan dengan konteks lokal. Berikut merupakan materi pelatihan dan pendampingan Akademi Kampung Sigap:

No	Tata Kelola Pemerintah Kampung	Tata Kelola BUMK
1	Envisioning Mimpi Desa	Filosofi BUMKam/ BUMDes
2	Identifikasi Potensi dan Masalah di Desa #1	Tata Kelola BUMKam/ BUMDes
3	Identifikasi Potensi dan Masalah di Desa #2	Analisa Kondisi Saat Ini dan Analisis Gap
4	Analisis Gap #1	Menemukan Peluang Usaha di Desa #1
5	Analisis Gap #2	Menemukan Peluang Usaha di Desa #2
6	Perencanaan Pembangunan Desa #1	Menemukan Peluang Usaha di Desa #3
7	Perencanaan Pembangunan Desa #2	Inovasi Berkelanjutan #1
8	Inovasi Kemandirian Desa (Kapasitas Sosial)	Inovasi Berkelanjutan #2
9	Inovasi Kemandirian Desa (Kapasitas Politik dan Kepemimpinan)	Kalkulasi Risiko #1
10	Inovasi Kemandirian Desa (Kapasitas Proses dan Birokrasi)	Kalkulasi Risiko #2
11	Peta Kemandirian Desa	Manajemen Rantai Pasok

Table 8 Materi Pelatihan & Pendampingan Online Akademi Kampung Sigap

4.2.3 Mentor Utama dan *Dedicated Mentor*

Demi terselenggaranya pelatihan dan pendampingan yang efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas *(experties)* pembangunan desa. YSID melibatkan beberapa mentor terdiri dari praktisi, akademisi, dan konsultan yang mumpuni dalam pelatihan dan pendampingan. Berikut mentor pendampingan untuk tata kelola pemerintahan kampung dan tata kelola BUMK:

Mentor Utama Tata Kelola Pemerintah Kampung

Nama	Profesi	Instansi
Wahyudi Anggoro Hadi	Lurah Desa	Pemerintah Desa Panggungharjo
Yuli Trisniati	Sekretaris Desa	Pemerintah Desa Panggungharjo
Hosni Bimo Wicaksono	Kasi Pelayanan	Pemerintah Desa Panggungharjo
Rosada Roan Athariq	Kepala Dusun	Pemerintah Desa Panggungharjo
AB Widyanta	Dosen Dept. Sosiologi, Peneliti	Universitas Gadjah Mada
Ilham Yuli Isdianto	Dosen dan Konsultan Hukum	UAD Yogyakarta, Isdiyanto Law Office, Lembaga Mediasi Desa Panggungharjo
Ahmad Musyadad	Praktisi Desa dan Peneliti	UNU Yogyakarta
Ahmad Mizdad Hudani	Direktur Eksekutif, Peneliti Datkrasi Desa	YSID

Mentor Utama Tata Kelola BUMK

Nama	Profesi	Instansi
Eko Pambudi	Mantan Direktur	BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo
Sholahudin Nurazmy	CEO, Direktur	Pasardesa.id, Bumdes Bersama Indonesia
Hasan Bachtiar	Konsultan Pengembangan Organisasi	
Arief Rokhman	Direktur	BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo
Rindy Widya Rasmono	Corporate Secretary	BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo

Koordinator Fasilitator dan *Dedicated Mentor*

Selain mentor utama diatas, kami juga mengalokasikan sumberdaya untuk menjamin kesinambungan proses penyampaian materi maupun dalam proses pendampingan. *Dedicated mentor* memiliki peran vital dalam menjahit proses setiap sesi materi, hingga menjamin struktur kurikulum pelatihan dan pendampingan tidak keluar jalur.

Nama	Peran	Instansi
Any Sundari	Koord. Pendampingan	YSID
Muhammad Zidny Kafa	Dedicated Mentor	YSID
Joko Hadi Purnomo	Dedicated Mentor	YSID

4.3 PELAKSANAAN

4.3.1 Jadwal

Pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP yang dilaksanakan secara daring, telah terjadwalkan secara rutin sejak bulan Maret-Mei 2021, dimana pelaksanaannya terdapat dua kali pertemuan dalam seminggu, yang terbagi menjadi hari senin dan kamis.

Dalam teknis pelaksanaanya, agenda pelatihan dan pendampingan setiap hari senin adalah paparan materi dari mentor utama dengan diberikan lembar kerja sesuai jadwal materinya, sedangkan di hari kamis adalah paparan dan *sharing session* dari peserta berdasarkan isian lembar kerja sesuai dengan materi paparan di hari senin.

Gambar 17 Pelaksanaan Pelatihan & Pendampingan Online

4.3.2 Durasi Waktu Pelaksanaan

Tabel dibawah menggambarkan durasi waktu pelaksanaan pelatihan, data berikut kami himpun dari dokumentasi platform *zoom* yang digunakan sebagai media interaksi.

Pertemuan 1 minggu 1 (1 Maret 2021) - Pemkam : 00:02:00 - 02:21:00 = 2:19:00 - BUMKam : 02:23:00 - 04:50:00 = 2:27:00	**Pertemuan 2 minggu 1 (4 Maret 2021)** - Pemkam : 00:19:00 - 03:45:00 = 3:26:00 - BUMKam : 03:46:00 - 06:54:00 = 3:08:00
Pertemuan 1 minggu 2 (8 Maret 2021) - Pemkam : 00:25:00 - 02:45:00 = 2:20:00 - BUMKam : 04:11:00 - 06:25:00 = 2:14:00	**Pertemuan 2 minggu 2 (11 Maret 2021)** - Pemkam: 00:47:00 - 03:16:00 = 2:29:00 - BUMKam : 03:34:00 - 05:52:00 = 2:18:00
Pertemuan 1 minggu 3 (15 Maret 2021) - Pemkam : 00:20:00 - 03:07:00 = 2:47:00 - BUMKam : 00:19:00 - 03:06:00 = 2:47:00	**Pertemuan 2 minggu 3 (18 Maret 2021)** - Pemkam : 00:01:00 - 02:02:00 = 2:01:00 - BUMKam : 02:18:00 - 04:02:00 = 1:44:00
Pertemuan 1 minggu 4 (22 Maret 2021) - Pemkam : 00:19:00 - 02:30:00 = 2:11:00 - BUMKam : 01:02:00 - 03:42:00 = 2:40:00	**Pertemuan 2 minggu 4 (25 Maret 2021)** - Pemkam : 00:00:00 - 02:09:00 = 2:09:00 - BUMKam : 02:30:00 - 04:32:00 = 2:02:00
Pertemuan 1 minggu 5 (29 Maret 2021) - Pemkam : 00:17:00 - 03:09:00 = 2:52:00 - BUMKam : 00:00:00 - 02:42:00 = 2:42:00	**Pertemuan 2 minggu 5 (1 April 2021)** - Pemkam : 00:01:00 - 02:41:00 = 2:40:00 - BUMKam : 02:44:00 - 04:37:00 = 1:53:00
Pertemuan 1 minggu 6 (5 April 2021) - Pemkam : 00:20:00 - 03:10:00 = 2:52:00 - BUMKam : 00:00:00 - 02:42:00 = 2:42:00	**Pertemuan 2 minggu 6 (8 April 2021)** - Pemkam : 00:01:00 - 02:02:00= 2:01:00 - BUMKam : 00:29:00 - 03:02:00 = 2:33:00
Pertemuan 1 minggu 7 (12 April 2021) - Pemkam : 00:02:00 - 01:58:00 = 1:56:00 - BUMKam : 02:05:00 - 03:25:00 = 1:20:00	**Pertemuan 2 minggu 7 (15 April 2021)** - Pemkam : 00:02:00 - 00:52:00 = 0:50:00 - BUMKam : 01:00:00 - 02:03:00 = 1:03:00

Table 9 Durasi Waktu Pelaksanaan Pelatihan

4.4 PESERTA

4.4.1 Sasaran Peserta

Peserta pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP adalah kampung - kampung di Kalimantan Timur yang terdiri dari 20 kampung yang tersebar di Kabupaten Berau, 1 kampung di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 1 kampung di Kabupaten Kutai Timur. Dengan sasaran spesiifik Pemerintah Kampung terdiri dari; Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, serta Ketua BPK. Sedangkan unsur BUMK adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Berikut daftar penerima manfaat pelatihan dan pendampingan akademi kampung Sigap:

NO	Pemerintah Kampung	BUMK
1	Pemerintah Kampung Biatan Lempake	Pengelola BUMK Biatan Lempake
2	Pemerintah Kampung Biantan Bapinang	Pengelola BUMK Biantan Bapinang
3	Pemerintah Kampung Tanjung Batu	Pengelola BUMK Tanjung Batu
4	Pemerintah Kampung Teluk Harapan	Pengelola BUMK Teluk Harapan
5	Pemerintah Kampung Karangan Ilir	Pengelola BUMK Karangan Ilir
6	Pemerintah Kampung Sungai Payang	Pengelola BUMK Sungai Payang
7	Pemerintah Kampung Labanan Makmur	Pengelola BUMK Labanan Makmur
8	Pemerintah Kampung Labanan Makarti	Pengelola BUMK Labanan Makarti
9	Pemerintah Kampung Tanjung Batu	Pengelola BUMK Tanjung Batu
10	Pemerintah Kampung Melati Jaya	Pengelola BUMK Melati Jaya
11	Pemerintah Kampung Tembudan	Pengelola BUMK Tembudan
12	Pemerintah Kampung Talisayan	Pengelola BUMK Talisayan
13	Pemerintah Kampung Campur Sari	Pengelola BUMK Campur Sari
14	Pemerintah Kampung Pilanjau	Pengelola BUMK Pilanjau
15	Pemerintah Kampung Teluk Semanting	Pengelola BUMK Teluk Semanting
16	Pemerintah Kampung Teluk Sumbang	Pengelola BUMK Teluk Sumbang
17	Pemerintah Kampung Semurut	Pengelola BUMK Semurut
18	Pemerintah Kampung Merabu	Pengelola BUMK Merabu
19	Pemerintah Kampung Muara Lesan	Pengelola BUMK Muara Lesan
20	Pemerintah Kampung Maluang	Pengelola BUMK Maluang
21	Pemerintah Kampung Harapan Jaya	Pengelola BUMK Harapan Jaya
22	Pemerintah Kampung Biduk – Biduk	Pengelola BUMK Biduk – Biduk

Table 10 Sasaran Peserta Akademi Kampung Sigap

4.4.2 Atensi/ Kehadiran Peserta

Grafik yang kami sajikan berikut menggambarkan fluktuasi kehadiran peserta (baik Pemkam maupun BUMK) selama 14 sesi pelatihan *online.*

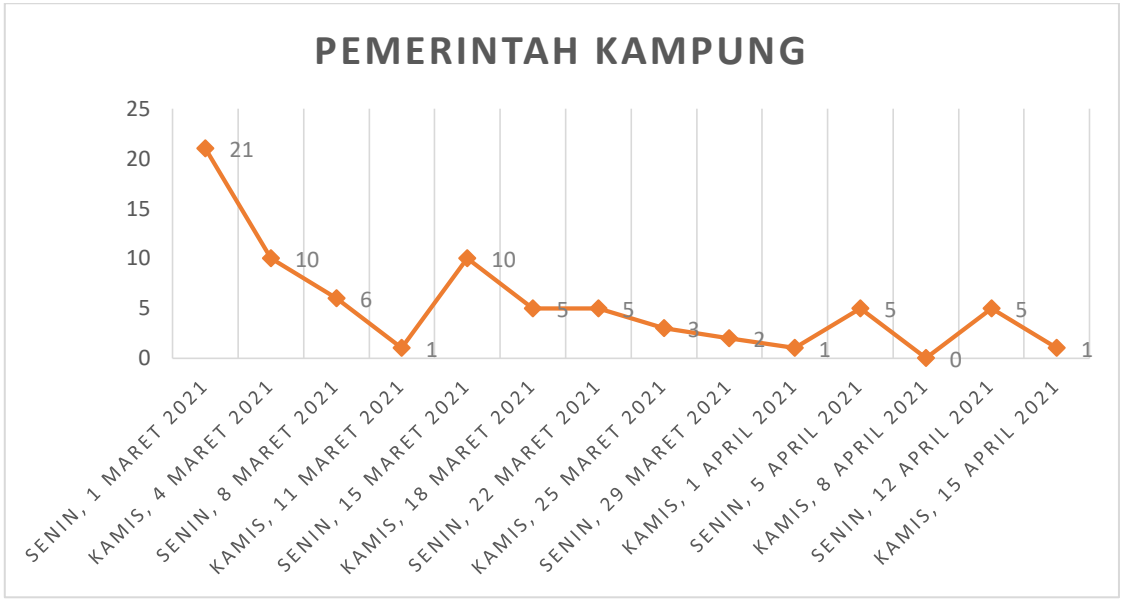

Gambar 18 Fluktuasi Kehadiran Peserta Pemerintah Kampung

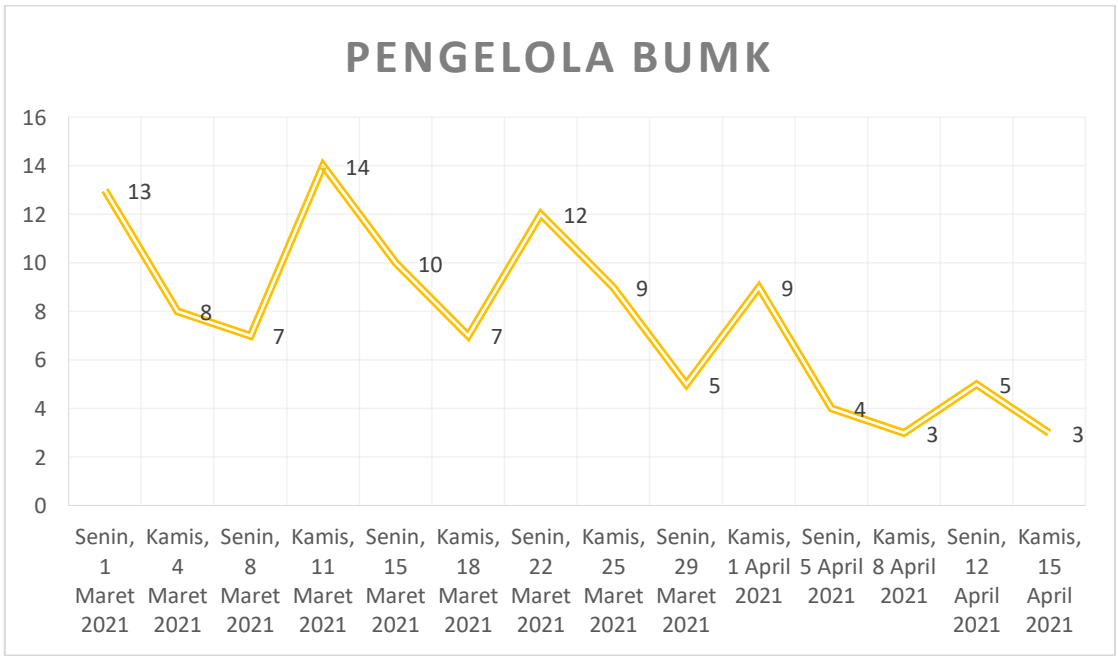

Gambar 19 Fluktuasi Kehadiran Peserta Pemerintah Kampung

4.4.3 Jumlah Peserta Menyelesaikan Penugasan

Pemerintah Kampung		
Lembar Kerja	Tugas Terkumpul	Kampung/ Desa
SMART	**11**	1. Muara Lesan 2. Campursari 3. Maluang 4. Pilanjau 5. Biatan Bapinang 6. Tembudan 7. Karangan Ilir 8. Sungai Payang 9. Merabu 10. Muara Lesan 11. Teluk Semanting
Pemetaan Bentang	**6**	1. Melati Jaya 2. Karangan Ilir 3. Maluang 4. Tanjung Batu 5. Sungai Payang 6. Tembudan
SWOT	**5**	1. Tanjung Batu 2. Karangan Ilir 3. Maluang 4. Merabu 5. Sungai Payang
Badan Usaha Milik Kampung		
Lembar Kerja	Tugas Terkumpul	Kampung/ Desa
Sinergitas (BUMK, BPK, Pemkam)	**8**	1. Labanan Makmur 2. Tanjung Batu 3. Karangan Ilir 4. Campursari 5. Merabu 6. Teluk Semanting 7. Pilanjau 8. Melati jaya
SWOT	**3**	1. Labanan Makmur 2. Labanan Makarti 3. Karangan Ilir
Pemilihan Jenis Usaha	**6**	1. Labanan Makmur 2. Karangan Ilir 3. Melati Jaya 4. Labanan Makarti 5. Merabu 6. Tanjung Batu
Lembar Pengisian Inovasi Kreatif	**2**	1. Labanan Makarti 2. Karangan Ilir

Table 11 Atensi Penugasan Peserta Latih

4.5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.5.1 Kesimpulan

1. Melihat sulitnya akses jaringan internet dan kendala tatap muka online yang kerap kali memberi jarak, maka model tatap muka online harus diberikan pula pendampingan dalam bentuk offline/tatap muka. Proses tatap muka ini untuk mengkonfirmasi temuan-temuan yang terjadi didalam pertemuan online. Disisi lain pertemuan offline ini untuk menjembatani beberapa komunikasi yang kurang tersampaikan didalam proses pertemuan online.

2. Proses ini juga menjadi penanda bahwa bangunan relasi pejuang SIGAP dengan pemkam maupun BUMKAM berpengaruh siginifikan pada kehadiran peserta pelatihan Pemkam maupun BUMKAM. Bagi Pemkam dan BUMKam yang didampingi oleh pejuang SIGAP yang relasinya cukup dekat, Pemkam maupun BUMKAM akan mudah untuk memhami manfaat dari proses pelatihan ini.

3. Bagi kampung-kampung yang belum didampingi SIGAP ada temuan menarik bahwa mereka terlibat aktif karena kapasitas kepemimpinan yang baik. Proses ini mengandaikan bahwa kepala kampung menjadi aktor kunci dalam keaktifan aparatur kampungnya maupun BUMK. Kampung Sungai Payang misalnya kepala kampungnya menjadi motor penggerak utama dalam memacu seluruh unsur pemerintah desa dan BUMK untuk terus belajar dan memperlebar jejaring. Disisi lain di Karangan Ilir, staf kampung yang usianya kebanyakan relatif muda juga terlibat aktif didalam pelatihan ini.

4. Sehingga dapat dilihat bahwa pertemuan online akan lebih ramah bagi desa yang memiliki kapasitas kepemimpinan kepala kampung yang baik sekaligus ditopang oleh staf atau BUMK yang masih muda karena mereka lebih ramah terhadap teknologi.Disisi lain proses ini akan lebih mudah dilakukan jika pejuang SIGAP memiliki relasi yang kuat dengan Pemkam dan BUMKam sehingga mereka teryakinkan untuk terlibat aktif didalam pelatihan

5. Pada sisi pelatihan pemerintah kampung, masih minimnya kapasitas kepemimpinan kepala desa berpengaruh besar pada penguatan kapasitas sosial dan kapasitas pemerintahan dan birokrasi. Kemandirian desa masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Maka diperlukan membuat ekosistem membentuk pemimpin-pemimpin desa maupun calon-calon pemimpin desa agar stok kepemimpinan yang mumpuni dapat muncul dari akademi kampung SIGAP.

6. Pengembangan BUMK sendiri masih mengalami sejumlah tantangan, terutama didalam pemahaman filosofi atas BUMK oleh internal BUMK sendiri maupun dari pemkam. Persoalan BUMK masih terletak pada tata kelola kelembagaan yang masih belum baik dan teratur. Untuk melangkah kepada pemilihan jenis usaha, beberapa BUMK berhasil memberikan perkembangan dengan menghasilkan PAK yang jumlahnya lumayan namun beberapa yang lain masih sibuk dengan pergantian/rotasi pengurus yang disebabkan oleh konflik maupun minimnya akuntabilitas dan transparansi. Maka diperlukan sebuah terobosan dan inovasi untuk membuat ekosistem BUMDes yang sehat dengan melakukan model pendampingan/coaching yang intensif sesuai dengan kebutuhan BUMK.

7. Minimnya inisiatif dan keterlibatan dari pemkam/BUMKAM erat kaitannya dengan model pengaturan birokrasi ditingkat supra desa. Ini terlihat dari fakta bahwa model-model pengaturan birokrasi/birokratisasi yang rigid ditingkatan atas jutsru membuat desa-desa kurang berinisiatif untuk bergerak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa inisiatif dan antusias

justru terlihat dari desa-desa diluar Berau. Hal ini terkait dengan pengaturan kewenangan ditingkat supradesa yang justru membatasi/mengurangi ruang gerak inisiatif ditingkatan desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun di BUMKam.

4.5.2 Rekomendasi

1. Perlunya mendorong kelembagaan kerjasama antar BUMKam di tingkat Kabupaten dalam wadah Bumdes Bersama. Hal ini penting untuk memperkuat proses saling belajar, kerjasama dan interkonektivitas pasar. Sekaligus mempermudah ruang kolaborasi dengan pihak diluar BUMKam.
2. Penggunaan Sistem Informasi Desa terpadu sebagai dashboard transparansi dan akuntabilitas, profil dan analisis kebutuhan pembagunan kampung, pelayanan satu pintu, hingga berita dan gerai produk kampung. Hal ini penting untuk membangun perspektif arah strategis kebijakan pembangunan kampung.
3. Untuk menjamin berjalannya Sistem Informasi Desa *(software)*, perlu diinisiasi lembaga pengelola data dan informasi kampung *(organoware)*, manajemen data hingga kapasitas analisis dan interpretasi data *(humanware)*, serta serangkaian rekayasa untuk menjamin peran aktif masyarakat *(socialware).*

5 EVALUASI DAN KONSULTASI TATAP MUKA : MENYAMBANGI 21 KEPALA KAMPUNG & 1 KEPALA DAERAH

5.1 GAMBARAN UMUM

Setelah memotret potensi, peluang, tantangan dan hambatan berdasarkan konteks lokal di masing – masing kampung, menjadi dasar bagi kami untuk membangun perspektif awal tentang bagaimana perubahan dapat dimulai. Proses pendampingan online diletakkan untuk membangun kesadaran bagi peserta sebagai pondasi awal melakukan perbaikan, serta saluran penguatan kapasitas dasar menuju perubahan.

Mencapai perubahan bukanlah hal yang mudah, tantangan - tantangan yang terjadi pada saat pendampingan *online* yang menyebabkan kurang maksimalnya penyampaian materi menjadikan proses evaluasi dan konsultasi tatap muka menjadi hal yang penting. Proses ini dimaksudkan untuk membangun perspektif bersama antar *stakeholder* di tingkat desa maupun kabupaten tentang isu kunci perubahan, arah strategis bagaimana perubahan dapat dicapai, dan beberapa simulasi teknis untuk memulai sebagian kecil perubahan.

Evaluasi dan konsultasi tatap muka terdiri dari konsultasi tatap muka di 21 kampung dan paparan akhir program. *Benchmark* yang dipakai dalam proses ini adalah upaya – upaya mendorong perubahan didasarkan pada 4 aspek perbaikan seperti yang terangkum dalam ilustrasi berikut.

Gambar 20 Peta Perubahan - Perbaikan Strategis

Ide - ide perubahan strategis yang diformulasikan, akan menyasar 4 dimensi utama perbaikan, yakni: 1.) Perbaikan Infrastruktur Politik, 2.) Perbaikan Infrastruktur Ekonomi, 3.) Perbaikan Infrastruktur Sosial, 4.) Perbaikan Infrastruktur Teknologi.

Pertama, penguatan tata kelola BUMK melalui pendekatan *enterpreneurship* dan *financial literacy.* Berdasarkan pada temuan hasil *assessment* dan selama proses pendampingan, pangkal persoalan dari tata kelola BUMK terletak pada perencanaan usaha yang kurang matang, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja BUMK yang belum sistematis. Maka intervensi yang dilakukan lebih banyak pada analisis kelayakan usaha.

Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan didasarkan pada penguatan 5 kapasitas dasar politik dan pemerintahan bagi kepala kampung, dan penguatan kapasitas proses dan birokrasi bagi aparatur kampung. Selain itu, ditekankan pula tentang kewenagan – kewenangan kampung yang jumlahnya mencapai 120 kewenangan yang terbagi dalam 5 bidang urusan. Diharapkan tema ini akan memunculkan inovasi – inovasi dari dalam kampung, maupun skema – skema dukungan (regulasi, fasilitasi) dari pihak diluar kampung.

Ketiga, mendorong partisipasi melalui skema – skema inovasi yang telah dilakukan pemerintah kampung. Selain pemanfaatan atas ruang – ruang partisipasi yang disediakan, maka selanjutnya penting untuk menjamin kualitas partisipasi tersebut.

Keempat, data didorong untuk menjadi basis perencanaan, oleh sebab itu salah satu hal yang ingin diperoleh adalah komitmen terbangunnya sistem informasi desa beserta sistem database yang saling terkoneksi dan ter*update* secara *realtime*. Sedangkan saintifikasi didorong untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman dan praktik inovasi pembangunan kampung sebagai produk pengetahuan.

5.2 KONSULTASI TATAP MUKA

5.2.1 Jadwal

Konsultasi tatap muka di 21 kampung dilaksanakan dalam 2 gelombang; gelombang pertama dilaksanakan pada 22 April – 4 Mei 2021 dengan menyasar 8 kampung di Kabupaten Berau, sedangkan gelombang kedua dilaksanakan pada 20 Mei – 9 Juni 2021 dengan menyasar 12 kampung di Kabupaten Berau, 1 kampung di Kabupaten Kutai Kartanegara.

	No	Kampung	Kecamatan	Tanggal	Fasilitator 1	Fasilitator 2
Fase 1	1	Tepian Buah	Segah	22 - 23 April 2021	Aditya Mahendra P	Any Sundari
	2	Harapan Jaya	Segah	22 - 23 April 2021	Ahmad Musyaddad	Baitsul Amri
	3	Melati Jaya	Gunung Tabur	24 - 25 April 2021	Ahmad Musyaddad	Baitsul Amri
	4	Labanan Makarti	Teluk Bayur	26 - 27 April 2021	Aditya Mahendra P	Baitsul Amri
	5	Labanan Makmur	Teluk Bayur	26 - 27 April 2021	Ahmad Musyaddad	Any Sundari
	6	Merabu	Kelay	28 - 29 April 2021	Any Sundari	Baitsul Amri
	7	Muara Lesan	Kelay	28 - 29 April 2021	Ahmad Musyaddad	Aditya Mahendra P
	8	Teluk Semanting	Pulau Derawan	3 - 4 Mei 2021	Aditya Mahendra P	Any Sundari
Fase 2	9	Teluk Sumbang	Biduk - Biduk	21 - 22 Mei 2021	Ahmad Musyaddad	
	10	Biduk - Biduk	Biduk - Biduk	21 - 22 Mei 2021	Aditya Mahendra P	Ryan Sugiarto
	11	Tembudan	Batu Putih	24 - 25 Mei 2021	Aditya Mahendra P	Ryan Sugiarto
	12	Talisayan	Talisayan	26 - 27 Mei 2021	Ahmad Musyaddad	Aditya Mahendra P
	13	Campur Sari	Talisayan	26 - 27 Mei 2021	Ryan Sugiarto	
	14	Biatan Bapinang	Biatan	28 - 29 Mei 2021	Aditya Mahendra P	
	15	Biatan Lempake	Biatan	28 - 29 Mei 2021	Ahmad Musyaddad	Ryan Sugiarto
	16	Semurut	Tabalar	31 Mei - 1 Juni 2021	Aditya Mahendra P	Ryan Sugiarto
	17	Pilanjau	Sambaliung	31 Mei - 1 Juni 2021	Ahmad Musyaddad	
	18	Tanjung Batu	Pulau Derawan	2 - 3 Juni 2021	Ahmad Musyaddad	Ryan Sugiarto
	19	Teluk Harapan	Maratua	3 - 4 Juni 2021	Aditya Mahendra P	
	20	Maluang	Gunung Tabur	4 - 5 Juni 2021	Ahmad Musyaddad	Ryan Sugiarto
	21	Sungai Payang	Loa Kulu (Kukar)	8 - 9 Juni 2021	Aditya Mahendra P	Ryan Sugiarto

Gambar 21 Jadwal Evaluasi & Konsultasi Tatap Muka

5.2.2 Catatan Proses

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kendala penyampaian materi saat proses pendampingan online, sekaligus membuka *mindset,* mendefinisikan bersama atas isu kunci perubahan di setiap kampung, hingga model penyelesaian atas isu kunci perubahan yang dipetakan. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Kampung (Ka.Kamp, Sek. Kamp, Ka.Ur Perencanaan), Pengelola BUMK (Ketua, Sekretaris, Bendahara), Ketua BPK dan Pejuang Sigap Sejahtera di setiap kampung.

Secara umum, hasil temuan – temuan saat proses *assessment* terkonfirmasi pada saat proses ini. Identifikasi atas kondisi saat ini yang telah dipetakan selama proses *assessment* coba dikawinkan dengan proses *envisioning* saat pelatihan dan pendampingan online, selanjutnya arah strategis perubahan diformulasikan dalam kegiatan ini.

Arti penting prinsip kontekstualitas ini untuk benar-benar menggali pengetahuan lokal, kearifan lokal dan menggali praktik-praktik baik dari kearifan lokal, agar kampung merasa memiliki, bukan hanya untuk memperoleh pendampingan tetapi mampu kreatif, inovatif, dan berkembang.

Jam		Materi	Pokok Bahasan
Hari 1	09.00 - 09.30	Pembukaan, Sambutan Kepala Desa	
	09.30 - 10.00	Overview Program	Pengenalan Akademi Kampung Sigap
	10.00 - 10.30	Desa Lama vs Desa Baru	Bagaimana pengalaman arah kebijakan pembangunan desa sebelum dan setelah
	10.30 - 12.00	*Benchmarking* Pengalaman Panggungharjo	Bagaimana Panggungharjo Membangun Kemandiriannya?
	12.00 - 13.00	*Ishoma*	
	13.00 - 14.00	Envisioning Kampung	Bagaimana membayangkan kampung ideal? Kebutuhan mencapai bayangan ideal?
	14.00 - 15.00	Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kampung	Apa isu paling prioritas? Apa saja langkah strategis yang dapat diambil? Siapa saja pihak yang dapat dilibatkan?
	15.00 - 15.30	Wrap Up Materi Hari 1 , Rencana	
Hari 2	09.00 - 09.30	*Benchmarking* (Pengalaman desa lain)	Bagaimana pengalaman desa lain dengan isu yang mirip dengan desa sasaran? Apa yang bisa diadopsi, diadaptasi?
	09.30 - 10.00	Pengantar Workshop Tematik	Metode dan strategi penyelesaian atas isu prioritas pembangunan kampung
	10.00 - 12.00	Workshop Tematik *(prototyping)*	Bagaimana isu strategis itu akan dikerjakan? Bagaimana mekanismenya?
	12.00 - 13.00	*Ishoma*	
	13.00 - 15.00	Workshop Tematik *(prototyping)*	Bagaimana cara penyelesaiannya? Siapa mengerjakan apa, kapan?
	15.00 - 15.15	Pilar Kemandirian Desa - Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa	Penjabaran 3 Pilar Kemandirian Desa
	15.15 - 15.30	Wrap Up Materi, Penutup	

Gambar 22 Rundown Roadshow di Setiap Kampung

Benchmark pengalaman kampung lain yang disajikan guna mendekatkan wacana perubahan agar tidak berjarak dari realitas keseharian dalam kehidupan berdesa. Hal ini juga dimaksudkan dalam rangka membuka sekat inferioritas atau "ketidak mampuan" kampung untuk melakukan inovasi. Basis pengalaman yang didokumentasikan dari praktik panjang Desa Panggungharjo, ditularkan ke kampung - kampung sasaran program dengan pendekatan yang ATM (amati, tiru, modifikasi).

5.3 CERITA *ROADSHOW* 21 KAMPUNG

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsultasi tatap muka dilakukan dengan skema *roadshow* di 21 kampung. Ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan keterlibatan para *stakeholder* di setiap kampung, serta proses belanja ide dan gagasan, memetakan segala sumber daya yang ada, proses umpan balik, hingga terformulasinya rencana strategis yang akan dijalankan secara sinergis antar pihak di kampung.

Secara umum, kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan atensi positif dari kampung – kampung sasaran program. Walaupun di banyak kasus, *stakeholder* kunci (kepala kampung, aparatur kampung, BPK, BUMK) di beberapa kampung masih belum terlibat seluruhnya, namun hal ini tidak terlalu berpengaruh dalam proses penyampaian materi dan konsultasi tatap muka.

Hipotesisnya, Semakin banyak pihak yang terpapar tentang urgensi membangun kemandirian kampung serta peta strategisnya, semakin besar pula kemungkinan pihak yang akan terlibat. Dengan demikian, ide membangun kemandirian kampung dapat diakselerasi dengan mengkatalisasi segala sumber daya yang ada di kampung. Kegiatan ini memberikan kerangka logis dalam merencanakan, mengelola dan memantau arah pembangunan kampung yang inovatif dan inklusif.

Gambar 23 Suasana Evaluasi dan Konsultasi Tatap Muka di Kampung

Proses ini juga identifikasi awal terbentuknya *"sister village"* Panggungharjo, yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang kuat dalam hal membangun kemandirian desa. Berikut kami sajikan ringkasan proses konsultasi tatap muka di setiap kampung.

5.3.1 Tepian Buah

Waktu : 22 - 23 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Tepian Buah

Fasilitator : Aditya Mahendra Putra
Any Sundari

5.3.1.1 Isu Kunci Perubahan

Hal pertama yang dapat dipotret adalah Desa Tepian Buah merupakan desa yang cukup potensial dari segi sumber daya alam. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Tepian Buah adalah air terjun Tembalang. Selain itu ada wisata gua di Gunung Minanjao yang diatasnya terdapat sumber air bersih. Sumber air bersih ini berpotensi juga sebagai sumber air minum bagi warga dan juga perusahaan. Perlu diketahui warga di Tepian Buah mayoritas bekerja di kebun mandiri dengan penghasilan 12 juta/ bulan.

Kedua, Pemdes Desa Tepian Buah telah melakukan program PTKH di KHLK dimana terdapat potensi 1200 hektar lahan sawit yang diolah oleh sekitar 456 petani. Hasil dari perkebunan lahan sawit ini dikirimkan kepada Koperasi Bukit Karya. Ada peluang potensi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh BUMKAM yakni dengan menyediakan transportasi yang mengangkut buah sawit dengan menggunakan truk yang nantinya dikelola BUMK. Disisi lain BUMK juga kedepan diharapkan untuk bisa bernegosiasi untuk membuat jalan di dalam wilayah perusahaan.

Ketiga, potensi yang lain adalah pasar kampung sangat lumayan potensi retribusinya.

Keempat air terjun Tembalang, tahun 2015 KLHK dan dinas kehutanan (APH berau Barat), air terjun sudah dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan produktif. Kapasitas kemampuan dari air terjun ini disurvey patriot negeri untuk analisis kualitas airnya sehingga airnya bisa didistribusikan dengan cara pipanisasi air bersih dan uji klinis air. Air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan perusahaan bisa dilakukan.

Kelima, potensi yang dimiliki oleh kampung ini mengalami kendala besar pada proses birokrasi pelaporan pertanggungjawaban BUMK. Ada persoalan terkait transparansi/ tata kelola terkait pengeluaran dan pemasukan, termasuk penyertaan modal dan kapasitas organisasi bagi pengurus BUMK. Ini berkaitan erat dengan patronase yang muncul di Pemkam dan BUMK secara bersamaan.

Keenam, akibat yang ditimbulkan dari tidak transparannya pengelolaan BUMK, Pemkam dan BUMK mengalami defisit kepercayaan dari masyarakat yang ada di kampung.

5.3.1.2 Prioritas Program Strategis

Dari proses penggalian isu-isu kunci perubahan, fasilitator bersama peserta kemudian bersama-sama menentukan prioritas program strategis yang bisa dilakukan.

1. Perlunya mencari cara untuk meningkatkan kualitas kepercayaan public mengingat terdapat persoalan akuntabilitas antara BUMK dan Pemkam
2. Perlu mencari inovasi-inovasi untuk mendorong upaya akuntablitas BUMK mengingat persoalan ini sangat sensitif di masyarakat. Cara - cara yang dilakukan harus dikalkulasi cermat mengingat proses mendorong akuntabilitas rentan menimbulkan konflik sosial masyarakat.

5.3.1.3 Penyepakatan Penyelesaian

Agenda hari kedua konsultasi adalah pendetilan dari persoalan hari pertama yakni bagaimana mendorong kepercayaan publik dan bagaimana mendorong akuntabilitas BUMK.

1. Dari proses diskusi diketahui bahwa proses membangun sistem transparansi mendapatkan kendala dari sistem kultural masyarakat akibat patronase didalam BUMK dan Pemkam.
2. Ada peluang adanya regenerasi BUMK, maka proses regenerasi ini harus direspon dengan membangun sistem rekrutmen BUMK/ tata aturan yang lebih baik. Pada periode kedepan akan didorong pengurus BUMK yang berasal dari golongan anak muda dan paham IT.

3. Cara yang ditawarkan oleh YSID untuk mendorong inovasi BUMK menjadi lebih baik dan transparan adalah *pertama*, membangun kelembagaan dengan melakukan evaluasi proses bisnis internal, restrukturisasi kelembagaan dan inventarisasi aset.
   Kedua, membangun SDM dengan managemen talenta pemuda desa sebagai agen perubahan. Caranya dengan membangun ekosistem pemuda melalui proses *boot camp* dengan penguatan *support system*/ sumber daya yang memadai.
   Ketiga, membangun sistem/ *software*. Sistem/ *software* ini tidak terbatas berupa sistem IT tapi bisa mengoptimalkan *socialware* (sistem adat/ kultural), dengan cara kerja konfederasi.
4. Intervensi yang bisa digunakan Pemkam dalam membangun *support system* pemuda desa tersebut berupa, proses fasiltasi, regulasi, kampanye dan anggaran, informasi berupa pembangunan *mindset* kepemimpinan transformatif melalui organisasi kepemudaan berbasis agama di kampung.
5. Model pembelajaran yang bisa dibangun adalah *management skills* dibidang ekonomi dan pendidikan, sebagai contoh pelatihan produksi pupuk dari residu kelapa sawit melalui dana CSR yang diperoleh kampung.

5.3.2 Harapan Jaya

Waktu : 22 - 23 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Harapan Jaya

Fasilitator : Ahmad Musyaddad
Baitsul Amri

5.3.2.1 Isu Kunci Perubahan

Harapan Jaya berada dalam lintasan kawasan perkebunan sawit. Seiring waktu, sawit kini juga menjadi komoditas usaha warga, mengikuti insiatif sebagian warga pernah menjadi pekerja perkebunan sawit di Malaysia. Akses ke perusahaan yang menampung hasil warga juga tersedia di kampung sebelah.

Pada era kepemimpinan saat ini, eksistensi pemerintah kampung mulai terlihat, setidaknya lewat pembangunan fisik kompleks kantor pemerintahan dan rutinitas penyelenggaraan pelayanan. Pengisian perangkat kampung berbasis seleksi sudah dilakukan, umumnya diisi SDM baru dan peran perempuan lebih terlihat.

Seperti lainnya, pelayanan administrasi masih menjadi porsi utama pekerjaan pemerintah kampung. Isu lain sebenarnya terambah, namun "tuntutan" kerja administratif masih banyak menyita waktu. Ini periode transisi karena banyak SDM baru dalam formasi perangkat kampung.

Hambatan juga terlihat pada belum ditemukannya strategi kreatif penyelenggaraan pemerintahan yang efektif menyiasati keterbatasan SDM. Kebutuhan terhadap penyediaan sistem informasi yang dapat membantu penyederhanaaan proses pelayanan administratif warga misalnya, sudah dibayangkan, namun belum ditemukan solusi teknis penyediaannya. Hal yang sama berlaku dalam kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan data kampung agar dapat dikonversi sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Eksistensi kampung dalam aktivitas pembangunan saat ini justru terlihat dari distribusi sebagian kewenangan dan anggaran pembangunan kepada RT. Kebijakan alokasi ini diatur dalam regulasi kabupaten. Tentu ada sisi lebih dan kurangnya dari kebijakan ini, namun paling tidak, alokasi anggaran memungkinkan warga menetapkan prioritas dan memenuhi kebutuhan kolektif lingkungan setempat.

BUMK Harapan Jaya masih belum operasional. Fase saat ini masih mengidentifikasi dan menjajaki berbagai ide bisnis yang layak diusahakan. Di antaranya pengelolaan pasar kampung, rencana membuat toko bahan bangunan, dan lainnya. Pada pasar kampung, target saat ini masih bersifat penguatan layanan agar aktivitas ekonomi di pasar bisa berlangsung harian (saat ini baru 3 hari aktif dalam seminggu).

5.3.2.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa hal penting:

1. Identifikasi alternatif strategi memperkuat dan mengembangkan pelayanan publik di kampung dengan meletakkan lembaga kemasyarakatan, dan peluang mengembangkan lembaga kampung, sebagai mitra Pemkam.
2. Kebutuhan membangun sistem informasi kampung, setidaknya yang dapat membantu menyederhanakan sistem pelayanan adminsitrasi sehingga tidak lagi manual.
3. Memperkaya ide bisnis dan menyiapkan kapasitas BUMK agar dapat memilih jenis unit usaha yang layak, manajemen bisnis, dan akuntabilitas sebagai badan usaha.

5.3.2.3 Penyepakatan Penyelesaian

Pembahasan terhadap kebutuhan yang bisa menjawab kebutuhan strategis di atas, dijembatani melalui proses fasilitasi diskusi dan saling berbagi pengalaman yang menghasilkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Membangun dan mengaplikasikan penggunaan sistem informasi kampung yang membantu atau menyederhanakan sistem pelayanan adminsitrasi warga, menjaring masukan warga, dan ruang komunikasi kebijakan Pemkam.
2. Mengembangkan peran dari lembaga kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung sebagai mitra Pemkam dalam menyelenggarakan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Membangun tahapan capaian dari upaya menggerakkan/ meramaikan aktivitas perekonomian pasar kampung sehingga selanjutnya memungkinkan dikelola sebagai salah satu unit usaha BUMK.
4. Penggunaan standar pengajuan usulan unit usaha BUMK yang bersandar pada kajian kelayakan usaha dan menyiapkan sistem akuntabilitas BUMK. Dalam hal legal formal, BUMK harus disesuaikan dengan ketentuan PP 11/2021.

5.3.3 Melati Jaya

Waktu : 24 - 25 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Melati Jaya

Fasilitator : Ahmad Musyaddad
Baitsul Amri

5.3.3.1 Isu Kunci Perubahan

Hal pertama yang dapat dipotret adalah rendahnya sinergitas antara Pemerintah Kampung dan Pengurus BUMK. Ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman filosofis kedudukan BUMK, baik oleh Pemkam maupun BUMK, serta saling ketidak percayaan masing – masing pihak . Di satu sisi pemerintah kampung ingin LPJ keuangan dikelola oleh pemerintah kampung, namun di sisi lain tentunya ini akan maladministrasi berpotensi menimbulkan *fraud.*

Kedua, kontestasi pemilihan kepala kampung yang akan digelar dalam waktu dekat (September

2021) juga menjadi dasar ketidak harmonisan hubungan antara pemkam dan BUMK. Kepala Kampung saat ini dan ketua BUMK merupakan dua kubu yang saling berseberangan.

Ketiga, adanya *mistrust* dengan masyarakat kampung. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan pembangunan kampung dan perkembangan usaha BUMK belum signifikan.

5.3.3.2 Prioritas Program Strategis

Selain penggalian atas isu kunci perubahan, hari pertama konsultasi lebih ditekanakan pada diskusi terarah penentuan program strategis untuk menjawab tantangan perubahan yang dipetakan.

Di kesempatan ini, kami lebih banyak berfokus memberikan pemahaman filosofis pengelolaan BUMK, serta strategi pembangunan kampung dengan *low budget.* Beberapa ide yang dapat disaring dalam proses ini adalah:

1. Peran BUMK sebagai pengepul hasil panen masyarakat (padi dan lada), agar petani mendapatkan harga yang lebih baik daripada yang ditawarkan tengkulak.
2. Penerapan sistem pengelolaan keuangan untuk memudahkan pengelola BUMK menghasilkan laporan berkualitas dan dapat diakses secara *real-time.*
3. Medium komunikasi antara Pemkam, BUMK, dan masyarakat untuk membangun relasi yang lebih cair melalui cara – cara kultural/ non birokratif.
4. Strategi moderasi peran masyarakat sebagai jaring pengaman sosial (isu kemiskinan, akses pendidikan, akses kesehatan).

5.3.3.3 Penyepakatan Penyelesaian

Agenda hari kedua konsultasi adalah pendetilan atas program strategis yang diwacanakan pada hari pertama, meliputi analisis gap, *resource mapping,* serta pembagian peran antar pihak sebagai komitmen tindak lanjut pertemuan ini.

Beberapa simpulan proses hari kedua ini adalah:

1. BUMK cukup menjalankan lingkup usaha yang dilakukan saat ini, simpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni:
   1.1. Atas analisa yang dilakukan, BUMK akan kalah perang atas harga yang ditawarkan tengkulak.
   1.2. Paska pemilihan kepala kampung akan melahirkan arah kebijakan baru, yang juga akan berimbas pada ruang gerak BUMK.
2. YSID memberikan *short course* pengelolaan keuangan BUMK, serta template sederhana dalam excell, yang secara *real-time* dapat menghasilkan:
   2.1. Laporan Arus Kas
   2.2. Laporan Laba/ Rugi
   2.3. Laporan Neraca
3. Studi kasus melembagakan partisipasi warga dalam membangun ketahanan sosial bidang pendidikan dan kesehatan, namun tindak lanjut belum direspons kongkrit oleh *stakeholder* kampung.

5.3.4 Labanan Makmur

Waktu : 26 - 27 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Labanan Makmur

Fasilitator : Ahmad Musyaddad
Any Sundari

5.3.4.1 Isu Kunci Perubahan

Labanan Makmur adalah kampung yang menjadi simpul pertemuan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik untuk kawasan perkampungan di sekitarnya. Pada pelayanan sektor pendidikan, telah tersedia SMP dan SMK, yang melayani siswa dari beberapa kampung tetangga. Simpul aktivitas ekonomi kawasan

perkampungan juga dihubungkan oleh keberadaan pasar, yang pedagang dan pembelinya berasal dari berbagai kampung. Pertumbuhan juga ditopang hadirnya beberapa perusahaan di sekitar kampung. Banyak pegawai perusahaan tinggal mengontrak/ kos di wilayah Labanan Makmur.

Laiknya kampung yang berada di lingkungan aktivitas perusahaan, banyak tenaga kerja usia muda di Labanan Makmur memilih bekerja di perusahaan. Baik yang memiliki *skill* maupun non *skill*. Serapan tenaga kerja menopang signifikan kesejahteraan ekonomi warga kampung.

Pemkam menyadari kemungkinan akselerasi perubahan kampung karena posisinya dalam perlintasan ini, termasuk antisipasi kebutuhan penataan ruang. Hal paling terlihat adalah pembebasan (baca: keswadayaan) warga untuk memangkas sebagian luas pekaranggannya untuk digunakan sebagai badan jalan kampung. Diharapkan, badan jalan untuk jangka waktu yang lama masih bisa menampung mobilitas kendaraan dalam berbagai moda transportasi.

Pemkam Labanan Makmur memiliki kesadaran yang baik dalam mengurus pemerintahan. *Mindset* dan cara kerja yang tidak membatasi urusan kampung sebatas urusan administratif, telah bekerja baik, Selain isu tata ruang, pendekatan pada peluang munculnya problem pertumbuhan karekater urban dari kampung didekati dengan isu pengelolaan persampahan, penataan pasar, perhatian pada kelompok lansia, sampai dengan terobosan menyediakan aplikasi sistem pelayanan desa,. Aplikasi ini melengkapi website kampung yang telah ada.

Progresivitas Labanan Makmur ditangkap baik oleh pemkam lain. Labanan Makmur adalah salah satu rujukan untuk melakukan studi banding, meskipun umumnya mereka justru berasal dari luar Kabupaten Berau.

Kepemimpinan yang punya visi transformatif terlihat bisa menggerakkan perubahan signifikan di Labanan Makmur. Dalam perkembangannya, tentu membutuhkan paartisipasi banyak pihak, tidak terbatas pada perangkat kampung. Upaya memperkuat partisipasi warga, terutama anak muda untuk berkarya belum bisa efektif. Anak muda lebih memilih bekerja di perusahaa karena menjanjikan penghasilan yang lebih baik.

Hambatan lain berkisar pada kurang optimalnya kinerja BUMK. Unit usaha BUMK sejauh ini baru mengambil pengelolaan pasar, termasuk sampah pasar dan lingkungan sekitar pasar, belum berkembang ke usaha lainnya. Berbagai potensi belum bisa ditangkap sebagai peluang bisnis. Akuntabilitas BUMK juga belum terihat baik.

5.3.4.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa hal penting:

1. Strategi pengembangan partisipasi warga yang dapat memberikan jembatan solusi ketidak seimbangan nilai tukar (di antaranya adalah penghasilan) antara bekerja untuk kampung da perusahaan.
2. Pendalaman identifikasi dan penjabaran kewenangan skala lokal guna memperkuat kinerja pemerintahan kampung.
3. Penataan kedudukan organisasi, manajemen perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas BUMK.
4. Menemukan berbagai ide bisnis pengembangan unit usaha BUMK.

5.3.4.3 Penyepakatan Penyelesaian

Pembahasan terhadap kebutuhan yang bisa menjawab kebutuhan strategis diatas, dibahas melalui proses fasilitasi yang menghasilkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pengembangan strategi penguatan fungsi pemkam dalam optimalisasi kewenangan skala lokal yang bisa

melibatkan berbagai pihak di dalam maupun luar kampung. Skenario lembaga kampung terbayangkan dibuat, namun jebakan "ketimpangan nilai tukar" (penghasilan) antara aktif di kampung dengan menekuni pekerjaan lain masih menjadi kendala.

2. YSID menawarkan upaya membangun basis nilai baru untuk menciptakan ruang - ruang ekonomi dan sosial dari jenis aktivitas yang berkarakter pada penguatan kualitas pelayanan publik. Isu pendidikan misalnya, diarahakan untuk melampaui jenjang pendidikan yang ditamatkan, namun memberikan skill - skill dunia masa depan (teknologi informasi, bahasa asing, dsb.).
3. YSID menawarkan kerangka operasional dari nilai - nilai baru bisa dikembangkan dari konsep masyarakat *"post-material".*
4. Mengupayakan langkah - langkah promosi *best practice* Labanan Makmur untuk dapat ditularkan ke kampung - kampung lain di Kabupaten Berau.
5. Penyesuaian badan hukum BUMK sesuai PP 11/2021, sekaligus sebagai pintu masuk penataan kelembagaan dan manajemen BUMK.

5.3.5 Labanan Makarti

Waktu : 26 - 27 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Labanan Makarti

Fasilitator : Aditya Mahendra Putra
Baitsul Amri

5.3.5.1 Isu Kunci Perubahan

Hal pertama yang dapat dipotret adalah sinergitas antara pemerintah kampung dan pengurus BUMK yang sangat tinggi. Perencanaan bisnis yang dilakukan BUMK didukung penuh oleh pemerintah kampung, melalui seperangkat kebijakan serta pendaya gunaan aset untuk menunjang tumbuh kembang BUMK.

Kedua, pengurus BUMK memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis yang dilakukan. Mereka memiliki data yang cukup akurat, serta analisa bisnis yang kuat. Ekstensifikasi dipilih untuk membesarkan BUMK, alih – alih membuka unit usaha baru. Ceruk pasar yang masih lebar serta peluang memperbesar kapasitas produksi menjadi pertimbangan utama. Fokus terhadap unit usaha yang dilakukan, itulah *value* yang dimiliki pengurus BUMK, yang tidak banyak ditemui di tempat lain.

Ketiga, kapasitas anggaran kampung Labanan Makarti yang mepet dan tidak sustain disadari betul oleh pemerintah kampung. Hal ini menjadi fokus pemerintah kampung, bagaimana dengan anggaran yang dimiliki, dapat menyelesaikan masalah sosial yang ada, sekaligus memperbesar *multiplier effect* yang besar atas anggaran yang dialokasikan.

5.3.5.2 Prioritas Program Strategis

Selain penggalian atas isu kunci perubahan, hari pertama konsultasi lebih ditekanakan pada diskusi terarah penentuan program strategis untuk menjawab tantangan perubahan yang dipetakan.

Kondisi demografi dan geografis Labanan Makarti, yang memiliki hamparan lahan luas, dengan kultur masyarakat agraris disadari betul oleh pemerintah kampung dan pengurus BUMK. Ini menjadi titik tolak bagaimana prioritas program strategis diwacanakan.

Berdasar pada potensi yang dimiliki serta memperhatikan lokalitas Labanan Makarti, maka ide utama penentuan program strategis adalah bagaiman upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk memperbesar kebermanfaatan usaha yang dilakukan BUMK, serta peran anggaran kampung untuk kebermanfaatan yang lebih luas.

Beberapa ide yang dapat disaring dari proses ini:

1. Insiasi penyediaan pakan ternak ayam petelur (usaha yang dikelola BUMK) oleh warga.

   Melihat potensi lahan dan kultur masyarakat yang ada, tentunya hal ini sangat memungkinkan. Pun proses produksinya cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam skala rumah tangga.

   Ini cukup proporsional, karena BUMK memberikan jaminan pembelian atas produksi pakan yang dilakukan warga dengan harga yang kompetitif.
2. Mekanisme pemanfaatan BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

   Pemahaman terkait pemanfaatan BLT-DD belum sepenuhnya dipahami baik oleh pemerintah kampung. Regulasi memang mengatur mekanisme penyaluran BLT-DD, namun pemerintah kampung sebenarnya memiliki ruang yang longgar untuk mengatur pemanfaatannya.

   Value "berbagi belanja" dengan memutar uang di desa yang diusung Pasardesa.id akan diadopsi oleh pemerintah kampung. Penerima BLT-DD akan "dipaksa" membelanjakan uangnya di warung tetangganya. Dengan demikian *multiplier effect* BLT-DD akan lebih luas bagi warga Labanan Makarti.

5.3.5.3 Penyepakatan Penyelesaian

Agenda hari kedua konsultasi adalah pendetilan atas program strategis yang diwacanakan pada hari pertama, meliputi analisis gap, *resource mapping,* serta pembagian peran antar pihak sebagai komitmen tindak lanjut pertemuan ini.

Beberapa simpulan atas prioritas program strategis yang disepakati sebelumnya adalah:

1. Memperbesar prospektus usaha yang BUMK, dengan memperbesar kapasitas produksi telur. Hal ini didukung penuh oleh pemerintah kampung dengan mengalokasikan penyertaan modal untuk pembangunan kandang tambahan dan penambahan kuantitas ternak, yang dialokasikan pada tahun anggaran sekarang, dan tahun anggaran selanjutnya (2 kali). Dukungan ini tidak terlepas dari analisa kelayakan usaha yang disodorkan BUMK cukup kuat.
2. Mekanisasi produkasi pakan ayam petelur sudah dipahami oleh pengurus BUMK. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan *piloting*. Proses sosialisasi akan memanfaatkan pertemuan – pertemuan tingkat RT.
3. Pemerintah kampung akan melakukan musyawarah atas ide pengaturan pemanfaatan BLT-DD.
4. Bila ide pemanfaatan BLT-DD disetujui oleh forum, YSID akan memberikan pendampingan teknis pelaksanaannya, termasuk dengan sistem penunjangnya.

5.3.6 Muara Lesan

Waktu : 28 - 29 April 2021

Tempat: Kantor Kampung Muara Lesan

Fasilitator : Ahmad Musyaddad
Aditya Mahendra Putra

5.3.6.1 Isu Kunci Perubahan

Muara Lesan berada di kawasan menuju daerah pedalaman. Akses masuk dari jalan poros provinsi masih berupa jalan pengerasan dan dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Penduduk Muara Lesan berasal dari warga suku Bugis dan sebagian suku dayak. Secara fisik, lokasi pemukiman kampung sempat berpindah. Lokasi lama di seberang sungai dinilai sudah tidak lagi layak karena banjir, sehingga pemukiman kampung, termasuk lokasi penyelengggaraan pemerintahan, dipindahkan.

Pencaharian utama warga umumnya berasal dari perkebunan. Salah satu komoditas yang sudah bisa terintegrasi dengan pasar adalah karet, terhubung dengan aktivitas serupa di kampung-kampung sekitarnya. Sebagian lainnya bekerja di perusahaan sawit yang lokasinya di sekitar kampung.

Sarana pelayanan publik dasar yang tersedia di Muara Lesan, di sektor pendidikan sudah tersedia dari jenjang SD dan SMP. Pelayanan kesehatan tersedia Pustu. Layanan jenjang SMP juga diakses oleh warga kampung terdekat, atau dari keluarga pekerja di perusahaan sawit.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung masih lebih terfokus pada urusan pelayanan administrasi warga dan administrasi perkantoran. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih lebih bersifat kegiatan, belum dikerangkai sebagai arena strategis tata kelola kampung.

BUMK Muara Lesan sudah operasional, namun sangat terkendala kelanjutan usahanya. Jenis usaha yang saat ini dipilih adalah penyediaan layanan air bersih untuk konsumsi makan dan minum, yang didistribusikan dengan kemasan galon. Sumber air bersih didapatkan dari air sungai. Penjualan dilakukan setelah terlebih dahulu melalui proses penjernihan air.

Kepada BUMK, Pemkam telah melakukan penyertaan modal sekitar Rp. 300 juta. Kebutuhan dan keinginan untuk segera bisa operasional, membuat BUMK sesegera mungkin memulai usaha, meskipun belum melalui tahap perencanaan yang matang, baik dari sisi studi kelayakan, proses bisnis, maupun manajemen organisasi badan usaha. Status saat ini, usaha layanan air bersih BUMK relatif terhenti. Modal terkuras untuk penyediaan sarana, fasilitas, dan operasional BUMK.

5.3.6.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa temuan penting:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kampung umumnya didominasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan fisik, belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek administrasi menyita sebagian besar aktivitas pemerintahan kampung.
2. Kapasitas Pemkam dalam memahami dan menerjemahkan keluasan kewenangan kampung dalam pendayagunaan berbagai sumberdaya, baik yang berasal dari atas (alokasi anggaran, program, dan lainnya) maupun aset yang ada di kampung belum memadai.
3. BUMK belum bisa beroperasi baik. Permasalahan mulai dari sisi perencanaan usaha, manajemen bisnis, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang belum memadai.
4. Peluang mengembangkan berbagai ide bisnis baru yang bisa menjadi peluang usaha belum muncul

5.3.6.3 Penyepakatan Penyelesaian

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa poin penting:

1. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan kampung yang memungkinkan perluasan peran Pemkam terhadap fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan strategi penjaringan kebutuhan warga.
2. Kedudukan dan hubungan antara Pemkam dan BUMK belum terang dipahami, sehingga bisa tidak sejalan. Dalam hal ini, upaya membangun

pemahaman ulang dilakukan dengan mendudukan posisi BUMK sebagai mitra Pemkam, yang bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan potensi kampung dan peluang yang ada.

3. Perlu penataan serius usaha bisnis penyediaan air bersih. Dari simulasi kelayakan usaha, unit usaha ini memang tidak memadai. Namun, bisnis ini jika tetap dipertahankan, maka harus punya nilai yang sangta kuat terhadap pemenuhan kualitas pelayanan publik dan menjawab persoalan warga.
4. Menyepakati penggunaan standar penilaian kelayakan usaha sebagai syarat pembukaan unit usaha baru BUMK dan/atau penyertaan modal dari BUMK.

5.3.7 Merabu

Waktu : 28 - 29 April 2021

Tempat: Kantor BUMK Lebok Asik, Merabu

Fasilitator : Any Sundari
Baitsul Amri

5.3.7.1 Isu Kunci Perubahan

Pertama, Kampung Merabu merupakan kampung yang menjadi tujuan wisata minat khusus. Di Merabu terdapat wisata danau, goa peninggalan zaman purba dan geopark. Turis yang kebanyakan datang ke kampung Merabu merupakan turis mancanegara. Berbagai larangan saat ini berdampak siginifikan pada penurunan pariwisata ke kampung Merabu karena adanya covid-19. Secara umum, pariwisata di Merabu sudah mapan karena terdapat pendampingan dari pihak luar sehingga Pemkam maupun BUMK memiliki visi kedepan terkait pengembangan pariwisata.

Kedua, tidak seperti kebanyakan kampung yang memiliki banyak pemuda yang keluar kampung untuk sekolah, pemuda di Merabu yang rata-rata lulusan SMA banyak yang memutuskan untuk tetap tinggal di kampung. Hal ini memberi kekuatan peran pemuda dalam sektor pariwisata di kampung.

Ketiga, terjaganya ekosistem di Merabu memberikan dampak positif akan terjaganya masa depan Merabu dari proses eksploitasi sumber daya. Ini diperkuat dengan proses masuknya Merabu sebagai bagian rencana situs warisan geopark dunia. Selain itu kehidupan di Merabu yang masih sangat ekstraktif/ subsisten, justru memberikan gambaran baru terkait kriteria kemandirian desa, yang bukan semata menghasilkan pendapatan yang tinggi tapi kemandirian pangan dari alam yang tersokong dari terjaganya hutan/ alam di Merabu.

5.3.7.2 Prioritas Program Strategis

Salah satu hal yang paling berdampak signifikan dari adanya Covid-19 adalah turunnya jumlah pelancong/ wisatawan yang datang ke Merabu. Selain itu ditengah pandemi Covid-19, adalah waktu yang tepat yang digunakan oleh kampung Merabu untuk mencari formulasi baru terkait pariwisata maupun hal - hal lain yang akan di kembangkan di kampung Merabu.

Maka prioritas yang coba untuk diulas dalam diskusi bersama adalah :

1. Bagaimana cara untuk menaikan kembali sector pariwisata Merabu ditengah adanya pandemic Covid-19?
2. Apa saja hal - hal yang bisa dieksplorasi untuk dikembangkan di Merabu selain sector pariwisata?

5.3.7.3 Penyepakatan Penyelesaian

Proses diskusi yang dilakukan ini menghasilkan beberapa penyepakatan penyelesian

1. YSID menyarankan untuk mulai menyasar turis domestik yang bisa menjadi *backup* ketika turis asing masih terkendala akses akibat Covid-19. BUMK perlu merancang paket-paket wisata sesuai dengan budget turis lokal yang memang tertarik dengan pariwisata di kampung Merabu.
2. Masa Covid-19 bisa menjadi waktu bagi BUMK maupun Pemkam guna

melakukan pendokumentasian - pendokumentasian pengetahuan yang terdapat di Merabu. Banyaknya warisan geopark, pengetahuan obat-obatan maupun warisan kebudayaan Dayak, bisa dijadikan rangkaian revitalisasi pariwisata yang tidak hanya berbasis pada alam semata tetapi juga laku hidup atau kebudayaan.

Berkaca pada pengalaman dari desa - desa yang ada di kawasan Berau, kampung Merabu bisa menjadi ikon baru tentang kemandirian desa. Jika selama ini kemandirian desa identik pada kemampuan mengelola pendapatan yang besar semata dari BUMK, maka pola Merabu bisa menjadi alternatif definisi kemandirian kampung yang baru, yakni kampung yang menjaga kedaulatan melalui tanaman pangan dan alam yang ada di hutan desa. Ini pula yang membuat Merabu tidak terdampak signifikan dari segi ketahanan pangan karena tercukupi oleh sumber daya alam yang terjaga.

5.3.8 Teluk Semanting

Waktu : 3 – 4 Mei 2021

Tempat: Pendopo Mangrove, Teluk Semanting

Fasilitator : Any Sundari
Aditya Mahendra Putra

5.3.8.1 Isu Kunci Perubahan

Hal pertama yang dapat dijadikan dinamisator perubahan adalah bahwa Teluk Semanting sedang mengembangkan ekowisata mangrove. Namun demikian ekowisata ini belum dibuka untuk umum karena adanya pandemi Covid-19. Ekowisata ini dipilih setelah sekian tahun mangrove di Kampung Teluk Semanting rusak.

Kedua, BUMK di Kampung Teluk Semanting juga mengembangkan usaha kerupuk amplang dari bahan baku ikan. Namun demikian, belum ada *business plan* yang jelas atas usaha ini. BUMK mencoba memasarkan kerupuk tapi karena pangsa pasarnya belum terpetakan dengan baik, stok kerupuk menumpuk dan belum terjual.

Ketiga, SDM untuk mengembangkan potensi di Kampung Teluk Semanting terbatas karena minimnya pemuda desa yang mau tinggal. Kebanyakan setelah lulus sekolah/ kuliah mereka tidak ingin kembali ke kampung.

5.3.8.2 Prioritas Program Strategis

Dalam proses diskusi disepakati bahwa yang akan menjadi prioritas untuk diperdalam didalam forum adalah *bussniess modelling* pengembangan ekowisata mangrove. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta bahwa :

1. Program pengembangan wisata mangrove sangat strategis untuk dianalisis dengan model BMC karena Kampung Teluk Semanting berencana segera membuka wisata mangrove ditengah pandemi Covid-19
2. Wisata mangrove merupakan wisata yang bias integratif dengan potensi-potensi lain seperti usaha kerupuk, potensi laut maupun peluang untuk menarik kembali anak-anak muda ke Kampung Teluk Semanting.
3. Ada banyak model inovasi-inovasi yang bisa dieksplorasi dari adanya hutan Mangrove misal potensi alam (spesies burung, hewan dan tumbuhan), potensi wisata edukasi dll. Selain itu secara infrastruktur jalan darat menuju Teluk Semanting sudah baik, ada peluang pula untuk mengembangkan model integrasi pengembangan pariwisata dengan wisata yang sudah mapan seperti Pulau Derawan.

5.3.8.3 Penyepakatan Penyelesaian

Agenda hari kedua proses diskusi dilanjutkan dengan mendetailkan *business model canvas* (BMC). Fasilitator menjelaskan tentang BMC guna memetakan mitra kunci, aktivitas utama, nilai yang ditawarkan hubungan target pasar

dengan pelanggan, sumber daya utama, jaringan, pembiayaan, pendapatan hingga dampak sosial. Dari proses ini dapatkan :

1. Kunci dari nilai yang ditawarkan *(value propositions)* dari adanya hutan mangrove adalah eduwisata alam berbasis mangrove dengan kuliner khas ekosistem mangrove.
2. Target yang bisa disasar berdasarkan *customer segments* ini adalah lembaga pendidikan, para wisatawan yang berwisata ke derawan, wisatawan keluarga dan juga adanya potensi pengembangan wisata relegi.
3. Setelah menentukan value propositions dan target pasar, peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk menentukan item-item lain yang ada di BMC. Dari proses ini didapatkan bahwa potensi pembiayaan yang diupayakan adalah melalui LSM, Kemendes, Dinas Pariwisata dan KKP. Sementara pendapatan diperoleh dari kuliner khas kampung, *homestay, tour guide,* kelas edukasi mangrove, *camping* mangrove, wisata relegi, *tracking* mangrove, berburu kerang dan kepiting.
4. Mitra utama yang akan menjadi *partner* untuk pengembangan mangrove adalah pemkam, pokdarwis, *guide,* warga kampung, DPMK, Dinas Pariwisata, Perusahaan Sawit, NGO (Forclime), Dinas Pendidikan dan *Travel Agent.*
5. Aktivitas utama dilakukan ialah promosi melalui media sosial, kesiapan warga untuk menerima tamu *(hospitality - homestay),* paket wisata yang ditawarkan, pengadaan dan persiapan souvenir, menyiapkan pengetahuan tentang mangrove (jenis burung, jenis tanaman mangrove), membangun kerjasama dengan dinas pendidikan, model kreasi program (*tracking* dengan menggunakan *game*), membuat *event* tahunan.
6. Cara membangun hubungan dengan pelanggan adalah keramah tamahan, sarana prasarana yang memadai, kebersihan dan kenyamanan.
7. Sumber daya utama melalui usaha warga, kelompok pengolah, pokdarwis, nelayan, TPM.
8. Strategi menjaring wisatawan dilakukan dengan mengoptimalkan sosial media, e-brosur, baliho, kerjasama dengan agen travel.
9. Dari proses ini, peserta dapat memetakan apa-apa saja yang perlu disiapkan didalam pembukaan wisata mangrove. Untuk waktu yang dipilih untuk membuka wisata, diserahkan kembali kepada para *stakeholder* kampung untuk didiskusikan dengan pertimbangan input yang didapat selama 2 hari proses konsultasi tatap muka.

5.3.9 Teluk Sumbang

Waktu : 21 – 22 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Teluk Sumbang

Fasilitator : Ahmad Musyaddad

5.3.9.1 Isu Kunci Perubahan

Teluk Sumbang adalah kampung pesisir di ujung tenggara Kabupaten Berau, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Penduduk Teluk Sumbang umumnya adalah warga keturunan Suku Bugis dan Suku Dayak yang bermukim di sisi atas dari lokasi kampung. Meski juga berprofesi nelayan. Sektor perikanan bukan komoditas utama, kontribusi sektor produksi umumnya ada di perkebunan. Produk yang umumnya dibawa keluar kampung adalah kelapa dan pada musim tertentu berupa madu hutan.

Teluk Sumbang justru tertarik dengan pengembangan pariwisata. Destinasi yang paling

dikenal adalah wisata Pulau Kaniyungan, termasuk memiliki *spot* ekosistem tempat penyu bertelur. Potensi alam lain cukup kaya mulai air terjun sampai dengan habitat tumbuhnya bunga rafflesia. Pada kesemua potensi alam ini, Teluk Sumbang relatif belum mendapatkan manfaat besar, kecuali warga yang tinggal di Pulau Kaniyungan. Itupun, masih lebih banyak sebagai *support system* bagi *resort* yang dimiliki oleh warga daerah lain. Akses jalan masuk ke Teluk Sumbang yang masih jalan tanah, membuat para wisatawan lebih memilih Teluk Sulaiman, kampung sebelah, sebagai pintu masuk wisata Pulau Kaniyungan.

Teluk Sumbang berharap dapat mengambil manfaat yang lebih optimal dari wisata pulau. Sejauh ini, langkah inisiasi baru dirintis, yakni memulai dengan memungut biaya retribusi bagi wisatawan pulau sebagai pengganti jasa layanan pengelolaan sampah wisatawan. Pokdarwis diaktifkan dengan menempatkannya sebagai operator dari BUMK.

Isu paling menjadi perhatian dari Pemkam Teluk Sumbang berkisar pada bagaimana aset yang ada di kampung dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Sebelum ini, berbagai program dengan karateristik bantuan modal, peralatan dan perlengkapan, termasuk pelatihan telah dilakukan, namun dinilai belum mendapatkan hasil optimal sebagai pengungkit perubahan. Ke depan, Pemkam berniat mengubah strateginya dengan lebih membidik alokasi program pada warga yang memang telah merintis usaha, sehingga program dari Pemkam lebih bersifat pendukung, penguatan, dan pengembangan. Pemkam memilih analogi untuk fokus mengelola warga berciri “ayam kampung” yakni kreatif dalam mencari dan membangun kemandirian, tidak lagi memperlakukan warga sebagai “ayam potong atau petelur” yang hidupnya bergantung dari pemberian.

5.3.9.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa hal penting:

1. Prioritas pembangunan kampung diarahkan dengan menggunakan tema pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi kreatif warga.
2. Kebutuhan pengembangan pariwisata sangat membutuhkan dukungan prasarana yang memudahkan akses masuk ke Teluk Sumbang, terutama pada peningkatan kualitas jalan poros yang masih jalan tanah sejak mulai dari Teluk Sulaiman.
3. Berbagai jenis potensi pariwisata berbasis SDA dan ekonomi kreatif masih berupa perbincangan - perbincangan warga, beum diterjemahkan ke dalam seperangkat rencana yang sistematis.
4. BUMK belum memiliki ide bisnis yang cukup dalam menemukan peluang dari berbagai potensi yang ada.

5.3.9.3 Penyepakatan Penyelesaian

Pembahasan terhadap kebutuhan yang bisa menjawab kebutuhan strategis di atas, dijembatani melalui proses fasilitasi diskusi yang menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata Teluk Sumbang direncanakan dalam desain integratif antara pariwisata pulau dan daratan Kampung Teluk Sumbang.
2. Cara pandang terhadap Kampung Teluk Sulaiman, yang saat ini menjadi penerima manfaat terbesar dari pariwisata Pulau Kaniyungan, diubah dari kompetitif menjadi kolaboratif. Ruang komunikasi diupayakan tidak semata bersandar dari hubungan antar pelaku wisata (hubungan bisnis), namun

juga ruang kerjasama antar kampung, melalui Pemkam.

3. Berbagai langkah untuk mendapatkan gambaran rencana operasional dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Teluk Sumbang dielaborasi, dengan poin-poin utama sebagai berikut:
   a. Penyediaan pusat informasi

      Pusat informasi dirancang dalam bentuk offline dan online sekaligus. Media online dipilih melalui website kampung dan media sosial yang juga akan diisi dengan konten-konten pariwisata. Bentuk *offline* dirancang melalui katalog informasi dan loket informasi di Pulau. Katalog sekaligus menjadi media promosi yang dihubungkan dengan resort, agen wisata, maupun pihak-pihak lain di luar Teluk Sumbang.

      Media online membutuhkan SDM yang cakap untuk memproduksi berbagai konten. Bentuk konten yang dirancang mencakup foto, video, deskripsi obyek wisata, harga, informasi fasilitas, peta wisata, sampai dengan paket-paket wisata yang disediakan.

   b. Penguatan kualitas dan standar pelayanan wisatawan di Pulau Kaniyungan

      Keberadaan loket di pulau bukan semata pemungut karcis retribusi, namun harus didesain sebagai pusat informasi wisatawan.

      Standar pelayanan dirancang untuk menciptakan standar mutu barang atau jasa layanan, diantaranya mencakup standar *homestay*, resto/ warung makan, dan sebagainya. Tentu didukung oleh SDM yang cakap. Standar lainnya adalah kebersihan dan keamanan bagi wisatawan (pos pantau, tata tertib, dan sebagainya).

   c. Mengembangkan ragam jenis layanan atau paket wisata Teluk Sumbang.

      Direncanakan dilakukan untuk membuat *event* rutin (mingguan) dan festival tahunan. Event atau festival mengambil lingkup seni budaya, yang penerjemahannya sangat luas dalam berbagai produk budaya. Dari sisi jenis wisata, juga dikembangkan pada berbagai aktivitas yang justru dilakukan pada malam hari, seperti memanah ikan. Metode ini ditempuh agar wisatawan tertarik menghabiskan waktu untuk menginap.

   d. Untuk bisa menaungi kesemuanya, peran Pemkam sangat diharapkan. Diantaranya adalah melalui: (1) berbagai regulasi kampung untuk menopang sektor pariwisata. Ini menyangkut tata ruang pantai, perizinan usaha dan produk usaha, retribusi, pengelolaan sampah, sampai dengan langkah preventif agar pariwisata tidak merusak ekosistem terumbu karang. (2) menggerakkan peran kampung untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborai dengan berbagai pihak, khususnya Kampung Teluk Sulaiman dalam rangkan menciptakan manfaat bersama dari wisata Pulau Kaniyungan.

4. Berbagai upaya di atas dilakukan dengan mengintegrasikan wisata pulau dan daratan, sebagai cara untuk membujuk wisatawan untuk menambah lama tinggal di Teluk Sumbang (tidak lagi pulang - pergi).

5.3.10 Biduk - Biduk

Waktu : 21 – 22 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Biduk - Biduk

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Aditya Mahendra Putra

5.3.10.1 Isu Kunci Perubahan

Isu kunci pertama dalam tata Kelola pemerintahan kampung Bidu-Biduk adalah perihal reformasi birokrasi. Kepaduan antar aparat kampung masih menjadi hal yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini berimbas pada pelaksanaan pembangunan kampung yang sering kali lepas dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kedua, data menjadi isu kunci yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan. Ketiadaan pengelolaan data yang padu dan akurat berimbas pada pola pengelolaan pembangunan ditingkat kampung. Dalam hal yang lebih mendasar ketersediaan laman kampung Biduk-Biduk tidak tersedia dan belum dirumuskan pengelolaannya. Sebagian besar informasi terkait Biduk-Biduk masih berasal dari wisatawan yang datang kelokasi-lokasi wisata di kampung biduk-biduk.

Ketiga, pendampingan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga kampung, termasuk didalamnya BUMK tampaknya masih lemah. Pemerintah kampung telah memberikan penyertaan modal ke BUMK, tetapi proses pendampingan dan pengawasan tidak berjalan. Hal ini berdampak pada tak selarasnya pemikiran dan gerak pengelolaan pada BUMK.

Sementara itu isu kunci yang ditemukan dalam tata kelola BUMK yang pertama adalah kegagalan manajemen BUMK. *Plotting* pengurus masih menjadi isu sentral dalam pengelolaan BUMK. Pada saat pelakasanaan konsultansi posisi direktur BUMK masih kosong dan sedang dalam tahap persiapan seleksi pemilihan direktur. Disi lain pemilihan ini terkendala laporan pertanggung jawaban BUMK yang tak kunjung selesai atau tak kunjung dilaporkan pada pemerintahan kampung atau juga pada musyawarah kampung. Hal ini menjadi penghambat utama dalam keberlanjutan pengelolaan BUMK saat ini.

Kedua, kapasitas pengelolaan BUMK dan unit-unit usaha yang dibawahi oleh BUMK belum memahami secara utuh terkait proses bisnis yang dilakukan oleh BUMK. Hal ini berakibat pada lemahnya upaya kapitalisasi usaha. Kuatnya pamor wisata Labuhan Cermin belum mampu memberi dampak positif pada pertumbuhan perekomonian kampung dalam bentuk pendapatan asli kampung,

Ketiga, sistem pengelolaan keuangan yang masih lemah. Mencermati begitu banyaknya pengunjung ke lokasi-lokasi wisata di kampung Biduk-Biduk, seharusnya potensi pendapatan asli kampung lebih banyak dari yang senyatanya diberikan kepada pemerintahan kampung. Namun karena kapasitas pengelolaan keuangan dan kapasitas manajemen yang masih rendah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan wisata, terutama di spot Labuan Cermin.

Keempat, SDM dalam pengelolaan BUMK masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus menerus diperbaiki. Hal ini penting, mengingat lokasi-lokasi wisata yang ada di Biduk-Biduk menjanjanikan masa depan wisata yang mampu menarik wisata yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Maka kemampuan SDM dalam pengelolaan unit usaha wisata sebagai unit usaha BUMK menjadi penting.

Kelima, isu terkait dengan insetif dan gaji bagi pengurus BUMK. Isu ini mengemuka selama diskusi terkait tata kelola BUMK. Ketiadaan pendapatan bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK mati suri. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup No 61 tahun 2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya

memperoleh insetif dari pendapatan BUMK setahun sekali. Hal ini berdampak pada fokus pengelola BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan.

5.3.10.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci dua hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk pendalaman diskusi dan disimulasikan. Beberapa prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi, termasuk didalamnya memberikan standar pelayanan minimal kepada warga masyarakat menjadi hal penting akan akan segera diselesaikan. Hal ini oleh pemerintah kampung akan coba diselesaikan dengan menerapkan system informasi desa.
2. Pengelolaan sistem informasi kampung, akan mulai dirancang. Sekaligus ini merupakan upaya persiapan dari target pemerintah kabupaten berau bahwa tahun 2023 kampung - kampung di Berau sudah harus menerapkan digitalisasi.
3. Program strategis BUMK adalah simulasi dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. *Business Model Canvas* dijadikan acuan untuk mencermati ulang operasional unit usaha Labuan Cermin.

   Dari simulasi sederhana dengan data yang mendekati presisi diperoleh gambaran bahwa dari pengelolaan unit usaha Labuan Cermin, BUMK diproyeksikan memperoleh pendapatan kotor dalam satu tahun sekira 3,5 - 4 Milliar. Angka ini diperoleh dengan mensimulasikan model bisnis yang dikelola menggunakan studi kelayakan usaha. Dengan estimasi pendapatan kotor sebesar itu, pemerintah kampung bisa memperoleh PAK sekitar 300 juta tiap tahun. Pun pengurus BUMK sudah memperoleh pendapatan tetap bulanan.

Hal yang menarik dari proses fasiltiasi selama dua hari ini adalah bahwa setidaknya ada kesamaan padangan antara tiga *stakeholder* (pemerintah kampung, BPK, dan pengurus BUMK) untuk bersama melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola di masing-masing lembaga dan membangun sinergi. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap BUMK agar penyertaan modal tidak hanya dikeluarkan tanpa meknisme monitoring & evaluasi.

Kesamaan cara pandang ini menjadi penting mengingat bahwa tidak semua kampung menempatkan proses bersama sebagai bagian penting. Kompetisi politik di tingkat kampung, terutama pemerintah kampung dan BPK masih sangat kentara. Maka komunikasi yang baik antara ketiga *stakeholder* menjadi isu penting untuk terus dijaga agar perbaikan tata kelola pemerintahan kampung dan tata kelola BUMK berjalan dengan baik guna meningkatkan perekonomian kampung. Pada akhirnya mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung Biduk-Biduk.

5.3.10.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh pemerintah kampung dan BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan *stakeholder* (Pemkam, BPK, dan BUMK) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan reformasi birokrasi dalam pelayanan kepada warga kampung bisa berjalan dengan efektif dan efisien melalui penerapan sistem informasi.
2. Membentuk lembaga - lembaga kampung guna menjaring dan melembagakan partisipasi warga kampung dalam proses perencanaan,

pelaksanaan pembangunan kampung diantaranya kelompok nelayan.

3. Memastikan pengelolaan data melalui sistem informasi desa terkelola dengan baik dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan database kampung.
4. Dalam hal tata kelola BUMK, yang pertama akan dilakukan adalah memastikan laporan pertanggung jawaban pengelola BUMK periode sebelumnya telah dilaporkan.
5. Pelaksanaan rekruitmen untuk direktur BUMK dengan test yang transparan untuk mendapatkan sosok yang mampu bekerja dan bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMK kedepan.
6. Menjalankan studi kelayakan usaha untuk tiap-tiap potensi unit usaha yang akan dikembangkan oleh BUMK.
7. Meningkatkan kapasitas pengelola BUMK melalui pelatihan, pengembangan kapasitas pengelolaan BUMK, baik dari segi manajerial, pengelolaan wisata, pengelolaan keuangan, maupun pemetaan bentang/ potensi kampung.
8. Memastikan penyesuaian AD/ART terkait BUMK sesuai dengan PP.11 tahun 2021 sekaligus sebagai upaya untuk pemenuhan syarat badan hukum BUMK.

5.3.11 Tembudan

Waktu : 24 - 25 Mei 2021

Tempat: Gedung PKK Tembudan

Fasilitator : Aditya Mahendra Putra
Ryan Sugiarto

5.3.11.1 Isu Kunci Perubahan

Kampung Tembudan adalah kampung yang sebagian besar lokasinya berada di areal perusahaan. Persoalan negosiasi pengelolaan lahan perusahaan yang "bangkrut" menjadi bagian penting yang hingga kini masih diupayakan oleh pemerintah kampung.

Isu kunci pertama dalam tata Kelola pemerintahan kampung tembudan adalah sistem informasi desa. Data belum menjadi bagian dari pengambilan kebijakan di tingkat desa. Data menjadi isu kunci yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan. Pernah digagas dan dibuat sistem informasi desa namun dalam pelaksanaannya tidak ada tim yang mengelola. Ketiadaan pengelola sistem informasi ini menyebabkan gagasan dan bentuk SID yang sudah diinisiasi berhenti dan tidak operasional.

Kedua, persoalan terhadap batas desa dengan penguasaan lahan oleh perusahaan juga masih menjadi kendala. Upaya untuk menemukan ketegasan pengelolaan batas - batas desa sejauh ini terus menjadi kendala, terutama dalam pengelolaan sumber - sumber wisata desa.

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa masih minim. Tidak cukup ada inovasi pemerintahan yang memungkinkan warga terlibat dalam pelaksanaan kewenangan kampung. Tidak tersedia lembaga desa diluar lembaga teknokratis yang disisipkan dari supra desa, yang mampu mewadahi partisipasi pembangunan sesuai konteks lokal kampung.

Sementara itu isu kunci yang ditemukan dalam tata kelola BUMK yang pertama adalah kapasitas pengelolaan BUMK dan unit - unit usaha yang dibawahi oleh BUMK belum memahami secara utuh terkait proses bisnis yang dilakukan Hal ini berakibat pada lemahnya upaya kapitalisasi usaha. Kuatnya wisata Tulung Ni Lenggo belum mampu memberi dampak signifikan pada pertumbuhan pembangunan kampung.

Kedua, sistem pengelolaan keuangan yang masih manual. Mencermati begitu banyaknya pengunjung ke lokasi - lokasi wisata di Kampung Tembudan, seharusnya pendapatan asli kampung lebih banyak dari yang senyata

diberikan kepada pemerintahan kampung. Namun karena kapasitas pengelolaan keuangan dan kapasitas manajemen yang masih rendah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan dan pengembangan wisata di Tembudan, terutama Tulung Ni Lenggo.

Ketiga, SDM dalam pengelolaan BUMK masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus menerus diperbaiki. Hal ini penting, mengingat lokasi - lokasi wisata yang ada di Tembudan menjanjanikan masa depan wisata yang mampu menarik wisata yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Keempat, isu terkait dengan insetif dan gaji bagi pengurus BUMK. Isu ini mengemuka selama diskusi terkait tata kelola BUMK. Ketiadaan pendapatan bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK tidak berjalan. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup No 61 tahun 2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya memperoleh insetif dari pendapatan BUMK setahun sekali. Hal ini berdampak pada fokus pengelola BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan tetap bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan.

5.3.11.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci dua hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk terus didiskusikan dan disimulasikan pada hari kedua baik terkait tata Kelola pemerintahan kampung, termasuk didalamnya adalah data, maupun tata kelola bada usaha milik kampung. Beberapa prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sistem informasi kampung, akan mulai dirancang. Sekaligus upaya persiapan target pemerintah kabupaten bahwa tahun 2023 kampung - kampung di Berau harus menerapkan digitalisasi.
2. Program strategis untuk BUMK adalah mensimulasikan dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. Analisa kelayakan usaha akan menjadi acuan bagi BUMK untuk mencermati ulang tata kelola unit usaha wisata.

Hal yang menarik dari proses fasiltiasi selama dua hari ini adalah bahwa setidaknya ada kesamaan padangan antara tiga *stakeholder* (pemerintah kampung, BPK, dan pengurus BUMK) untuk bersama melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola di masing-masing lembaga dan membangun sinergi. Melakukan pendampingan dan pengawasan agar penyertaan modal tidak hanya dikeluarkan tanpa meknisme monitoring & evaluasi.

Kesamaan cara pandang ini menjadi penting mengingat bahwa tidak semua kampung menempatkan proses bersama sebagai bagian penting. Kompetisi politik di tingkat kampung, terutama pemerintah kampung dan BPK masih sangat kentara. Maka komunikasi yang baik antara ketiga *stakeholder* menjadi isu penting untuk terus dijaga agar perbaikan tata kelola pemerintahan kampung dan tata kelola BUMK berjalan baik guna meningkatkan kapasitas perekonomian kampung. Hingga mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

5.3.11.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh pemerintah kampung dan BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan *stakeholder* (Pemkam, BPK, dan BUMK) yang terlibat dalam forum ini yaitu:

Pemerintahan Kampung:

1. Memastikan reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan kepada warga masyarakat kampung bisa berjalan dengan baik, melalui penerapan sistem informasi desa. Optimalisasi system informasi yang telah dibangun menjadi bagian penting untuk ditindaklanjuti guna memastikan terwujudkan kampung digital. Sidak (sistem informasi dan data kampung) akan ditindaklanjuti sekaligus sebagai upaya promosi wisata dan promosi keberhasilan-keberhasilan kampung kepada dunia luar.
2. Memastikan pengelolaan data melalui sistem informasi desa terkelola dengan baik dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan database kampung.

Badan Usaha Milik Kampung:

3. Pertama yang akan dilakukan adalah memastikan studi kelayakan usaha untuk tiap-tiap potensi unit usaha yang akan dikembangkan oleh BUMK. Mengingat belum pernah sekalipun kajian tentang potensi dan kelayakan usaha pernah dilakukan, meskipun sering mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait BUMK.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi unit usaha Tulung Ni Lenggo perlu dilakukan untuk peningkatan kedatangan wisatawan. Kolaborasi dengan warga untuk penyediaan *refreshment* bagi wisatawan perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BUMK
5. Memberikan sentuhan-sentuhan budaya dan seni yang ada di kampung tembudan untuk objek-objek witasa. Sekaligus mengoptimalisasi 13 suku yang ada di kampung tembudan. Tokoh adat akan berperan penting dalam memberikan sentuhan kebudayaan dan seni pada objek-objek wisata budaya.
6. Memastikan penyesuaian AD/ART terkait BUMK dengan PP 11 tahun 2021 sekaligus upaya pemenuhan syarat badan hukum BUMK Tembudan.

5.3.12 Campur Sari

Waktu : 26 - 27 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Campur Sari

Fasilitator : Ryan Sugiarto

5.3.12.1 Isu Kunci Perubahan

Campursari adalah kampung yang sektor utamanya menekankan pada pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah 1500 hektar. Dengan komoditas utama jagung yang memiliki kualitas terbaik di Kabupaten Berau.

Isu kunci utama dalam tata kelola pemerintahan kampung adalah lemahnya kapasitas sosial. Segala upaya pemerintah kampung tampaknya mengalami hambatan dalam upaya menggerakkan partisipasi. Dari beberapa diskusi selama proses fasilitasi ditemukan cukup banyak inovasi dari pemerintah kampung untuk menggerakkan perekonomian desa.

Pertama, upaya peningkatan produksi jagung. PT.indofood telah memberikan komitmen kerjasama untuk menampung produksi jagung, dengan target 75 ton perbulan. Upaya telah dilakukan dengan pembukaan lahan seluas 120 hektar, penyiapan bibit dari dinas pertanian, stimulasi pemberian pupuk secara gratis. Namun pengelolaan oleh warga kampung tidak optimal, sehingga target 75 ton tidak tercapai.

Kedua, terkait upaya membangun ketahanan pangan warga. Mencermati kebutuhan harian sayuran warga kampung, pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya untuk membangun lumbung produksi pangan dan upaya menahan perputaran uang dikampung sebanyak mungkin. Skema ini masih terus digodong dan akan segera diimplementasikan.

Ketiga, upaya mencairkan ketegangan politik antara pemerintah kampung dengan badan permusyawaratan kampung. Hampir setengah periode pemerintahan kampung kesatuan pandangan antara pemerintah kampung dan BPK susah menemukan titik temu untuk membangun kemajuan kampung. Hal ini berimbas pada upaya pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi warga yang tersendat. Berimbas pada upaya konsolidasi kapasitas sosial warga.

Keempat, data masih menjadi persoalan. Meskipun kepala kampung, mencermati detail persoalan, namun data masih diperoleh dari analitik personal, belum memanfaatkan data - data kampung secara holistik. Kelemahan dalam mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menjadikan data sebagai sumber pengambilan kebijakan belum tampak. Sistem informasi masih menggunakan web tidak terkelola dengan baik. Web dibangunkan oleh pihak lain dan tidak terjadi *updating* informasi. System informasi dan data belum menjadi bagian pengambilan kebijakan pembangunan. Data menjadi isu kunci yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan.

Kelima, oleh karena persoalan politik kampung yang tak kunjung membaik, pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa minim. Tidak cukup ada inovasi pemerintah yang memungkinkan warga terlibat dalam pelaksanaan kewenangan kampung. Tidak tersedia lembaga desa, diluar yang diperintahkan undang-undang.

Sementara itu isu kunci yang ditemukan dalam tata BUMK, yang pertama adalah kapasitas pengelolaan BUMK dan unit-unit usaha yang dibawahi oleh BUMK belum memahami secara utuh terkait proses bisnis yang dilakukan oleh BUMK. Hal ini berakibat pada lemahnya kapitalisasi pengelolaan usaha. Pasar desa yang menjadi unit pertama BUMK sepi, tidak ada yang menyewa dan tidak ada aktivitas ekonomi di pasar desa.

Kedua, kepengurusan BUMK yang belum lengkap. Sekretaris BUMK mengundurkan diri dan pindah domisili, dan belum ada pengisian jabatan. Hal ini mengakibatkan gerak organisasi tidak optimal.

Ketiga, tidak tersedia studi kelayakan usaha untuk unit-unit usaha yang didirikan BUMK. Akibatnya bangunan pasar tidak berfungsi, produksi jagung juga tidak berjalan optimal untuk memehuni kebutuhan pihak ketiga, dalam hal ini PT. Indofood. Ketiadaan studi kelayakan usaha mengakibatkan usaha yang dilakukan BUMK masih meraba dalam pelaksanaan usahanya.

Keempat, isu terkait dengan insetif dan gaji bagi pengurus BUMK. Isu ini mengemuka selama diskusi. Ketiadaan pendapatan tetap bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK tidak berjalan. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup No 61 tahun 2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya memperoleh insetif dari pendapatan BUMK setahun sekali. Hal ini berdampak pada fokus pengelola BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan tetap bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan.

5.3.12.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci dua hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk terus didiskusikan dan disimulasikan pada hari kedua baik terkait tata kelola pemerintahan kampung, termasuk didalamnya adalah data, maupun tata kelola bada usaha milik kampung. Beberapa prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas penting dalam kemandirian desa adalah membangun kapasitas sosial.

2. Reformasi birokrasi, terutama upaya membangun hubungan baru antara pemerintah kampun dan warga kampung tampaknya menjadi isu sentral. Perubahan kultur birokrasi penting untuk dilakukan sebagai jalan pesan bahwa pemerintahan kampung sedang menuju perubahan. Hal ini juga penting untuk disampaikan kepada BPK sebagai jalan mencairkan komunikasi yang sejauh ini menegang.
3. Pengelolaan sistem informasi kampung, akan mulai dirancang. Sekaligus upaya persiapan target pemerintah kabupaten bahwa tahun 2023 kampung - kampung di Berau harus menerapkan digitalisasi.
4. Program strategis untuk BUMK adalah mensimulasikan dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. Analisa kelayakan usaha akan menjadi acuan bagi BUMK untuk mencermati ulang tata kelola unit usaha.

Hal yang menarik dari proses fasiltiasi selama dua hari ini adalah bahwa setidaknya ada kesamaan padangan antara dua stakeholder (pemerintah kampung, dan pengurus BUMK) untuk bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola di setiap lembaga dan membangun sinergi. Melakukan pendampingan dan pengawasan bagi BUMK agar penyertaan modal tidak hanya dikeluarkan tanpa adanya mekanisme evaluasi.

Kesamaan cara pandang ini menjadi penting mengingat tidak semua kampung menempatkan proses bersama sebagai bagian penting.

Kompetisi politik di tingkat kampung, terutama pemerintah kampung dan BPK masih sangat kentara. Maka komunikasi yang baik antara ketiga stakeholder menjadi isu penting untuk terus dijaga agar perbaikan tata kelola pemerintahan kampung dan tata Kelola badan usaha milik kampung bisa berjalan dengan baik.

5.3.12.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh pemerintah kampung dan BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan *stakeholder* (Pemkam, BPK, dan BUMK) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kampung akan terus berusaha mengagregasi kapasitas sosial warga untuk secara bersama membangun kampung Campursari. Model *piloting* program akan dijalankan, mengajak warga yang satu visi membangun kampung. Dengan begitu jika ini berhasil, warga lain akan lebih mudah mengikuti, mengingat kultur warga yang cenderung pragmatis.
2. BPK akan didorong lebih produktif dalam memproduksi peraturan kampung untuk membantu pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang perekonomian.
3. Memastikan reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan kepada warga kampung bisa berjalan efektif dan efisien melalui penerapan sistem informasi desa. Optimalisasi system informasi yang telah dibangun menjadi bagian penting untuk ditindak lanjuti guna memastikan terwujudnya kampung digital. Memastikan pengelolaan *database* desa melalui sistem informasi desa terintegrasi dengan sistem aplikasi dan sistem web.
4. Optimalisasi pengelolaan informasi dan media dianggap penting. Media yang sejauh ini bergerak adalah Youtube. Konten dalam web desa masih sangat kurang, karena itu upaya membangun lembaga desa khusus untuk pengelolaan SID perlu segera dilakukan.
5. Meningkatkan kapasitas pengelola BUMK melalui pelatihan, pengembangan

kapasitas, baik dari segi manajerial, keuangan, maupun pemetaan bentang/ potensi kampung.

6. Penguatan unit usaha pasar desa perlu dilakukan dengan skema ekstensifikasi. Upaya membangun demplot pertanian juga akan segera dilakukan sebagai *pilot project* pertanian desa. Sekaligus untuk menarik sebanyak mungkin kelompok tani untuk berpartisipasi dalam peningkatan produksi komoditas pertanian kampung.
7. Memastikan penyesuaian AD/ART terkait BUMK dengan PP 11 tahun 2021 sekaligus sebagai upaya untuk pemenuhan syarat badan hukum BUMK Mandiri Jaya Abadi.

5.3.13 Talisayan

Waktu : 26 - 27 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Talisayan

Fasilitator : Ahmad Musyaddad
Aditya Mahendra Putra

5.3.13.1 Isu Kunci Perubahan

Kampung Talisayan adalah kampung pesisir, pusat kecamatan Talisayan dan merupakan kampung paling ramai di wilayah selatan Kabupaten Berau. Sebagai kampung di Kota Kecamatan, berbagai fasilitas pelayanan publik sudah relatif tersedia, baik pelayanan pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA, pelayanan kesehatan dari Puskesmas sampai dengan rumah sakit, dan fasilitas penunjang ekonomi keuangan seperti perbankan. Isu prasarana infrastruktur relatif sudah memadai, baik jalan, listrik, air, maupun komunikasi internet. Sama seperti kampung lain di area pesisir timur, Isu prasarana praktis menyisakan tantangan infrastruktur jalan kurang memadai menuju ibukota kabupaten.

Talisayan merupakan kampung penghasil komoditas laut penting di kawasan pesisir timur Kabupaten Berau. Profesi nelayan umumnya ditekuni oleh warga yang berasal dari Suku Bugis dan Bajau. Area pemukiman padat penduduk dengan model rumah panggung di atas air di pinggiran laut atau sungai menuju laut dapat ditemukan di Talisayan. Selain itu, sektor perkebunan juga ditekuni sebagai mata pencaharian warga, termasuk sawit. Berbagai sektor jasa dan perdagangan tumbuh marak dan menjadi penopang ekonomi kampung.

Dari sisi tata kelola pemerintahan dan pembangunan, sekian upaya penataan terlihat secara serius dilakukan. Berbagai belanja Pemkam untuk infrastruktur fisik kini digerakkan seoptimal mungkin dilakukan melalui swakelola. Kebijakan ini dipilih untuk mengoptimalkan kualitas hasil dari berbagai proyek fisik yang sebelumnya. Beberapa SDM perangkat kampung memiliki kompetensi teknis dalam hal ini.

Berbagai kebutuhan untuk penguatan peran pemkam sebagai penyedia barang dan jasa publik kampung, melampaui sebatas peran administratif coba dipikirkan. Namun, memang belum ditemukan formulasinya yang efektif dalam kelembagaan organisasi Pemkam. Penanganan sampah misalnya, telah menjadi perhatian serius, namun memang masih menemui banyak kendala. Sejauh ini pendekatan yang dilakukan juga sudah mencoba memadukan dengan cara kerja kultural dengan menggerakkan gotong royong, termasuk pelibatan anak-anak sebagai bagian dari literasi kebersihan. Isu penguatan kapasitas sosial menjadi perhatian serius Pemkam.

Potensi paling dibidik oleh Kampung Talisayan adalah produk kelautan, termasuk wisata laut. Laut Talisayan adalah tempat hiu tutul berada dan menjadi dayatarik wisata selain memancing. Namun, sejauh ini, pengorganisasian wisata belum muncul, termasuk menggerakkan pengolahan lanjutan dari produk laut.

BUMK masih menemui cukup banyak kendala. Relasi politik yang kurang harmonis dengan Pemkam, profesionalitas, sampai dengan manajemen adminsitrasi dan keuangan masih kentara terlihat. Usaha yang dipilih saat ini yang paling menonjol adalah pengelolaan tempat pembongkaran ikan (TPI) dari hasil tangkapan nelayan.

5.3.13.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa catatan penting:

1. Sistem informasi kampung belum berkembang baik, termasuk website kampung.
2. Pemanfaatan berbagai data kampung yang telah dimiliki Pemkam belum dilakukan. Tradisi penyediaan data masih berupa pemenuhan permintaan dari pemerintah suprakampung.
3. Strategi penguatan kapasitas regulasi dan sosial warga. Isu regulasi menjadi kian penting karena kompleksitas pertumbuhan kampung yang berada di pusat kota kecamatan dan beragam tuntutan dari regulasi suprakampung. Penguatan kapasitas sosial juga masih menjadi kebuntuan dalam rangka menggerakkan partisipasi warga dalam pembangunan.
4. Pemkam dalam perspektif untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas pelayanan diluar hal adminsitratif. Skenario pelembagaan, menyangkut bagaimana sebagian urusan dan kewenangan dapat didelegasikan kepada warga belum ditemukan.
5. Pengembangan pariwisata belum memiliki desain perencanaan pada berbagai potensi yang dimiliki, baik SDA maupun sumberdaya budaya.
6. Efektivitas kinerja BUMK masih menjadi persoalan serius, baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, maupun akuntabilitas usaha.

5.3.13.3 Penyepakatan Penyelesaian

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa poin penting:

5. Dibutuhkan sistem informasi kampung yang setidaknya dibutuhkan untuk kian memudahkan akses warga dalam pelayanan adminsitrasi. Pada tahap lanjut, sistem informasi kampung diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan kampung.'
6. Penguatan kapasitas sosial dilakukan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang mendorong perjumpaan antar warga dalam kerja - kerja kolektif untuk urusan publik. Isu persampahan digunakan sebagai pintu masuk. Metode ini sekaligus dikombinasikan dengan model pendidikan literasi bagi para pihak (anak-anak, pemuda) sebagai cara mendorong keaktifan dan kreativitas partisipasi warga.
7. Memperkuat identitas Talisayan dengan mengoperasionalkan 3 (tiga) aspek:
   a. Talisayan BERSINAR (Bersih, Indah, Aman, dan Relijius)
      - Perencanaan dan penataan ruang, termasuk sampai *siteplan*
      - Penguatan gotong royong: sampah, ketertiban keamanan (partisipasi warga)
      - Penguatan regulasi melalui peraturan kampung
      - Optimalisasi kinerja RT
   b. Pengolahan dan pemasaran poduk hasil laut
      - Perizinan produk UMKM, pengemasan, dan *labelling*
      - Pelatihan
      - Kerjasama pemasaran dengan BUMK
   c. Pengelolaan kawasan pariwisata

- Mendorong pemerintah supra kampung dalam perbaikan infrastruktur (terutama jalan)
- Promosi wisata
- Kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM
- Pengembangan pada ragam wisata budaya yang memperkuat potensi SDA.

8. Mengkaji peluang pengembangan kelembagaan kampung, yang memungkinkan delegasi urusan dan kewenangan kepada lembaga kampung.
9. Memperkuat penataan kelembagaan BUMK, termasuk penyesuaian dengan PP No. 11/2021.
10. Menetakan standar pengelolaan bisnis BUMK, dimulai dari tahap perencanaan melaui penyusunan studi kelayakan, setiap akan mengajukan rencana usaha.

5.3.14 Biatan Bappinang

Waktu : 28 - 29 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Biatan Bappinang

Fasilitator : Aditya Mahendra Putra

5.3.14.1 Isu Kunci Perubahan

Hal pertama yang dapat dipotret adalah pola pemerintahan yang masih sempit. Ruang pelayanan pemerintah kampung terhadap warganya masih sebatas pelibatan dalam pembangunan infrastruktur kampung dan pelayanan administratif. Bagai dua sisi mata koin, pun partisipasi warga nampak tidak bergerak.

Kedua, pengelolaan informasi dan data kampung masih belum optimal. Pengelolaan *website* kampung tidak diletakkan pada penugasan rutin yang disematkan pada individu atau lembaga kampung. *Updating* konten tidak berjalan, dan hal ini diperparah dengan fakta bahwa *website* yang dimiliki kampung saat ini tengah ter *banned* karena tunggakan tagihan. *Website* tersebut dikembangkan oleh pihak lain diluar kampung, namun pada prosesnya tidak terjadi alih pengetahuan dan tehnologi memadai guna menjamin keberlangsungan operasionalisasi *website* kampung.

Ketiga, pengelolaan BUMK yang belum memadai, potensi wisata air panas di Biatan Bappinang sebenarnya cukup prospektif mengingat lokasinya tidak jauh dari jalan poros provinsi. Namun kurangnya sisi manajerial serta relasi antara BUMK dengan kelompok pengelola wisata belum tertata baik, sehingga akuntabilitas pengelolaan wisata patut dipertanyakan.

Keempat, persoalan ijin pengelolaan kawasan wisata air panas seluas 12 hektar yang melingkupi 2 wilayah kampung; Biatan Bappinang dan Tabalar Muara. Saat ini hak pengelolaan masih dalam kendali Dinas Pariwisata Berau. Pada prosesnya, saat ini Pemerintah Kampung Biatan Bappinang sedang mengajukan ijin pengelolaan wisata air panas untuk dikelola kampung melalui BUMK.

5.3.14.2 Prioritas Program Strategis

Selain penggalian atas isu kunci perubahan, hari pertama konsultasi lebih ditekanakan pada diskusi terarah penentuan program strategis untuk menjawab tantangan perubahan yang dipetakan.

Soliditas pemerintah kampung dalam berbenah patut diacungi jempol, militansi dalam memperjuangkan hak pengelolaan wisata dilakukan melalui berbagai pintu.

Pun visi penerapan sistem informasi dan data yang saling terkoneksi sudah terbayangkan guna efisiensi waktu kerja dalam memberikan pelayanan administratif bagi warga kampung. Bila otomiatisasi layanan dapat berjalan, maka pemerintah kampung dapat mengalokasikan energinya untuk menginisiasi hal – hal strategis, sekaligus menstimulasi partisipasi warga.

Berdasar pada isu strategis yang dipetakan serta memperhatikan kebutuhan – kebutuhan Biatan Bappinang, maka ide yang dapat disararikan dalam proses ini adalah:

1. Insiasi penerapan Sistem Informasi dan Data (SID) kampung. Termasuk melingkupi penyediaan *software (*aplikasi), *hardware* (jaringan), dan personil pengelola sistem informasi dan data kampung.
2. Strategi kultural untuk memantik partisipasi warga, terutama menyasar kaum muda.
3. Model perencanaan pengelolaan wisata air panas oleh BUMK. Termasuk didalamnya bagaimana skenario kerjasama antar kampung, tata relasi BUMK dengan kelompok pengelola wisata, serta perencanaan keuangan.

5.3.14.3 Penyepakatan Penyelesaian

Agenda hari kedua konsultasi adalah pendetilan atas program strategis yang diwacanakan pada hari pertama, meliputi *resource mapping,* serta pembagian peran antar pihak sebagai komitmen tindak lanjut pertemuan ini.

Beberapa simpulan atas prioritas program strategis yang disepakati sebelumnya adalah:

1. Inisiasi penerapan SID, pemerintah kampung akan mengalokasi anggaran tahun depan guna pembelian *portable tower,* serta alokasi untuk membangun sistem aplikasi.
2. Pemerintah kampung memandang masih diperlukannya pendampingan penguatan kapasitas datakrasi, yakni bagaimana mengelola data, mengolah, hingga membaca data sebagai acuan perencanaan pembangunan kampung.
   Berkaca dari pengalaman sebelumnya, bahwa tanpa kapasitas yang memadai, maka informasi dan data tidak akan berguna apa – apa bagi kampung.
3. Sekretaris kampung akan mendirikan "ruang inovasi" yang dikemas dalam bentuk kafe, sebagai medium berkumpulnya pemuda, berdiskusi tematik dalam berbagai bidang ketertarikan, yang pada akhirnya akan dimobilisasi untuk bersama membangun kampung. Konsep dan *prorotype* desain kafe sedang dikembangkan. Hal ini cukup strategis mengingat ketiadaan tempat berkumpul bagi pemuda di Biatan Bappinang. Dengan strategi kultural ini, harapannya akan muncul pemuda – pemuda sebagai *agent of chage*.
4. Simulasi analisa kelayakan usaha BUMK dijadiakan dasar dalam merapikan struktur dan tata kelola BUMK, perencanaan keuangan, remunerasi, hingga kebijakan alokasi penyertaan modal dari kampung

5.3.15 Biatan Lempake

Waktu : 28 - 29 Mei 2021

Tempat: Kantor Kampung Biatan Lempake

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Ahmad Musyaddad

5.3.15.1 Isu Kunci Perubahan

Isu kunci utama yang dipotret dari Biatan Lempake adalah bagaimana masa depan Kampung Biatan Lempake pasca sawit. Tahun-tahun ini dan beberapa tahun kedepan Biatan Lempake masih akan berada pada fase menikmati kajayaan sawit. Artinya proses konsultasi ini lebih diarahkan pada *envisioning* Biatan Lempake pasca sawit menjadi titik penting yang dibahas. Konsekuensinya adalah bagaimana membangun kapasitas anak - anak muda yang berada di kampung Biatan Lempake mampu beradaptasi dengan dunia baru.

Kedua, data masih menjadi persoalan. Kampung telah memiliki data hasil berbagai survey yang telah dilakukan untuk kepentingan IDM, BKKBN, SDGs Desa, dan berbagai survei yang lain. Semuanya sudah didokumentasikan dalam bentuk Profil Desa.

Namun menempatkan data, mencermati detail persoalan, dan membaca data belum dilakukan secara holistik. Kelemahan dalam, membaca, menganalisis, dan menjadikan data sebagai sumber pengambilan kebijakan tampak belum terlihat. Sistem informasi yang masih sebatas *website* profil tidak terkelola dengan baik. Web dibangunkan oleh pihak lain dan tidak terjadi *updating* informasi.

Ketiga, mobilisasi peran pemuda yang jumlahnya 40-50% dari total penduduk belum dilakukan secara optimal. Artinya kapasitas sosial dengan memanfaatkan demografi kaum muda belum berjalan.

Keempat, tidak cukup ada inovasi pemerintahan yang memungkinkan warga terlibat dalam pelaksanaan kewenangan kampung. Tidak tersedia lembaga desa, diluar yang diperintahkan undang-undang, yang mampu melaksanakan pelayanan barang dan jasa publik di desa. Artinya keterlibatan warga dalam pembangunan ditingkat kampung masih kecil. Kekuatan anak muda akan menjadi kunci bagi Biatan Lempake untuk menatap masa depan. Anak-anak muda yang senang berkumpul dan berdiskusi menjadi potensi penggerak Biatan Lempake masa depan.

Sementara itu isu kunci yang ditemukan dalam tata kelola BUMK Biatan Lempake yang pertama adalah kapasitas pengelolaan BUMK belum memahami secara utuh terkait proses bisnis yang dilakukan oleh BUMK. Hal ini berakibat pada lemahnya kapitalisasi pengelolaan usaha. Penyewaan lapangan futsal yang menjadi usaha utama BUMK masih dikelola dengan sangat sederhana.

Kedua, tidak tersedia perencanaan usaha yang komprehensif untuk unit-unit usaha yang didirikan BUMK. Akibatnya lapangan futsal masih sebatas penyewaan saja. Akibatnya usaha yang dilakukan masih meraba - raba dalam pelaksanaan usahanya, dan belum terpikirkan untuk melakukan perluasan usaha guna meningkatkan pendapatan BUMK.

Ketiga, terkait mekanisme insetif dan gaji pengurus BUMK, isu ini mengemuka selama diskusi. Ketiadaan pendapatan tetap bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK berjalan lamban. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup No 61 tahun 2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya memperoleh insentif tahunan dari prosentase pendapatan BUMK. Hal ini berdampak pada kurangnya fokus pengelola BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan tetap bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dijadikan pekerjaan sampingan.

5.3.15.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci dua hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk terus didiskusikan dan disimulasikan pada hari kedua baik terkait tata kelola pemerintahan kampung, termasuk didalamnya adalah data, maupun tata Kelola bada usaha milik kampung. Beberapa prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas penting dalam kemandirian desa adalah membangun kapasitas sosial warga, terutama pemuda yang jumlahnya hampir 50% dari total jumlah penduduk.
2. Reformasi birokrasi, terutama upaya membangun hubungan baru antara pemerintah kampung dan warga kampung tampaknya menjadi isu sentral. Perubahan kultur birokrasi penting untuk dilakukan sebagai jalan pesan bahwa

pemerintahan kampung sedang menuju perubahan.

3. Pengelolaan sistem informasi kampung, akan mulai dirancang. Sekaligus upaya menyambut target pemerintah kabupaten bahwa tahun 2023 kampung - kampung di Berau sudah menerapkan digitalisasi. Layanan berbasis digital mulai dilakukan, namun masih harus terus dioptimalkan.
4. Program strategis BUMK adalah simulasi dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. *Business Model Canvas* akan menjadi acuan bagi BUMK untuk mencermati ulang operasional unit usaha.
5. BUMK perlu melakukan diversivikasi usaha, dengan memperluas layanan usaha, bukan hanya sebagai penyewaan tempat futsal, tetapi dilengkapi dengan *venue* berkumpulnya anak muda untuk menjadi ruang kerja "santai", pertukaran gagasan dan ide inovatif. Ruang inovasi perlu dibangun guna mewadahi pemuda untuk berkomunitas dan menghasilkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif.

Proses menarik yang dilakukan selama dua hari ini adalah membangun dan mengoptimalkan peran pemuda sebagai motor perubahan, terutama transisi kampung pasca sawit.

Peserta mampu mengimajinasikan Biatan Lempake masa depan sebagai kampung yang mandiri, berdaya saing, kampung yang ramah lingkungan dan berkalanjutan. Anak-anak muda yang menjadi perangkat kampung dan menempati posisi strategis di BUMK meyakini bahwa masa depan harus disiapkan dengan pelan tapi pasti. Sembari menikmati hasil sawit yang masih bergelimang, anak-anak muda lempake menyiapkan ruang inovasi untuk beradaptasi dengan dunia baru masa depan, terutama pasca sawit.

5.3.15.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh pemerintah kampung dan BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan *stakeholder* (Pemkam, BPK, dan BUMK) yang terlibat dalam forum ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kampung akan terus berusaha mengagregasi kapasitas sosial warga terutama anak muda untuk bersama membangun kampung Biatan Lempake. Model *piloting* program akan dijalankan, mengajak akan muda adalah dengan menambahkan ruang inovasi anak muda di area lapangan futsal.
2. BPK akan didorong lebih produktif dalam mengeluarkan peraturan kampung untuk membantu pelaksanaan pembangunan terutama perekonomian desa menjadi lebih maju, maupun regulasi - regulasi untuk mengamankan jalan kampung yang dilalui kendaraan sawit dari perusahaan.
3. Memastikan reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan kepada warga masyarakat kampung bisa berjalan dengan baik, melalui penerapan system informasi desa. Optimalisasi system informasi yang telah dibangun menjadi bagian penting untuk ditindaklanjuti guna memastikan terwujudkan kampung digital. Memastikan pengelolaan data melalui sistem informasi desa terkelola dengan baik dengan aplikasi dan sistem *web*.
4. Peningkatan kapasitas datakrasi mulai dari membaca, menganalisis dan merumuskan kebijakan pemerintahan desa berbasis data akan menjadi bagian penting yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

5. Pelembagaan partisipasi warga kampung akan didiorong sebagai upaya pelibatan warga dalam pengelolaan kewenangan, terutama membentuk lembaga desa pengelola sisem informasi desa.

5.3.16 Pilanjau

Waktu : 31 Mei – 1 Juni 2021

Tempat: Kantor PKK Pilanjau

Fasilitator : Ahmad Musyaddad

5.3.16.1 Isu Kunci Perubahan

Pilanjau adalah kampung di kawasan eks pabrik PT Kiani Kertas. Setelah pabrik berhenti beroperasi, sebagian mantan pegawai yang sebelumnya tinggal di perumahan perusahaan, menetap di kampung ini. Baru sekitar dua tahun terakhir, perubahan fisik prasarana kampung Pilanjau terihat nyata, terutama sejak pengaspalan jalan kampung, terpasangnya jaringan listrik, dan tersedianya jaringan internet. Sisa persoalan prasarana adalah kemudahan akses penyediaan air bersih yang sejauh ini dicukupi melalui usaha warga untuk pengisian air *profil tank* (mandi dan cuci) dan usaha air bersih untuk konsumsi makan minum oleh BUMK.

Fokus perbaikan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan administrasi dan penyediaan kebutuhan hidup dasar warga terlihat paling menonjol di Pilanjau. Perluasan pelayanan dilakukan dengan menyasar sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga, terutama dengan pelibatan PKK. Ini memungkinkan tumbuhnya keswadayaan warga, salah satunya program saling berbagi antarwarga yang diwadahi dalam Pilanjau Peduli.

Pilanjau adalah contoh kreatif bagaimana menyambungkan antara perbaikan kualitas pelayanan publik dan kapasitas sosial warga. Delegasi sebagian urusan kepada PKK, efektif untuk menggerakkan warga, terutama menyasar keterlibatan kelompok perempuan. Salah satunya, ditandai keberhasilan menjadi juara I lomba TOGA tingkat Provinsi Kaltim. Prestasi ini mengantar warga terus mengaktifkan kebun-kebun TOGA dan kreativitas membuat produk olahan turunannya. Pilanjau telah menjadi tujuan studi banding dari kampung lain untuk pengelolaan TOGA.

Berbagai inisiatif kreatif warga memang belum tersambung baik dengan dampak ekonomi. Umumnya, faktor kecermatan terhadap berbagai data potensi yang telah dihimpun pemerintah kampung, belum diolah untuk menemukan berbagai peluang, baik perbaikan pelayanan publik maupun usaha BUMK. Pada BUMK, peluang menemukan ide bisnis dari berbagai data ini belum muncul. Sejauh ini, BUMK masih terfokus pada usaha penyediaan air bersih. Usaha ini dipilih karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dicukupkan.

Kinerja BUMK, ditilik dari sisi benefit relatif memuaskan. Jasa penyediaan air galon BUMK diakses sekitar 80% rumah tangga di kampung. Dari sisi profit, laba BUMK memang masih tipis. Keterbatasan utama pada efisiensi operasional karena kualitas sarana terlihat sangat membebani (kondisi kapal dan mesin). Tantangan sebenarnya justru muncul pada keberlanjutan usaha ini di waktu mendatang, terutama pada sisi kesejahteraan pengelola BUMK yang dalam formulasi regulasi daerah, kurang mempertimbangkan insentif memadai bagi pengelola.

5.3.16.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa hal penting:

1. Berbagai jenis data yang ada di kampung belum diolah sehingga dapat membantu memperkuat kualitas pelayanan administrasi publik, termasuk pengelolaan/ pemrosesan data bagi

perencanaan kebijakan pemkam dan menemukan peluang bisnis bagi BUMK.

2. Prestasi sebagai juara I lomba TOGA tingkat Provinsi Kaltim belum dicermati sebagai keunggulan kampung untuk diaktualisasi secara programatik sebagai peluang pengembangan pengetahuan, produk warga, dan bisnis BUMK.
3. Unit usaha penyediaan air bersih oleh BUMK sangat bermanfaat sebagai solusi masalah warga, namun bisa "terancam" keberlanjutannya karena sistem insentif kesejahteraan bagi pengelola dinilai kurang memadai.
4. Sistem perencanaan usaha BUMK belum didasarkan pada kejelasan nilai, proses bisnis, dan kelayakan usaha.

5.3.16.3 Penyepakatan Penyelesaian

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa poin penting:

1. Perlunya sistem informasi kampung yang dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus membantu pemrosesan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan oleh Pemkam dan menemukan peluang bisnis bagi BUMK.
2. Menemukan identitas pembeda yang khas dari keunggulan Kampung Pilanjau yang dapat menggerakkan fokus kebijakan Pemkam dan bisnis BUMK. Melalui simulasi, keunggulan Pilanjau sebagai kampung TOGA diformulasikan dengan ide kreatif bertema kebugaran, kesehatan, dan kecantikan alami melalui produk TOGA. Dari sini, fokus kebijakan Pemkam dan peluang usaha penyediaan barang dan/ atau jasa BUMK diletakkan.

   Operasionaslisasi pengembangan ide tentang kampung juara TOGA dilanjutkan dengan mensimulasikannya dalam BMC, yang poin utamanya sebagai berikut:

   a. Pilanjau adalah kampung yang dikenalkan sebagai kampung kebugaran, kesehatan, dan kecantikan alami dengan bahan-bahan herbal tradisional.
   b. Segmen pasar yang dibidik adalah perempuan dan ibu muda (kecantikan alami), masyarakat dengan riwayat kesehatan tertentu dan ingin menjalani pengobatan dari bahan herbal alam (kesehatan), dan pria atau bapak-bapak (kebugaran).
   c. Berbagai jenis produk barang dan jasa yang yang ditawarkan mulai dari jamu (cair, bubuk). bahan baku dan olahan makanan/ minuman sehat dengan bahan herbal alam (tepung, kue, mie, sirup), minyak urut, masker/ bedak dingin, produk aroma terapi, sampai dengan jasa pemijatan *accupressure*. Berbagai produk ini telah tersedia/ diproduksi namun belum dioperasionalkan sebagai bisnis.
   d. Pengenalan berbagai produk dilakukan melalui media informasi dan promosi online dan offline (katalog, media sosial, *event,* serta menyasar ecara khusus lembaga penyedia layanan kesehatan).
   e. Sumberdaya yang dioptimalkan agar upaya ini berjalan dilakukan dengan menggerakkan kebijakan aktivasi produksi bahan TOGA baik skala kebun maupun pekarangan. Selain itu, fasilitasi perizinan usaha dan produk barang atau jasa yang diusahakan oleh warga.
   f. Pengembangan kemitraan diperluas tidak terbatas pada warga dan lembaga pemerintahan terkait, namun juga lembaga swasta terkait, NGO, maupun Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dinilai penting

sebagai bagian dari kebutuhan riset dan pengembangan produk.

g. Upaya membangun kedekatan dan keterikatan dengan target konsumen diletakkan dengan upaya menjaga kualitas produk dan mengelola data konsumen (rasional) dan menyentuh sisi emosional seperti keramahan, kombinasi penjualan dan sebagian keuntungan untuk sedekah, teknik promosi mulut ke mulut (testimoni), hingga strategi *endorser.*

h. Upaya meraih pendapatan digali melalui laba penjualan produk (produk terkait langsung maupun *souvenir*) dan biaya jasa (*accupressure*, pelatihan).

3. Memperkuat layanan BUMK dalam unit usaha penyediaan air bersih dengan perbaikan sistem operasional pelayanan dan upaya advokasi kebijakan yang memungkinkan perbaikan sistem insentif kesejahteraan bagi pengelola.
4. Penguatan sistem perencanaan usaha BUMK yang didasarkan pada kejelasan nilai, proses bisnis, dan kelayakan usaha. Proses ini perlu didahului dengan penyesuaian badan hukum dari BUMK berdasarkan PP No. 11/2021.

5.3.17 Semurut

Waktu : 31 Mei – 1 Juni 2021

Tempat: Kantor Kampung Semurut

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Aditya Mahendra Putra

5.3.17.1 Isu Kunci Perubahan

Isu kunci utama yang dihadapi Semurut adalah akses listrik dan jaringan informasi. Belum tersedia jaringan listik yang baik, demikian pula jaringan internet untuk membangun komunikasi antar warga. Dua hal ini adalah persoalan mendasar yang dialami Semurut, kampung yang mengandalkan sector pertanian dan perikanan.

Kedua, dalam pelayanan pemerintahan masih terjebak pada urusan administratif. Dalam beberapa diskusi target surat 500 - 750 surat masih menjadi target yang ingin dicapai oleh pemerintah kampung. Mencermati ini tentu relasi pemerintah kampung dengan warga masih sebatas hubungan administratif.

Ketiga, kantor desa belum sepenuhnya operasional, meskipun jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya sudah ada peningkatan. Kantor desa beroperasi hanya senin hingga kamis. Nilai lokal yang ada menjadikan hari jumat sebagai hari ibadah yang seluruh aktivitas pemerintahan maupun pekerjaan warga harus berhenti, nelayan tidak melaut.

Keempat, data tampaknya belum menjadi isu penting bagi pemerintah kampung. Apalagi jika bicara tentag system informasi desa.

Sementara itu isu kunci yang ditemukan dalam tata kelola BUMK adalah pengurusan perijinan galian C. Upaya pengajuan masih terus dilakukan, meskipun belum menemukan titik terang karena terkendala masalah biaya.

Kedua, kapasitas pengelolaan BUMK belum memahami secara utuh terkait proses bisnis yang dilakukan. Tidak tersedia studi kelayakan usaha untuk unit - unit usaha yang didirikan BUMK. Akibatnya tidak diperoleh gambaran proyeksi pendapatan yang bisa diperoleh dari unit usaha.

Ketiga, terkait insetif dan gaji bagi pengurus BUMK, isu ini mengemuka selama diskusi. Ketiadaan pendapatan tetap bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK tidak berjalan. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup.61/2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya memperoleh insetif tahunan dari prosentase pendapatan BUMK. Hal ini berdampak pada kurangnya fokus pengelola

BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan tetap bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan.

5.3.17.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci dua hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk terus didiskusikan dan disimulasikan pada hari kedua baik terkait tata kelola pemerintahan kampung, termasuk didalamnya adalah data, maupun tata kelola badan usaha milik kampung. Beberapa prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas penting dalam waktu dekat adalah upaya menyediakan jaringan listrik di kampung sekaligus memastikan jaringan internet bisa diakses oleh warga Semurut secara keseluruhan.
2. Reformasi birokrasi, terutama upaya membangun hubungan baru antara pemerintah kampung dan warga kampung tampaknya menjadi isu sentral. Perubahan kultur birokrasi penting untuk dilakukan sebagai jalan pesan bahwa pemerintahan kampung sedang menuju perubahan. Tidak lagi sekadar layanan administratif tetapi memastikan bahwa seluruh hajat hidup warga menjadi urusan pemerintah kampung.
3. Pengelolaan sistem informasi kampung akan mulai dirancang, begitu jaringan listrik dan internet mulai memasuki kampung. Sekaligus upaya menyambut target pemerintah kabupaten bahwa tahun 2023 kampung - kampung di Berau sudah harus menerapkan digitalisasi.
4. Program strategis BUMK adalah bersama pemerintah kampung mengurus perijinan galian pasir C di sungai Semurut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumberdaya yang dimiliki kampung tidak diambil alih oleh pihak luar, terutama perusahaan.
5. Program strategis untuk BUMK adalah mensimulasikan dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. Sekaligus memetakan kemungkinan memberikan gaji tetap bulanan untuk pengurus BUMK, agar lebih fokus dalam menjalankan dan mengembangkan unit usaha.
6. BUMK perlu melakukan intensifikasi usaha, dengan memperluas cakupan pasar, bukan hanya melayani pembangunan di kampung Semurut, tetapi menyediakan layanan pada kampung-kampung sebelahnya.

5.3.17.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh pemerintah kampung dan BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan *stakeholder* (Pemkam, BPK, dan BUMK) yang terlibat dalam forum ini adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Kampung:

1. Pemerintah kampung akan mendorong pemasangan jaringan listrik dan jaringan internet desa untuk memastikan layanan dasar bagi masyarakat kampung.
2. BPK akan didorong lebih produktif dalam mengeluarkan peraturan kampung untuk membantu pelaksanaan pembangunan kampung.
3. Memastikan reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan kepada warga masyarakat kampung bisa berjalan dengan baik, termasuk didalamnya memastikan layanan dasar warga terpenuhi.
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan data mulai dari membaca, menganalisis dan merumuskan kebijakan pembangunan berbasis data akan menjadi bagian

penting yang akan ditindak lanjuti, meskipun pengelolaan masih manual.

Badan Usaha Milik Kampung:

5. Bersama dengan pemerintah kampung mengurus perijinan galian C.
6. Meningkatkan promosi penyediaan material bangunan pada kampung sekitar dan mengintensifkan produksi pasir untuk peningkatan pendapatan BUMK sekaligus upaya mengatasi pendangkalan sungai.
7. Memastikan studi kelayakan usaha untuk unit usaha yang tengah berjalan. Mengingat belum pernah sekalipun kajian tentang potensi dan kelayakan usaha dilakukan, meskipun sering mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait BUMK.
8. Memastikan penyesuaian AD/ART terkait BUMK dengan PP 11 tahun 2021 sekaligus sebagai upaya untuk pemenuhan syarat badan hukum BUMK.

5.3.18 Tanjung Batu

Waktu : 2 - 3 Juni 2021

Tempat: Kantor Kampung Tanjung Batu

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Ahmad Musyaddad

5.3.18.1 Isu Kunci Perubahan

Isu kunci yang ditemukan dalam tata kelola BUMK Tanjung Batu yang *pertama* adalah membangun sistem wisata dengan memanfaatkan ketenaran pulau derawan. Upaya memanfaatkan keternawaran Pulau Derawan untuk menarik remah - remah wisatawan di Tanjung Batu dirasa penting, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Tanjung Batu. Ekosistem penting dibangun untuk mengangkat Tanjung Batu dalam gugus kawasan wisata Derawan.

Kedua, belum munculnya karakteristik menonjol yang ditawarkan oleh BUMK Tanjung batu untuk pengelolaan sektor wisata.

Ketiga, isu penting lainnya adalah kurangnya dukungan dari Pemkam terhadap BUMK dalam bentuk pendampingan. Hal ini penting mengingat saran, pendampingan, dan penguatan BUMK oleh Pemerintah kampung sangat kecil perannya.

Keempat, pengelola BUMK belum memahami secara utuh proses bisnis yang dilakukan. Hal ini berakibat pada lemahnya kapitalisasi pengelolaan usaha. Tidak tersedia studi kelayakan usaha untuk unit-unit usaha yang didirikan, akibatnya tidak diperoleh gambaran berapa potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Kelima, proses bisnis rumit yang diimplementasikan BUMK yang memiliki beberapa unit usaha: wisata bakau, air, dan lahan parkir. Sejauh ini baru unit usaha wisata bakau yang memiliki pengelola. Dua lainnya masih dipegang oleh direktur BUMK tanpa ada kejelasan pengelolaan dan pembagian penghasilan.

Ketiga, terkait insetif dan gaji bagi pengurus BUMK, isu ini mengemuka selama diskusi. Ketiadaan pendapatan tetap bulanan bagi pengurus BUMK diyakini menjadi persoalan utama kenapa BUMK tidak berjalan. Persoalan ini setidaknya didasari dua hal: 1). Cara membaca Perbup.61/2019 yang ditafsirkan bahwa pengurus BUMK hanya memperoleh insetif tahunan dari prosentase pendapatan BUMK. Hal ini berdampak pada kurangnya fokus pengelola BUMK. 2). Karena tidak memperoleh pendapatan tetap bulanan berupa gaji, maka pengelolaan BUMK hanya dipandang sebagai pekerjaan sampingan.

5.3.18.2 Prioritas Program Strategis

Selama proses dua hari fasiltiasi, dari sekian isu kunci, hal yang kemudian dicermati secara lebih detail untuk terus didiskusikan dan disimulasikan pada hari kedua terkait tata kelola badan usaha milik kampung adalah sebagai berikut:

1. Simulasi dan menata ulang bisnis BUMK yang tengah dijalankan. Bisnis Model Canvas akan menjadi acuan bagi BUMK untuk mencermati ulang tata kelola unit usaha. sekaligus memetakan skenario gaji bulanan untuk pengurus BUMK, agar fokus dalam menjalankan dan mengembangkan unit usaha.
2. Membangun branding yang mampu menarik wisatawan, baik dari luar maupun dari Derawan. "Mendompleng" atau memanfaatkan ketenaran Derawan untuk menarik wisata ke Kampung Tanjung Batu.
3. Membangun komunikasi yang efektif antara BUMK dengan pemerintah kampung

5.3.18.3 Penyepakatan Penyelesaian

Setelah proses fasiltiasi dua hari, diakhiri dengan menyusun rumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan yang tengah dialami oleh BUMK. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BUMK adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan BUMK sekaligus memperjelas unit-unit usaha yang ada.
2. Penguatan *branding* wisata Tanjung Batu sebagai "Kampung Wisata Pesisir Laut Suku Bajau"
3. Memastikan studi kelayakan usaha untuk unit usaha yang tengah berjalan. Mengingat belum pernah sekalipun kajian tentang potensi dan kelayakan usaha dilakukan, meskipun sering mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait BUMK.
4. Memastikan penyesuaian AD/ART terkait BUMK dengan PP 11 tahun 2021 sekaligus sebagai upaya untuk pemenuhan syarat badan hukum BUMK.
5. Melakukan inventarisasi pelaku usaha calon mitra BUMK untuk peningkatan pengelolaan wisata.
6. Membangun komunikasi dan kesepakatan dengan pemerintah kampung terkait penggunaan dana sosial melalui BUMK. Termasuk pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kampung akan didalami agar mampu membangun visi "Kampung Wisata Pesisir Laut Suku Bajau".

5.3.19 Teluk Harapan

Waktu : 3 – 4 Juni 2021

Tempat: Kantor Kampung Teluk Harapan

Fasilitator : Aditya Mahendra Putra

5.3.19.1 Isu Kunci Perubahan

Hal menarik dan yang paling membedakan dalam penyelengaraan konsultasi ini dibandingka dengan peyelenggaraan di kampung lain adalah cakupan peserta. Pulau Maratua yang terletak di sisi timur laut Kabupaten Berau, adalah kecamatan yang hanya terdiri dari 4 kampung dengan jarak yang relatif berdekatan. Maka Camat Maratua menginstruksikan kepada 4 kampung tersebut untuk hadir terlibat dalam 2 hari kegiatan ini.

Tingginya konversi ekonomi di Maratua mengakibatkan lemahnya kapasitas sosial warga dalam upaya membangun kampung.

Sumber daya utama yang dapat dijadikan motor pembangunan adalah kekayaan potensi hasil laut (ikan) dan potensi wisata Maratua yang pamornya mendunia. Potensi – potensi tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Maratua.

Beberapa potensi wisata yang ditawarkan adalah keindahan pantai *(resort)*, wisata *diving, snorkling,* danau ubur – ubur, dan ragam wisata gua alam.

Namun hal - hal tersebut seakan menyimpan bom waktu.

Pertama, isu kepemilikan lahan. Setiap tahun kepemilikan lahan di Pulau Maratua dan pulau – pulau kecil di sekitarnya beralih ke tangan penduduk luar Maratua.

Kedua, konflik antara nelayan dengan pemilik *resort* tentang area tangkapan ikan di sekitar *resort.* Pemilik *resort* beranggapan aktivitas yang dilakukan nelayan "mengganggu mata" wisatawan.

Ketiga, banyaknya intervensi program yang dilakukan berbagai pihak, dan mayoritas bersifat hibah barang. Tanpa adanya upaya penguatan – penguatan kapasitas maka hibah tersebut tidak akan bernilai optimal. Program – program tersebut cenderung *"menina bobokkan"* masyarakat Maratua dalam upaya membangun kemandirian kampung dalam jangka panjang.

Keempat, konsepsi "kampung wisata" yang diimajinasikan setiap kampung umumnya menawarkan output produk dan/ atau layanan yang bersifat homogen. Hal ini diperparah dengan hibah barang yang diberikan kepada setiap kampung sama wujudnya. Ini semakin memperlebar berpotensi persaingan tidak sehat antar kampung.

Kelima, kapasitas pengelolaan BUMK yang belum memadai, potensi – potensi dan bantuan – bantuan yang didapat belum bisa dikonversi optimal dalam pendapatan BUMK. Hal ini diperparah dengan datangnya pandemi yang menghantam sektor wisata Maratua.

5.3.19.2 Prioritas Program Strategis

Atas isu kunci perubahan yang dipetakan diatas, selanjutnya coba diformulasikan bersama dalam beberapa program strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

1. Mekanisme pengaturan, baik secara birokratis maupun cara kultural guna menyeimbangkan relasi kuasa antara pemerintah kampung dan pemilik *resort.*
2. Identifikasi remah – remah aktifitas wisata yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi BUMK. Beberapa ide yang muncul adalah aktifitas *guide,* penyediaan kafe, museum budaya Bajau, hingga toko oleh–oleh. Hal ini terkonfirmasi fakta di lapangan bahwa ketersediaan toko yang menyediakan oleh – oleh khas Maratua sangat sedikit dan menawarkan produk berkualitas rendah.
3. Mekanisme komunikasi antar BUMK di Maratua, serta kapasitas perencanaan bisnis yang jelas dan kuat, untuk menjamin kesaling terhubungan tata kelola dan proses bisnis antar unit usaha dalam BUMK di setiap kampung, dan meminimalisir jenis produk/ layanan yang homogen antar kampung.
4. Perlunya *piloting* sistem informasi desa di salah satu kampung di Maratua.

5.3.19.3 Penyepakatan Penyelesaian

Pendetilan atas program strategis yang diwacanakan melalui skenario – skenario programatik. Metode yang dilakukan mulai dari analisis situasi, *resource mapping* hinga pembagian peran antar pihak sebagai komitmen tindak lanjut pertemuan ini.

Beberapa simpulan atas prioritas program strategis yang disepakati sebelumnya adalah:

1. Pengelolaan sampah oleh BUMK dijadikan pintu masuk pemerintah kampung dalam bernegosiasi dengan pemilik *resort.*
2. Terkait inisiasi penerapan SID, pemerintah kampung Teluk Harapan

akan menggodognya lebih serius, bila memungkinkan akan memasukkan kedalam pos belanja APBKam tahun depan. Pun ketersediaan internet di Teluk Harapan lebih stabil dibandingkan 3 kampung lainnya.

3. Untuk mengambil remah – remah aktivitas wisata, sekaligus dalam rangka memperkuat konversi pasar dan meminimalisir persaingan antar BUMK, maka akan dibentuk BUMK bersama dengan unit usaha yang saling terintegrasi antar BUMK dengan BUMK, dan antar BUMK dengan UMKM di Maratua.
4. YSID memberikan simulasi analisa kelayakan usaha BUMK. Selanjutnya BUMK – BUMK di Maratua akan mengaplikasikannya ke dalam unit usaha mereka masing – masing. Ini akan dijadiakan dasar dalam merapikan proses bisnis, tata kelola, perencanaan keuangan, remunerasi, hingga kebijakan pengalokasian penyertaan modal dari kampung.

5.3.20 Maluang

Waktu : 4 - 5 Juni 2021

Tempat: Kantor Kampung Maluang

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Ahmad Musyaddad

5.3.20.1 Isu Kunci Perubahan

Kampung Maluang berada di kawasan ring 1 lingkar tambang batubara, tidak jauh dari pusat kota kabupaten (waktu tempuh ± 15-20 menit dengan kendaraan bermotor). Maluang mendapat prioritas sebagai salah satu penyedia tenaga kerja perusahaan, baik yang memiliki *skill* maupun non *skill.* Sektor tambang banyak diminati warga, khususnya warga usia muda.

Selain tambang, banyak warga bekerja di sektor pertanian. Komoditas umumnya adalah padi gunung (ladang) dan sayuran. Beberapa peternakan ayam petelur dan potong juga sudah diusahakan warga. Di luar sektor pertanian, produk yang sudah diserap baik oleh pasar adalah kerajinan batik.

Mirip dengan kampung lainnya, sisi menonjol penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Maluang juga umumnya masih bersandar pada pelayanan administrasi, yang dikerjakan secara konvensional. Bukan berarti sektor pembangunan lain tidak tersentuh, namun umumnya terlihat sebagai rutinitas alokasi program dan anggaran berdasarkan panduan regulasi penggunaan berbagai sumber anggaran. Dalam posisi ini, optimasliasi dsan inovasi terhadp keluasan kewenangan kampung memang kurang terlihat karena ekosistem pemampunya belum diolah. Salah satunya, hal pemanfaatan data yang dimiliki Pemkam. Namun, komitmen untuk terus membangun terlihat positif dari para pihak yang hadir dalam kegiatan ini.

BUMK Maluang memilih sektor usaha yang sebenarnya paling minim resiko, yaitu pengangkutan sampah warga dan penyediaan air bersih. Keduanya dipilih karena memang sesuai kebutuhan dan terhubung dengan kualitas pelayanan dasar. Proses bisnis yang ditekuni memang relatif sederhana. Pengelolaan sampah disubkontrakkan kepada pihak ketiga, dengan memposisikan BUMK sebagai pemungut retribusi. Dalam bisnis penyediaan air bersih, BUMK melayani pemesanan dari warga, meski memang kinerjanya masih jauh dari optimal.

5.3.20.2 Prioritas Program Strategis

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa hal penting:

1. Pengembangan sistem pelayanan berbasis sistem informasi kampung,

serta pemanfaatan data pengelolaan kebijakan kampung.

2. Kebutuhan menemukan prioritas pembangunan kampung sebagai muara dari pembangunan sektor pendukung lainnya, baik sebagai basis pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan maupun pengembangan bisnis BUMK.
3. BUMK belum memiliki kejelasan standar perencanaan bisnis, kapasitas mengelola proses bisnis yang efektif dan efisien, dan kejelasan akuntabilitas.

5.3.20.3 Penyepakatan Penyelesaian

Proses diskusi konsultasi ini menghasilkan beberapa poin penting:

1. Kebutuhan identifikasi, mendetilkan, dan mengoperasionalkan kewenangan skala lokal kampung, disertai mencari ruang kemungkinan delegasi sebagian kewenangan dalam pengelolaan urusan kampung kepada lembaga kampung.
2. Mengelola berbagai data yang sudah ada di kampung dalam satu sistem informasi kampung untuk memperkuat kualitas pelayanan dan memampukan tumbuhnya inovasi. Sistem informasi kampung sekaligus diposisikan sebagai sarana memperkuat sistem keterbukaan informasi.
3. Memperkuat kapasitas BUMK dalam mengoptimalkan kinerja unit usaha yang telah dijalani, baik dari sis perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas kinerjanya. Ini diberlakukan bagi unit usaha pengumpulan sampah dan penyediaan air bersih, diawali dengan menata dari sisi kajian kelayakan usaha.
4. Reorientasi fokus pembangunan kampung dengan meletakkan sektor pertanian sebagai, khususnya pada komoditas beras organik sebagai produk unggulan kampung. Keberadaannya didukung oleh penempatan sektor lainnya sbeagai penopang sektor pertanian. Formulasi gagasan ini ditopang oleh hal - hal berikut:

a. Melalui komoditas pertanian, Maluang dirancang sebagai kampung mandiri dan penyedia bahan pangan sehat, khususnya pada komoditas beras organik dengan benih lokal, baik beras putih, beras merah, dan beras hitam. Nilai pangan sehat dikombinasikan dengan kejelasan pihak yang memproduksi dan sistem produksinya (sampai kejelasan nama masing - masing produsennya).
b. Segmen pasar yang dibidik adalah masyarakat menengah yang memiliki kebutuhan dan tingkat kepedulian terhadap pangan sehat. Termasuk yang menjadi fokus adalah lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan (rumah sakit, klinik, dan sebagainya) dan perusahaan. Sejauh ini, segmen pasar pada masyarakat dengan riwayat kesehatan tertentu sudah mengakses produk beras Maluang pada jenis komoditas beras organik yang non beras putih.
c. Komoditas yang sudah tersedia stoknya selama ini adalah beras organik dengan benih lokal. Sedang untuk sayur mayur masih tercamur pupuk atau pestisida non-organik.
d. Media promosi produk dilakukan baik *online* maupun *offline*. Fokus offline ada pada lembaga penyedia layanan kesehatan dan warga dengan kebutuhan pangan khusus. Kerjasama penyediaan produk juga didesain agar bisa berbasis kontrak, termasuk dengan perusahaan.
e. Dukungan promosi juga dirancang dengan memanfaatakan berbagai

event rutin di kampung (terumata saat HUT Kampung) yang direformat menjadi festival terkait isu pertanian dan pangan sehat, mengikuti berbagai pameran, dan sebagainya.

f. Dukungan kepada pengembangan sektor pertanian dan pangan sehat juga dirancang dengan membuat berbagai produk olahan pangan sehat, produk - produk kerajinan seperti batik dengan tema pertanian, dan sebagainya.
g. Upaya membangun kedekatan dan keterikatan dengan target konsumen diletakkan dengan upaya menjaga kualitas produk dan menonjolkan kejelasan keberadaan pihak produsen dan sistem prouksinya. Ini digunakan untuk menyiasati posisi perizinan komoditas beras, yang meskipun diproduksi dengan cara organik, namun belum bersertiikasi.

5. Melakukan penyesuaian badan hukum BUMK berdasarkan PP No. 11/2021.

5.3.21 Sungai Payang

Waktu : 9 Juni 2021

Tempat: Kantor Kampung Sungai Payang

Fasilitator : Ryan Sugiarto
Aditya Mahendra Putra

5.3.21.1 Isu Kunci Perubahan

Kekuatan utama yang dimiliki oleh Sungai Payang terletak pada sosok kepala kampung dalam memanfaatkan segala peluang, serta memobilisasi jaringan diluar kampung. Namun aparatur pemerintah desa yang lain masih membutuhkan penguatan tentang transformasi birokrasi pemerintah desa, pelayanan minimal, dan penilaian kinerja.

Sistem informasi dan data belum menjadi bagian dari pengambilan kebijakan di tingkat desa. Data menjadi isu kunci yang tidak kalah penting untuk segera diselesaikan. Pernah digagas dan dibuat system informasi desa namun dalam pelaksanaannya tidak ada tim yang mengelola sistem informasi desa. Ketiadaan pengelola sistem informasi ini menyebabkan gagasan dan bentuk SID yang sudah diinisiasi berhenti dan tidak operasional. Namun pelaksanaan yang dibebankan pada staf pemerintah kampung masih kurang efektif untuk menjalankan operasional SID.

Yang membanggakan, capaian BUMK Sungai Payang telah maju dibandingkan desa-desa lain di Kalimantan Timur. BUMK Sungai Payang, telah berhasil membuat terobosan penting dengan menjalin kerjsama dengan beberapa perusahaan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian kampung. Pendapatan usaha BUMK pada tahun 2020 mencapai 7,83 Milyar.

Capaian ini menarik mengingat Sungai Payang satu dari sedikit desa-desa dilingkar tambang yang mampu mengelola peluang dari aktivitas tambang untuk kepentingan desa. Sementara ditempat lain tampaknya masih sebatas menerima gelontoran CSR untuk kepentingan - kepentingan personal.

5.3.21.2 Prioritas Program Strategis

Beberapa prioritas terkait tata kelola pemerintahan kampung adalah sebagai berikut:

1. Penilaian perangkat desa berbasis kinerja menjadi penting dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap apparat desa yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya memberikan *punishment* terhadap aparat pemerintah desa yang tidak bisa bergera untuk kemajuan desa.
2. Pengelolaan data dan informasi kampung, mengingat Sungai Payang telah dilirik banyak pihak untuk dijadikan lokasi studi banding.

5.3.21.3 Penyepakatan Penyelesaian

Beberapa rencana yang akan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

1. Memastikan reformasi birokrasi terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat kampung bisa berjalan efektif dan efisien, melalui penerapan sistem informasi desa. Penerapan sistem informasi yang telah dibangun menjadi bagian penting untuk ditindak lanjuti guna memastikan terwujudkan kampung digital.
2. Memastikan pengelolaan sistem informasi desa terkelola dengan baik dan terkoneksi secara *realtime* dengan sistem database desa.
3. Penggunaan data dalam pengambilan kebijakan dirasa penting untuk terus melahirkan inovasi - inovasi kreatif pemerintah desa. Sekaligus memastikan bahwa data diperbaharui.
4. Diperlukan system pendokumentasian pengetahuan dan praktik baik atas pengelolaan BUMK lingkar tambang sebagai basis pengetahuan pada desa - desa yang memiliki karakteristik mirip.

5.4 Paparan Akhir Program & Rencana Tindak Lanjut

Untuk lebih memperkuat komitmen lintas pihak sebagai tindak lanjut dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan, kami bingkai dalam penyelenggaraan paparan akhir program yang dilaksanakan dalam 2 klaster, yakni klaster *stakeholder* tingkat kampung dan klaster *stakeholder* tingkat kabupaten, yang juga dihadiri oleh Bupati Berau.

Paparan Akhir Program & Rencana Tindak Lanjut

Sasaran	Tempat	Tanggal	Narasumber 1	Narasumber 2
1 Klaster Kabupaten	Hotel Grand Parama, Tj. Redeb	5 Juni 2021	Wahyudi Anggoro H	Ryan Sugiarto
2 Klaster Kampung	Hotel Mitra, Tj. Redeb	7 Juni 20219	Wahyudi Anggoro H	Aditya Mahendra P

Gambar 24 Jadwal Paparan Akhir Program & Rencana Tindak Lanjut

Rangkaian kegiatan ini juga sebagai penanda akhir dari program Akademi Kampung Sigap fase 1 yang berlangsung antara Desemner 2020 – Juni 2021.

5.4.1 Paparan Program Terhadap Stakeholder Tingkat Kabupaten

Kegiatan yang dilaksanakan pada 5 Juni 2021 ini dihadiri oleh Bupati Berau, DPMK Berau, Koordinator Kabupaten Program Sigap Sejahtera, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Sanggar Inovasi Desa, Perwakilan Yayasan Nastari, dan Perwakilan Perkumpulan Perisai.

Gambar 25 Suasana Paparan Program Terhadap Stakeholder Kabupaten

Meningkatkan kapasitas desa dalam mendaya gunakan aset dan kewenangannya, juga berarti merangsang sistem pendukung di sekitarnya. Maka diperlukan pendekatan yang koheren dan tegas untuk memahami konteks hingga melakukan intervensi lanjutan dalam suatu sistem agar rantai nilai berfungsi efektif.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaparkan segala capaian, tantangan, peluang, hingga rekomendasi strategis yang telah diformulasikan oleh Yayasan Sanggar Inovasi Desa selama implementasi Program Akademi Kampung Sigap. Target utama program ini adalah untuk membentuk perspektif yang sama tentang bagaimana membentuk ekosistem kemandirian kampung di Berau. Langkah ini juga merupakan langkah strategis untuk menjamin setiap dukungan program yang ada saling terkoneksi, dan menjamin proses yang berkelanjutan.

Gambar 26 Paparan Capaian Program & Rekomendasi Tindak Lanjut oleh YSID

Selain paparan program yang disampaikan oleh YSID, dalam kesempatan ini Bupati Berau juga menegaskan pentingnya peran Program Sigap Sejahtera dalam merangsang tumbuh kembang kampung, baik dalam sisi tata kelola pemerintahan yang transformatif maupun sisi pendaya gunaan perekonomian lokal melalui BUMK.

Gambar 27 Bupati Memberikan Arahan Tindak Lanjut Strategis Program

Bupati menilai, pola replikasi yang ditawarkan dalam Akademi Kampung Sigap merupakan langkah nyata untuk mengakselerasi pembangunan Berau dari kampung melalui proses pembelajaran *peer to peer* antar kampung. Dalam paparan akhir program ini, diperoleh komitmen dari Bupati Berau tentang pentingnya keberlanjutan model Akademi Kampung Sigap sebagai upaya percepatan kemandirian kampung – kampung di Berau.

5.4.2 Paparan Program Terhadap Stakeholder Tingkat Kampung

Kegiatan yang dilaksanakan pada 5 Juni 2021 ini dihadiri oleh *stakeholder* Kampung Merabu, Talisayan, Labanan Makmur, Labanan Makarti, Campur Sari dan Bena Baru. Pejuang Sigap Sejahtera, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Sanggar Inovasi Desa, Perwakilan Yayasan Nastari, Perwakilan Perkumpulan Perisai dan Perwakilan Yakobi.

Diseminasi atas capaian, *lessons learned,* urgensi, hingga arah stategis perubahan yang telah terdokumentasi selama implementasi program akan sangat berimplikasi terhadap inisiatif kampung kedepan, serta daya dukung yang dibutuhkan. Para *stakeholder* di kampung membutuhkan informasi pengalaman praktik baik, pengaruh terhadap mereka, dan kemungkinan untuk replikasi model.

Gambar 28 Suasana Paparan Program Terhadap Stakeholder Tingkat Kampung

Penekanan utama dalam proses ini terletak pada penguatan kapasitas politik dan pemerintahan, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas sosial, dan kemampuan berjejaring dan mengadvokasi diri. Kepala kampung sebagai *stakeholder* utama di kampung perlu didorong untuk melakukan serangkaian upaya transformatif pembangunan di kampungnya. Namun, jika kapasitas politik dan pemerintahan kepala kampung yang kuat, jika tidak didukung oleh kapasitas proses dan birokrasi pada aparatur pemerintahan desa yang baik, tidak akan cukup mampu menjadi pengungkit perubahan kebijakan pembangunan di kampung.

Gambar 29 Peta Strategis Penguatan Tata Kelola Pemerintah Kampung

Proses ini berperan penting dalam membangun imajinasi bersama tentang kampung di masa depan, serta membangun pemahaman akan pentingnya data dan informasi kampung yang valid sebagai pedoman arah strategis kebijakan pembangunan kampung.

Di sisi lain, penguatan tata kelola BUMK juga disimulasikan. Keberadaan BUMK yang didirikan dalam rangka menjalankan sebagian fungsi pemerintah kampung. Artinya, apa yang dilakukan oleh BUMK

sejatinya merupakan bagian dari kewenangan dari pemerintah kampung yang oleh karena kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah kampung, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kampung, lembaga kemasyarakatan kampung maupun organisasi sosial kemasyarakatan kampung termasuk di dalamnya adalah BUMK.

Dengan konteks tersebut di atas, maka setidaknya BUMDes harus bisa dipandang dari setidaknya dalam tiga perspektif, yakni perspektif ekonomi, sosial, dan politik.

1. **Perspektif Ekonomi**

   Jika dipandang dari perspektif ekonomi, BUMK merupakan badan usaha atau sebuah institusi bisnis. Oleh karenanya, *entrepreneurship* digunakan sebagai basis analisis dalam memahami perilaku BUMK dalam menjalankan usahanya.

   Ukuran keberhasilan BUMK jika dipandang dari perspektif ekonomi adalah **profit** yang dihasilkan. Lebih spesifik lagi dapat dijabarkan dalam seberapa besar kontribusi usaha yang dijalankan BUMK, serta sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Kampung (PAK).

2. **Perspektif Sosial**

   Perspektif ini penting agar dalam menjalankan usahanya, BUMK tidak hadir sebagai pesaing bagi usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat kampung, akan tetapi harus memberikan daya ungkit bagi perkembangan usaha dan perekonomian warga. Pun kehadiran BUMK diharapkan dapat memantik tumbuhnya usaha – usaha baru yang dijalankan warga. Dengan demikian maka akan banyak warga yang terlibat dalam perputaran ekonomi di kampung.

   Sebagai lembaga desa yang menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa, BUMK harus juga berperan menghadirkan layanan negara kepada warga desa. Seperti misalnya BUMK hadir sebagai instrumen untuk membangun ketahanan sosial *(social security)* misalnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat yang berasal dari kelompok rentan. Dengan demikian, perilaku BUMK harus juga mencerminkan perilaku negara.

   Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMK, sedangkan perspektif sosial menjadikan **benefit** sebagai ukuran keberhasilannya. Benefit dapat diukur dari dua sisi. *Pertama*, benefit langsung, artinya berapa jumlah orang yang mendapat manfaat langsung atas adanya BUMK. *Kedua*, benefit tidak langsung, jumlah warga yang mendapat manfaat tidak langsung atas operasionalisasi unit usaha BUMK.

3. **Perspektif Politik**

   Perspektif ketiga yang bisa digunakan untuk memahami perilaku BUMK adalah perspektif politik, Keberadaan BUMK harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan kampung sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal. Di mana warga kampung dapat menjadi pemilik langsung atas usaha yang dikelola oleh BUMK.

   Menjadikan BUMK sebagai alat dalam rangka meningkatkan kemandirian kampung sekaligus menghadirkan layanan negara bukanlah sesuatu yang mustahil, jika saja kita senantiasa memandang BUMK dengan menggunakan tiga perspektif tersebut, karena memang demikianlah adanya.

   BUMK bukan hanya terbatas pada institusi usaha *an sich*, tetapi BUMK juga merupakan institusi sosial dan sekaligus institusi politik yang menjadikan desa sebagai sebuah arena demokratisasi ekonomi dan politik lokal.

6 REKOMENDASI STRATEGIS PEMAJUAN EKOSISTEM INOVASI KEMANDIRIAN KAMPUNG DI BERAU

6.1 POSISI PROGRAM SAAT INI

Pendirian Laboratorium Inovasi Kampung di Berau merupakan mimpi besar digulirkannya Akademi Kampung Sigap yang nantinya melahirkan kampung – kampung *champion* sebagai poros pembelajaran antar kampung dalam satu wilayah dan hub kerjasama. Secara umum, *milestone* program besar Akademi kampung Sigap terdiri dari 4 tahapan, seperti tergambar dalam ilustrasi berikut ini :

Gambar 30 Posisis Program Saat Ini

Dalam kurun waktu 6 bulan fase 1 program Akademi Kampung Sigap ini kami telah melakukan serangkaian aktivitas guna memetakan isu strategis perubahan, transfer pengetahuan, pendampingan perbaikan aspek – aspek teknis perubahan, hingga membangun inspirasi dan mimpi bersama. Pada tahap ini, proses *envisioning* tentang kampung masa depan menjadi menu utama program, sembari menggali kemungkinan – kemungkinan antusiasme kampung yang memiliki "bibit juara" untuk dinaikkan level pendampingannya melalui skema *sister village.*

Bila disandingkan dengan *grand design program*, secara umum proses yang kami jalani saat ini telah sampai pada desain arah strategis perubahan, baik pada level kampung yang telah kami sajikan pada sub bab "Cerita *Roadshow* 21 Kampung", maupun di level ekosistem makro (daerah), yang kami ulas pada bagian akhir "Strategi Keberlanjutan".

Kami menyadari, dalam perkembangannya, capaian – capaian setiap kampung dalam mengikuti program ini berbeda – beda, baik dari segi keterlibatan, transfer pengetahuan, maupun inspirasi/ mimpi masa depan yang muncul dari setiap kampung. Untuk itu, diperlukan pendekatan koheren dengan melaukuan mobilisasi segala sumber daya yang ada di Berau dalam upaya membangun kemandirian kampung. Selain intervensi langsung pada level kampung, diperlukan upaya – upaya penguatan terhadap ekosistem diluar kampung untuk mendorong perubahan sistemik guna menjamin keberlanjutan.

6.2 TEMUAN KUNCI

Keluasan ruang dan sumber daya, serta dukungan lintas pihak di Berau mencukupkan prasyarat bagi lahirnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi prasyarat tersebut tidak akan mampu terkelola dengan baik jika pemerintah daerah maupun pemerintah desa belum mampu menstimulasi ruang - ruang partisipasi bagi tumbuh dan kembang kemandirian kampung.

Sesuai ruh ideologis SIGAP - Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan – bahwa perubahan hendaknya diletakkan pada aksi kolektif warga untuk menemukan kekuatan, impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, menguatkan eksistensi diri sebagai komunitas atau warga kampung. Artinya kontekstualitas kelokalan yang menjadi sumber kekuatan di setiap kampung hendaknya menjadi perspektif utama dimana perubahan akan dimulai, baik dalam tata kelola pemerintahan kampung meupun tata kelola BUMK. Melihat kampung tidak dapat menggunakan kacamata tunggal. Pola perlombaan *single track* tidak lagi kontekstual dalam menilai keberhasilan suatu kampung.

Namun, bayangan ideal menjadikan kampung yang berdaulat penuh atas diri mereka sendiri bukanlah jalan mudah. Membayangkan kampung yang ideal, tidak serta merta terlepas dari peran positif ekosistem pendukungnya. Penjelasan dibawah merupakan rangkuman temuan kunci selama berjalannya program Akademi Kampung Sigap dalam 6 bulan ini.

Gambar 31 Ringkasan Temuan Kunci - Program Akademi Kampung Sigap

Permasalahan terkait lemahnya kapasitas pemerintahan kampung berimplikasi terhadap kurangnya inovasi kebijakan pembangunan kampung. Hal ini menjadi permasalahan mendasar yang harus segera ditangani. Sebab basis dan instrumen kapasitas ini merupakan pondasi penyusunan perencanaan strategis pembangunan, termasuk regulasi dan kebijakan alokasi anggaran. Sejatinya, pemerintah

kampung memiliki peran sental sebagai *"playmaker"* pembangunan kampung melalui fungsi regulasi, fasilitasi dan insentif.

Pun kurangnya kemampuan dalam mendaya gunakan kewenangan, aset, dan potensi yang dimiliki, mengakibatkan model relasi kewargaan yang hanya bersifat administratif. Pemaknaan pelayanan publik yang sempit inilah yang berakibat pada minimnya inovasi yang dilakukan dan kurang kontekstualnya berbagai kebijakan dan program yang dihasilkan. Selain itu, ada kecenderungan ketergantungan yang tinggi kepada pihak lain diluar kampung semakin memperkuat permasalahan dasar terkait lemahnya kedaulatan kampung. Permasalahan ini akan membuat desa berjarak dari latar belakangnya sendiri serta menjadi persoalan baru pasca penetapan Undang-Undang Desa.

Selaras yang terjadi dengan BUMK yang mayoritas masih jalan ditempat, permasalahan laten dan sistemik yang masih mencengkeram; keterburu – buruan. Ada kecenderungan pendirian BUMK, hingga penyertaan modal yang dilakukan hanya untuk menunaikan instruksi supra desa dan kental dengan nuansa imperatif. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan fakta mayoritas BUMK yang dijumpai tidak memiliki analisis dan perencanaan usaha yang jelas dan terkalkulasi.

Pengelolaan usaha yang "ala kadarnya" menyebabkan peluang dan potensi yang sedemikian besar dimiliki terhambur begitu saja, belum mampu terkonversi dalam pendapatan usaha. Modal utama mengkonversi potensi menjadi profit adalah *mindset enterpreneurship,* yang notabene masih rendah dimiliki oleh pengurus BUMK. Hal ini juga diperparah dengan isu kesejahteraan pengurus BUMK di Berau. Umumnya pengurus menjadikan BUMK hanya sebagai pekerjaan sambilan.

Kemiripan sumber daya (baik *tangible* maupun *intangible)*, peluang dan tantangan antar kampung dalam satu wilayah adalah keniscayaan. Imajinasi tentang membangun ekositem tata pemerintahan yang transformatif, pengelolaan sumber – sumber daya untuk membangun kemandirian ekonomi secara kolaboratif, hingga aktualisasi pengetahuan lokal melalui pemberkuasaan atas data dan informasi perlu terus didorong melalui kerja – kerja kolektif. Yang pada akhirnya akan terwujud kultur kebijakan arah strategis pembangunan berbasis bukti (data).

Disinilah peran strategis Akademi Kampung Sigap; mengkatalisasi peran lintas pihak dengan membuka ruang partisipasi disatu sisi serta meningkatkan kualitas partisipasi disisi lain.

6.3 PELUANG DAN TANTANGAN

Pada tahap ini kami juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif kesaling terikatan hubungan sebab – akibat, peta sumber daya/ aktor kunci, serta simpul – simpul sinergitas lintas pihak. Beberapa peluang dan tantangan yang dapat kita temukan pada tahap ini adalah:

6.3.1 Peluang - Sumber Daya Kunci

1. **Keluasan Ruang dan Potensi**
   Secara kasat mata, ruang dan potensi kampung – kampung di Berau yang sedemikan besar dapat dioptimalkan untuk menggerakkan sendi – sendi perekonomian di kampung.
2. **Kepatuhan**
   Kepatuhan pemerintah desa beserta aparatur dan lembaga desa terhadap aturan/ nomenklatur yang ada sangatlah tinggi.
3. **Program Sigap Sejahtera**
   Adanya program sigap sejahtera di seluruh kampung di Berau menjadikan percepatan pembangunan kampung di Berau sangat dimungkinkan, Hal ini dapat dilihat dari terdongkraknya IDM kampung – kampung di Berau.
4. **Kolaborator**
   Tingginya dukungan lintas pihak diluar desa (Pemerintah Kabupaten – Perusahaan – LSM – Universitas) dalam mengisi ruang – ruang kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan beberapa aspek pembangunan desa; pemerintahan, perekonomian, kewilayahan.
5. **Kapasitas Anggaran**
   Ketersediaan anggaran sebagai penopang pembangunan desa di Berau relatif tinggi bila dibandingkan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki kampung – kampung di wilayah lain. Hal ini dapat dipotret terutama pada pos Alokasi Dana Kampung.

6.3.2 Tantangan

1. **Kesempitan SDM**
   Bentang alam yang sedemikian potensial belum dioptimalkan sepenuhnya, dikarenakan ketersediaan (kuantitas) SDM yang kurang.
2. **Envisioning Kampung**
   Imajinasi masa depan kampung belum nyata terbentuk, pun inovasi – inovasi menuju kemandirian kampung belum ditemukan.
3. **Kemauan/ *Willingness***
   Pemerintah kampung dan pengurus BUMK belum sepenuhnya "memiliki niat" untuk berbenah, hanya sebagian kecil pemerintah kampung dan pengelola BUMK yang memiliki kemauan kuat untuk meninggalkan "warisan baik" bagi masa depan. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme para *stakeholder* kunci kampung dalam mengikuti proses ini relatif kurang.

Persoalan lain yang kami temukan adalah **Lemahnya Advokasi.** Akibat dari lemahnya kapasitas pemerintah desa (kapasitas politik dan kepemimpinan, serta kapasitas proses dan birokrasi), juga belum optimalnya koordinasi dan konektivitas adalah lemahnya advokasi terhadap kepentingan desa, yang sesuai dengan konteksnya. Hal ini merupakan catatan penting upaya mendudukkan desa sebagai subjek pembangunan yang dapat tumbuh dari akarnya sendiri. Selain, kapasitas advokasi merupakan kapasitas penting dalam mengupayakan berbagai kebutuhan masyarakat kampung. Persoalan lemahnya advokasi ini akan berdampak pada tingginya ketergantungan kampung terhadap pihak – pihak diluar kampung.

6.4 Strategi Keberlanjutan : Rekomendasi Penguatan Ekosistem Inovasi Kemandirian Kampung

Sumber daya kunci yang telah dipetakan dijadikan perspektif utama sebagai dinamisator perubahan. Berdasar hal tersebut, formulasi strategis yang lebih komprehensif kami susun sebagai rekomendasi keberlanjutan Akademi Kampung Sigap, dengan menyentuh 4 bidang perbaikan.

6.4.1 Perbaikan Infrastruktur Politik

1. Reformulasi Kebijakan Daerah
   - Memanfaatkan sisi kepatuhan pemerintah kampung dengan perumusan kebijakan daerah untuk membangun ekosistem politik guna mendorong transformasi politik.
   - Reformulasi Perbup.61/2019 sesuai PP.11/2021 dan Permendesa.3/2021
2. Penguatan fungsi Regulasi, Fasilitasi, dan Insentif, baik oleh Pemerintah Kampung maupun Pemerintah Daerah.

6.4.2 Perbaikan Infrastruktur Ekonomi

1. Penguatan Tata Kelola BUMK
   - Reformulasi Perkam & AD-ART sesuai PP.11/2021 dan Permendesa.3/2021
   - Pendampingan perencanaan usaha BUMK
   - Pendampingan pengelolaan usaha BUMK
2. Inisiasi BUMK Bersama
   - Pembentukan BUMK Bersama
   - Struktur organisasi & tata kelola
   - Inkubasi usaha bersama

6.4.3 Perbaikan Infrastruktur Sosial

Reformulasi peran PSS sebagai *Community Organizer (CO)* → mobilisasi sinergitas peran antar lini pembangunan kampung →representasi Pemkab di tengah masyarakat *(panotikon)*

6.4.4 Perbaikan Infrastruktur Teknologi

1. *Hardware (Device, Network) – Software (Application) – Organoware* (Pengelola Sistem)
2. Kapasitas Datakrasi → data sebagai basis perencanaan dan kebijakan pembangunan kampung

7 EPILOG

7.1 UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa upaya memperkuat ekosistem kemandirian desa membutuhkan komitmen kuat, serta dukungan dari berbagai pihak. Apresiasi setinggi – tingginya kami haturkan kepada para pihak yang telah bekerja sama mendukung pelaksanaan Program Akademi Kampung Sigap. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada :

1. Kementerian Desa PDTT;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pemerintah Kabupaten;
5. Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
6. Pejuang Sigap Sejahtera se-Kabupaten Berau;
7. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Merabu;
8. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Muara Lesan;
9. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Tepian Buah;
10. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Harapan Jaya;
11. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Labanan Makmur;
12. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Labanan Makarti;
13. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Melati Jaya;
14. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Maluang;
15. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Teluk Harapan;
16. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Tanjung Batu;
17. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Teluk Semanting;
18. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Pilanjau;
19. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Semurut;
20. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Biatan Bappinang;
21. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Biatan Lempake;
22. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Talisayan;
23. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Campur Sari;
24. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Tembudan;
25. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Biduk – Biduk;
26. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Teluk Sumbang;
27. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Sungai Payang, Kukar;
28. Pemerintah Kampung & Pengurus BUMK Karangan Ilir, Kutim;
29. Yayasan Nastari, Bogor;
30. Perkumpulan Perisai, Berau; dan
31. Seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Program Akademi Kampung Sigap.

7.2 KATA KITA

H. Masrani – Sekretaris DPMK Berau

"Program Akademi Kampung Sigap merupakan inovasi daerah khususnya bagi BUMK yang ada di Kabupaten Berau khususnya dan Kaltim pada umumnya, dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi manajemen BUMK dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi masyarakat, semoga dengan meningkatnya kapasitas SDM pengelola BUMK maka ekonomi kampung bangkit di masa pandemi dan kampung menjadi tangguh serta sejahtera"

Wahyudi Anggoro Hadi – Lurah Desa Panggungharjo, Bantul

"Keluasan ruang dan sumber daya di Berau mencukupkan prasyarat bagi lahirnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi prasyarat tersebut tidak akan mampu terkelola dengan baik jika pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak membuka ruang ruang partisipasi bagi tumbuh dan berkembangnya SIGAP (aksi inspiratif warga untuk perubahan)."

"Disinilah peran strategis Akademi Kampung Sigap; membuka ruang partisipasi disatu sisi serta meningkatkan kualitas partisipasi disisi lain."

Chris Djoka – Yayasan Konservasi Alam Nusantara

"Hadirnya Akademi Kampung Sigap diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta memberikan ruang pembelajaran baru baik bagi Pemkam maupun BUMK termasuk bagaimana mendorong lahirnya inovasi - inovasi baru dalam mendukung kerja - kerja Pemkam dan BUMK.

Kemajuan teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkam dan BUMK untuk mendukung percepatan proses pembangunan kampung.

Keberadaan Akademi Kampung Sigap di masa mendatang diharapkan dapat menginspirasi lahirnya kampung - kampung yang mengedepankan prinsip - prinsip partisipatif, transparan dan inovatif serta menjadi laboratorium pembelajaran bersama untuk kemajuan tata kelola kampung dan BUMK, baik di Berau maupun Kaltim."

Mupit Datusahlan – Kepala Kampung Labanan Makmur

"Saya sangat berterimakasih kepada kehadiran Sanggar Inovasi Desa di Kabupaten Berau. Harapan kami dapat melahirkan 'Kepemimpinan Desa yang Tranasformatif, Inovatif dan Kreatif yang mampu menghadapi tantangan jaman ditengah kejamnya kemajuan teknologi media'."

*"Kedepan, kita perlu menyiapkan **Sekolah Kepemimpinan Desa** dengan berbagai kelas kebutuhan dalam mewujudkan desa yang sesungguhnya, yaitu:*

1. *Kelas leadership,*
2. *Kelas entrepreneurs dan pengelolaan SDA berkelanjutan,*
3. *Kelas mobilisasi partisipasi & kelembagaan desa, dan*
4. *Kelas pengembangan sosial dan kebudayaan desa."*

"Semoga kita dapat menyiapkan generasi dan kepemimpinan yang tangguh dalam hal membangun dengan kepemimpinan desa yang sesungguhnya."

Agustinus Karna, Kepala Kampung Merabu

"Sebenarnya program Akademi Kampung Sigap ini baik untuk saling bertukar pengalaman baik sesama desa yg dipandang cukup inovatif. Namun sangat disayang Akademi Kampung Sigap ini tidak bisa dirasakan dengan baik manfaatnya bagi kampung karena

pembelajarannya via online yang hampir semua kampung di Berau mengalami kendala soal jaringan internet dan bahkan listrikpun sangat terbatas.

Harapan saya kedepan polanya dirubah dengan menghadirkan 1 personil ke masing – masing kampung secara langsung sehinga bisa bermanfaat lebih nyata lagi program ini."

Rachmad Setyawan – Kepala Kampung Talisayan

"Atas nama Pemerintah Kampung Talisayan, Saya Rachmat Setyawan, sebagai kepala kampung, sangat mengapresisasi dengan adanya Akademi Kampung Sigap, tentu dengan harapan memberikan kemampuan di setiap kampung khususnya Kampung Talisayan untuk dapat berinovasi memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di kampung sehingga dapat mengangkat nama Talisayan lebih dikenal secara nasional. Terimakasih..."

Burhanuddin Mide – Kepala Kampung Pilanjau

"Akademi Kampung Sigap sangat membantu kampung dalam mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi potensi yang ada, hingga memotivasi atau membangkitkan semangat warga kampung untuk berinovasi, kreatif dalam mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan dikampung".

"Kehadiran Akademi Kampung Sigap juga banyak memotivasi pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dikampung dalam mendesain hasil produk TOGA agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas terutama warga/ dasawisma - dasawisma yg ada di kampung baik dari pemanfaatan untuki pengobatan maupun dari segi finasialnya."

"Harapan kedepan, semoga Akademi Kampung Sigap tetap berjalan dengan baik, membina, melatih, warga-warga di kampung demi percepatan pembangunan dikampung."

Septi Eunike R, Sekretaris Kampung Biatan Bappinang

"Dengan adanya AKS ini, semakin membuka wawasan kami untuk terus berinovasi dan bermimpi lebih tinggi lagi dalam memajukan kampung walaupun dengan potensi sekecil apapun. Semoga melalui AKS banyak kampung - kampung khususnya di Kab. Berau semakin mampu mengoptimalkan potensinya masing - masing dan dapat menjadi kampung mandiri kedepannya."

Sriyanto – Direktur BUMK Rumpun Jaya Mandiri, Melati Jaya

"Terima kasih sudah memberikan kesempatan

untuk terlibat dalam Akademi Kampung Sigap yang sangat positif walaupun belum bisa maksimal, dan harapan saya program ini dapat berlanjut agar programnya benar - benar matang untuk bisa diterapkan baik untuk BUMK ataupun Pemkam."

Jumono – Direktur BUMK Mandiri Jaya Abadi, Campur Sari

"Akademi Kampung Sigap sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang Desa dan BUMDes. Kami berharap masih ada kelanjutan program ini. Pemateri sangat tidak membosankan."

"Akademi Kampung Sigap is the best ……."

Arief Swasono – Direktur BUMK Rindang Jaya, Tembudan

"Akademi Kampung Sigap sebagai simbol lahirnya 'teamwork' yang akan membawa perubahan lebih baik dalam membangun dan meningkatkatkan ekonomi, kesejahteran dan kemandirian kampung"

Tiara Intan Palupi – Korcam PSS Maratua

"Akademi Kampung Sigap memberi semangat kepada kampung melalui pemaparan inovasi-inovasi yang sudah berjalan di Panggungharjo. "

"Peserta kegiatan terpacu karena diberikan gambaran step by step proses membangun desa dgn perencanaan yg baik. Metode kegiatan AKS dengan banyak melakukan diskusi secara langsung membuat masyarakat tidak segan/ menutup diri sehingga memudahkan keterbukaan informasi antara penerima dan pemberi materi."

"Kami harap program ini bisa di lanjutkan. Dengan demikian informasi dan inovasi yg sudah dijalankan dapat diadopsi/ dimodifikasi sesuai kebutuhan kampung sehingga menjadi titik terang bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan diantaranya dalam proses menyusun, mengelola, mencari solusi dan merealisasikan mimpi kampung mereka sendiri."

Dea Nurwana Solihin – Faskam PSS Labanan Makarti

"Sukses erat kaitannya dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti."

Bung Tomi – *Founder* Forum UMKM Berau

"Terima kasih atas diadakannya program Akademi Kampung Sigap karna dari semua itu kami dapat banyak sekali pelajaran dan ilmu baru yang sangat berharga."

"Harapan saya kedepannya program Akademi Kampung Sigap ini bisa terus berlanjut dan bisa bersinergi dengan kampung-kampung di Berau"

"Akademi kampung Sigap keren banget…."

Teguh Purnomo – Yayasan Nastari, Bogor

"Sigap adalah program unggulan di Kabupaten Berau, dan Akademi Kampung Sigap ini sangat menunjang untuk pelaksanaannya".

"Kami berharap Akademi Kampung Sigap terus dijalankan hingga semua kampung di Berau berubah menjadi kampung yang maju dan mandiri. Dan harapan kami akademi kampung sigap tidak hanya di Berau, namun bisa meluas di Indonesia hingga semua desa maju dan mandiri."

Raden Saleh – Perkumpulan Perisai, Berau

"Akademi Kampung Sigap adalah upaya pendampingan yang sangat baik dalam memajukan kampung - kampung di Kabupaten Berau. Mereka secara langsung terbuka untuk mereplikasi segala pengalaman baik yang telah dilakukan Panggungharjo."

"Harapannya upaya ini bisa disambut dengan baik dan dilanjutkan oleh berbagai pihak di Kabupaten Berau. Berbagai pihak terutama komitmen pemerintah kampung, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang punya kacamata dan pandangan sama dalam melihat dan mengharapkan kampung yang lebih baik di Kabupaten Berau."

7.3 TIM IMPLEMENTASI PROGRAM AKADEMI KAMPUNG SIGAP

Konsultan Utama

1. Wahyudi Anggoro Hadi
2. Ryan Sugiarto
3. Ahmad Musyaddad

Program Manager

1. Aditya Mahendra Putra

Administrasi & Keuangan

1. Muchlis Dwi Atmaja *(Coord.)*
2. Arina Hikmaya

Mobilisasi & Operasional

1. Muhammad Murjani
2. Sriyanto
3. Sadam

Media & Publikasi

1. Syaiful Choiruddin
2. M. Asad Dirana
3. Agesti Siwi Prabantari
4. Bung Tomi

Virtual Mentor

1. Any Sundari *(Coord.)*
2. M. Zidny Kaffa
   (Dedicated Mentor – Pemkam)
3. Joko Hadi Purnomo
   (Dedicated Mentor – BUMK)

***Expert* Tata Kelola Pemerintahan Kampung**

1. Yuli Trisniati
2. Hosni Bimo Wicaksono
3. Rosada Roan Athariq
4. AB. Widyanta

***Expert* Tata Kelola BUMK**

1. Eko Pambudi
2. Sholahuddin Nurazmy
3. M. Arief Rohman
4. Rindy Widya Rasmono

IT Support

1. Ahmad Mizdad Hudani *(Coord.)*
2. Damar Saksomo Jati

Operated by :

Sanggar Inovasi Desa

Supported by :

Konservasi Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

PEJUANG SIGAP SEJAHTERA

PEJUANG
SIGAP
SEJAHTERA

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari

Sanggar
Inovasi Desa